

# ANALISIS CSIS

## Problematik Pembangunan Politik Sesudah 1993

- Hubungan Timur-Barat dan Dampaknya pada Kawasan Asia-Pasifik
- Implementasi Pancasila
- Dinamika Pembangunan Politik Indonesia dan Integrasi Nasional
- Pembangunan Politik Sesudah Tahun 1993
- Arti Partai Politik Bagi Pembangunan Nasional
- Problematik Parpol di Indonesia: Kasus PDI
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN



Analisis CSIS

Logo CSIS

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.



Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: *Nalar Ajar Terusan Budi*. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelanjangan gambar orang di tengah piringan melambangkan keterbukaan budi -- tiadanya sikap a priori -- pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Kalimat *Nalar Ajar Terusan Budi* yang tertera pada lingkaran piringan adalah *surya sengkala*: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus mengemukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. *Nalar* menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, *Ajar* berwatak 7, *Terusan* berwatak 9, dan *Budi* berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. *Nalar Ajar Terusan Budi* juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya menganalisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna *Nalar Ajar Terusan Budi* adalah bahwa bagi CSIS, bernalar, belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G. Sidharta.

Pemimpin Redaksi/  
Penanggung Jawab

Dewan Redaksi

Redaksi Pelaksana

STT

ISSN

Rufinus LAHUR

Daoed JOESOEF, A.M.W. PRANARKA, J. Soedjati DJIWANDONO.  
M. Hadi SOESASTRO, Harry TJAN SILALAH, Jusuf WANANDI,  
Clara JOEWONO, Kirdi DIPOYUDO, Djisman S. SIMANDJUNTAK,  
A.R. SUTOPO, Onny S. PRIJONO

Bambang WALGITO, Sunarto NDARU MURSITO, Medelina K. HENDYTIO

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,  
tanggal 28 Agustus 1978

0126-222X



# ANALISIS CSIS

TAHUN XIX, NO. 1, JANUARI-FEBRUARI 1990

## Daftar Isi

• Pengantar Redaksi	2
• Hubungan Timur-Barat dan Dampaknya pada Kawasan Asia-Pasifik <i>Jusuf WANANDI</i>	4
• Implementasi Pancasila <i>A.M.W. PRANARKA</i>	18
• Dinamika Pembangunan Politik Indonesia dan Integrasi Nasional <i>Sayidiman SURYOHADIPROJO</i>	33
• Pembangunan Politik Sesudah Tahun 1993 <i>SOEMITRO</i>	47
• Arti Partai Politik Bagi Pembangunan Nasional <i>HARDI</i>	54
• Problematik Parpol di Indonesia: Kasus PDI <i>M. Riza SIHBUDI</i>	67
• Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN <i>SUDIBYO, Yoyok ARIESSUSANTO &amp; F. ANDREA</i>	77

## Pengantar Redaksi



**T**ULISAN *Jusuf Wanandi* menjelaskan bagaimana perkembangan hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan Asia-Pasifik berikut akibatnya bagi negara-negara di kawasan termasuk Indonesia. Dalam rangka ini dikemukakan perlunya perumusan strategi baru yang berlandaskan kerjasama ekonomi di Pasifik seperti yang dirintis oleh *Pacific Economic Cooperation Conference* (PECC) selama ini.

Implementasi Pancasila mungkin akan merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai. *Pranarka* mengajukan beberapa hal yang berhubungan dengan implementasi Pancasila ini. Tentang apa dan mengapa harus diimplementasikan. Dan bagaimana jalan mengimplementasikannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang terus berubah.

*Sayidiman Suryohadiprojo* menguraikan bahwa maksud integrasi nasional adalah untuk mewujudkan harmoni atau keselarasan antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan bangsa Indonesia. Tulisannya ini berusaha mengemukakan hal-hal yang bersangkutan dengan pembangunan politik yang menghasilkan integrasi nasional itu.

*Soemitro* mengemukakan bahwa dalam menghadapi abad XXI atau mulai tahun 1993, hendaknya setiap aspirasi yang menghendaki perubahan dan pembaruan harus dilakukan secara berencana dan terkendali agar tidak membingungkan dan mengakibatkan disintegrasi bangsa. Dengan demikian pada akhir Rencana Strategi Pembangunan Jangka Panjang II, bangsa Indonesia harus sudah menjadi bangsa yang kuat ekonomi dan politik sehingga dapat memberi arti pada posisi silangnya dan pemilikan atas sumber daya yang sangat luas.

*Hardi* meninjau peranan partai politik secara historis, serta mengungkapkan pelbagai faktor yang menyebabkan kelemahannya baik karena faktor intern maupun ekstern. Juga ia mengajukan pandangan mengenai perlunya pelaksanaan pembaruan sedini mungkin, agar partai politik semakin dewasa dan bertanggungjawab dalam pembangunan bangsa.

*M. Riza Sihbudi* mengkaji permasalahan yang dihadapi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta masa depan partai ini, terutama setelah cukup berhasil dalam Pemilu 1987. Ia mengemukakan beberapa masalah menonjol yang dihadapi oleh partai ini, yaitu konflik intern serta identitas partai di samping kemandirian, demokratisasi dan rekrutisasi.

Sebagaimana dalam enam penerbitan sebelumnya secara tetap disajikan Ringkasan Peristiwa Kegiatan ASEAN, maka pada penerbitan inipun kegiatan yang sama tetap disajikan, yaitu sampai bulan Desember 1989. Keseluruhan kegiatan ini diasuh oleh *Sudibyo* bersama *Yoyok Ariessusanto* dan *F. Andrea* sebagai anggotanya.

*Maret 1990*

*REDAKSI*



# Hubungan Timur-Barat dan Dampaknya pada Kawasan Asia-Pasifik

*Jusuf WANANDI*

## Pendahuluan

**D**ALAM karangan ini akan dijelaskan bagaimana perkembangan hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan Asia-Pasifik, baik yang sedang berlaku sekarang maupun yang akan berkembang di masa depan. Lalu akan diuraikan akibat-akibat yang akan timbul dari perkembangan-perkembangan tersebut untuk kawasan Asia-Pasifik, termasuk untuk Indonesia.

Dalam perkembangan hubungan tersebut diasumsikan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan Asia-Pasifik akan mengikuti perkembangan hubungan mereka secara global. Hal ini berarti bahwa perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Eropa, yang masih merupakan titik sentral dari persaingan kedua negara adikuasa semenjak Perang Dunia II, akan berpengaruh pada kawasan kita pula, sehingga dari permulaan harus diamati.

Pengaruhnya hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan Asia-Pasifik pasti dirasakan pula oleh masing-masing negara di kawasan, dan Indonesia bukanlah suatu kekecualian. Karena itu perlu diuraikan apa pengaruhnya dan bagaimana Republik Indonesia melakukan reaksi terhadap perkembangan hubungan tersebut.

Akhirnya perlu dilakukan spekulasi bagaimana perkembangan yang terbaik seperti yang dapat diduga oleh penulis untuk kawasan Asia-Pasifik, dilihat dari sudut kepentingan Indonesia.

## Perkembangan Hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet Secara Global

Jelas bahwa sedang terjadi suatu situasi *detente II* antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang jauh lebih mendasar dan berarti untuk masa depan dibandingkan dengan nasibnya *detente I* dalam tahun 1970-an.

Sebab-sebabnya terletak pada perkembangan dalam negeri masing-masing negara



adikuasa, dan terutama sebagai akibat kemacetan-kemacetan ekonomi Uni Soviet. Ketergantungan sistem perekonomian sentralnya pada perkembangan politik, membawa akibat kemandekan-kemandekan yang sangat mendasar, sehingga persaingan persenjataan dengan anggaran belanja pertahanan yang tinggi (diperkirakan antara 15-20% dari GNP) tidak dapat lagi dipertahankan karena dapat mengakibatkan ambuknya secara total perekonomian Uni Soviet sendiri.

Karena itu satu-satunya jalan untuk dapat melakukan perubahan struktur ekonomi ialah dengan mengurangi anggaran belanja pertahanan Uni Soviet, dan untuk mencapai tujuan itu harus dilakukan peredaan ketegangan dan pencegahan konflik dengan Amerika Serikat.

Karena itu Uni Soviet mengusulkan berbagai macam inisiatif di bidang perlucutan senjata dan pengawasannya, dimulai dari *Intermediate-range Nuclear Forces* (INF) untuk *intermediate missiles*, sampai pada persenjataan strategis, dan yang konvensional untuk teater Eropa.

Dari peredaan ketegangan itu diharapkan oleh Uni Soviet akan terjadi hubungan ekonomi yang lebih meningkat dengan negara-negara Barat, sehingga mereka mendapatkan kredit, barang-barang konsumsi dan teknologi untuk memperbaiki perekonomiannya yang begitu sekarat. Usaha dan kebijakan-kebijakan baru ini menjadi lebih mendalam dan diajukan secara dramatis oleh kepemimpinan baru Uni Soviet di bawah Gorbachev.

Tanpa kepribadian dan kepemimpinannya Uni Soviet tetap akan menghadapi masalah-masalah mendasar yang sama. Jelas, siapa pun yang memimpin Uni Soviet di masa yang akan datang harus mengambil

tindakan dan kebijakan drastis seperti yang diusulkan Gorbachev dalam bentuk perubahan struktur perekonomian (*perestroika*), keterbukaan sistem politik (*glasnost*) dan *new thinking* dalam kebijakan luar negeri. Yaitu, mengatur hubungan internasional Uni Soviet berdasarkan perkembangan hubungan yang nyata dan riil demi meredakan ketegangan dan sekaligus membantu perekonomian Uni Soviet di masa yang akan datang.

Hanya Gorbachev memberikan suatu dimensi keberanian dan teater pada usul-usul perubahan kebijakan-kebijakan Uni Soviet tersebut sehingga lebih terasa dan lebih jauh daripada suatu kepemimpinan Uni Soviet yang kolektif ataupun yang lebih lemah.

Walaupun perubahan kepemimpinan Uni Soviet tidak akan membawa perubahan-perubahan pada kenyataan dan perkembangan obyektif yang dihadapi Uni Soviet dan jawaban-jawaban yang akan diberikan terhadapnya tidak dapat lain daripada hanya secara garis besarnya saja untuk waktu dekat ini, namun hal itu belum berarti bahwa Uni Soviet akan lebih "jinak" ataupun "mudah" untuk dihadapi.

Pertama-tama adalah karena kekuatan militernya masih sangat besar dengan persenjataan nuklir yang lengkap. Dan meskipun Gorbachev telah mengambil keputusan-keputusan sepihak untuk mengurangi pasukan konvensionalnya di Eropa Tengah, tetapi kenyataannya dia masih memiliki angkatan perang terbesar di dunia dengan 25.000 senjata nuklir.

Kalaupun ideologi Marxisme-Leninisme akan bertambah pudar, bagaimanapun Uni Soviet sebagai negara besar masih dapat menjadi ancaman yang riil. Apalagi perkembangan dalam negerinya dan sekutu-sekutu-



nya di Eropa Timur yang sedang tidak menentu, dan dapat menyebabkan suatu ledakan yang besar di Eropa dengan akibat-akibat yang dahsyat, karena kekuatan militer Uni Soviet masih demikian besarnya.

Padahal opini publik di Barat sedang mengalami *euphoria* (perasaan gembira yang berlebihan) dan kekacauan yang tidak menentu dalam mencari strategi baru untuk menggantikan kebijakan *containment* yang telah demikian berhasil menghadapi Uni Soviet selama 45 tahun. Misalnya anggaran belanja pertahanan Amerika Serikat telah dipotong secara riil dalam 5 tahun terakhir, dan suasana yang sama dihadapi oleh negara-negara di Eropa Barat.

Dalam opini rakyat Amerika Serikat maka untuk sementara ini ancaman terbesar bukan lagi datang dari Uni Soviet melainkan dari Jepang. Begitu pula jawaban negara-negara Barat terhadap perkembangan di Uni Soviet dan Eropa Timur terutama ditekankan pada bidang perlucutan dan pengawasan persenjataan karena masih terbawa oleh kebijakan *containment* tersebut. Padahal persoalan yang mungkin dihadapi ialah bagaimana mengatur hubungan yang stabil dengan Uni Soviet yang sedang menghadapi masalah lepasnya negara-negara Eropa Timur dari pengaruhnya dan bagaimana pula mengatasi gejolak-gejolak dalam negerinya tanpa menyebabkan berseraknya *imperium* Uni Soviet di masa depan.

Di lain pihak Amerika Serikat pun sedang mengalami tekanan-tekanan ekonomi dalam negerinya, yang juga membutuhkan perubahan struktur tertentu, meskipun tidak separah perkembangan ekonomi Uni Soviet. Tetapi yang lebih diperlukan lagi ialah pemikiran-pemikiran baru dari Amerika Serikat sebagai pemimpin negara-negara Barat, menghadapi Uni Soviet dan Eropa Timur

yang sedang mengalami perubahan-perubahan yang mendasar dan sekaligus mengatur hubungan-hubungan baru dengan negara-negara sekutunya sendiri baik di Eropa maupun di Pasifik, karena kemampuan dan perkembangan yang pesat dari negara-negara sekutunya itu, baik di bidang ekonomi maupun politik.

Hubungan yang bi-polar semenjak Perang Dunia II telah dijawab dengan *containment* oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dengan berhasil. Yang dibutuhkan untuk masa depan ialah jawaban terhadap perkembangan *multipolarity* di bidang ekonomi dan politik, serta bidang keamanan, yaitu berdasarkan suatu perimbangan baru di antara negara-negara besar.

Dalam hal ini maka pakta-pakta militer NATO dan Warsawa masih perlu dipertahankan untuk sementara, tetapi akhirnya perlu dipikirkan bahwa tirai besi di Eropa akan ambruk dan adanya pola pendekatan antara kedua negara Jerman akan membuat suatu zona negara-negara netral di Eropa Tengah.

Bagaimana perkembangan tersebut akan mempengaruhi kawasan Asia-Pasifik?

Hingga kini, perhatian utama peredaan ketegangan antara Timur dan Barat terutama ditujukan di kawasan Eropa, karena memang di sanalah pertentangan tersebut terpusatkan semenjak Perang Dunia II selesai.

Di kawasan Eropa pula pertentangan tersebut diwujudkan dalam bentuk teater militer yang jelas di mana kedua belah pihak tergabung dalam pakta-pakta militer, yaitu NATO dan Pakta Warsawa.

Berlainan adalah keadaan strategis di kawasan Asia-Pasifik, di mana pertentangan Barat dan Timur memang terasa pula semen-



jak berakhirnya Perang Dunia II dan menjadi nyata semenjak Perang Korea dilancarkan pada tahun 1948, tetapi bentuknya lebih kompleks dan tidak diwujudkan dalam suatu teater yang jelas. Komplikasi disebabkan pula oleh negara-negara yang tidak termasuk ke dalam suatu blok tetapi memegang peran yang penting secara regional, yaitu Cina dan Republik Indonesia yang *non-aligned*.

Alasan lain ialah perimbangan yang asimetris antara kekuatan Amerika Serikat di kawasan yang mengandalkan diri pada kekuatan maritim dengan strategi *forward deployment* dan strategi maritimnya, sedangkan Uni Soviet merupakan suatu kekuatan kontinental.

Untuk sementara maka peredaan ketegangan terutama masih dipusatkan pada kawasan Eropa, meskipun beberapa perkembangan telah terjadi di kawasan Asia-Pasifik, tetapi belum dalam hubungan pokok antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Hal itu dapat dimengerti karena memang seperti diuraikan di atas, gerakan detente II ini dimulai oleh kebutuhan Uni Soviet untuk memperbaiki ekonominya yang benar-benar macet dan pada suatu tahap tertentu juga diperlukan oleh Amerika Serikat (dan sekutu-sekutunya) untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyatnya terutama melalui perubahan struktur ekonominya.

Padahal Uni Soviet di bawah Gorbachev tentu mempunyai prioritas utama untuk memperbaiki struktur ekonominya, dan mengatasi masalah-masalah dalam negeri yang bertubi-tubi muncul sebagai akibat usaha perubahan dan keterbukaan di bidang politik (*glasnost*) yang membarenginya. Masalah-masalah yang sedang dihadapi me-

reka memang besar dan sulit, seperti menumbuhkan sektor swasta atau koperasi, menciptakan perangkat moneter dan fiskal baru, dan memberikan inisiatif pada usaha-usaha di luar perencanaan sentral.

Dan terutama mengatasi hambatan-hambatan yang diciptakan *vested interest* birokrasi dan partainya terutama di bagian bawah dan menengah, serta mengajak rakyatnya berani mengambil inisiatif-inisiatif baru dalam bidang produksi memang tidaklah mudah. Di bidang politik dihadapi masalah negara-negara bagian Baltik yang menghendaki kemerdekaan atau otonomi yang luas, seperti pula Ukraina, negara-negara di bagian Asia, serta perang antara Armenia melawan Azerbaijan.

Begitu pula pemogokan-pemogokan buruh tambang di mana-mana mengancam usaha Gorbachev untuk mengatasi kekurangan-kekurangan produktivitas perekonomian Uni Soviet dan usaha-usahanya memperbaiki tingkat penghidupan rakyatnya.

Meskipun dia kelihatannya secara politis dominan dalam hirarki partai dan kenegaraan di Uni Soviet, namun masih saja kaum konservatif menunggu kegagalannya untuk dapat menggantikannya. Maka masalah *political survival* masih menjadi masalah yang penting pula baginya.

Kedua, yang menjadi perhatian utamanya pula ialah Eropa Timur seperti telah diuraikan di atas. Eropa Timur memang mau dijadikan oleh Uni Soviet tirai besi untuk menghalangi Jerman apabila menyerbu Uni Soviet di masa depan, sehingga dianggap vital oleh Uni Soviet bagi keamanannya. Tetapi dengan perkembangan yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini sebagai akibat



kebijakan-kebijakan Gorbachev memberi kebebasan masing-masing negara sosialis menentukan jalan dan strategi pembangunannya sendiri, maka Polandia dan Hongaria telah mencapai suatu perkembangan yang tidak pernah dapat terduga terjadi dalam waktu sesingkat itu. Yaitu, telah mengubah pemerintahan di Polandia sehingga dipegang oleh solidaritas yang non-sosialis, dan di Hongaria terciptanya suatu perubahan negara sosialis dengan kemungkinan suatu pemerintahan non-sosialis akan memegang pemerintahan setelah Pemilu tahun 1990 ini.

Kejadian-kejadian dan perkembangan yang penting di Jerman Timur ialah Egon Krenz menggantikan Honecker sebagai pemimpin partai komunis namun pemerintahan belum tentu dapat diterima oleh rakyat Jerman Timur. Dan karenanya keadaan dan perkembangan di sana masih belum menentu dan masih dapat membahayakan kestabilan seluruh Eropa, karena merupakan landasan pokok kebijakan dibaginya Eropa oleh Uni Soviet. Di samping itu pengaruhnya terhadap penyatuan Jerman dan masalah yang dapat ditimbulkannya yang akan mengubah seluruh perimbangan dan kestabilan Eropa semenjak Perang Dunia II memang dapat terjadi.

Yang terpenting bagi Uni Soviet dalam seluruh perkembangan di Eropa Timur itu ialah bagaimana menjaga agar perubahan-perubahan di sana jangan sampai mengakibatkan ancaman bagi keamanan Uni Soviet. Untuk sementara hal itu berarti bahwa negara-negara tersebut tetap tergantung dalam Pakta Warsawa namun untuk masa jauh ke depan Eropa Tengah hendaknya menjadi suatu gugusan yang netral, agar tidak perlu dikhawatirkan oleh Uni Soviet akan menjadi ancaman untuk keamanannya.

## **Pengaruh Hubungan Timur-Barat di Kawasan Asia-Pasifik**

Pemikiran-pemikiran baru mengenai perkembangan Eropa Tengah dan masalah persatuan Jerman dengan segala akibatnya bagi Masyarakat Eropa tahun 1992 dan perkembangan yang belum jelas dan menentu di Eropa Timur kiranya menjadi masalah terpenting dewasa ini, bukan hanya di Eropa tetapi juga untuk seluruh dunia. Mengingat pentingnya kawasan tersebut bagi perkembangan Eropa di masa depan dan juga untuk hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada waktu-waktu mendatang yang akan mempunyai dampak pula bagi keamanan di kawasan Asia-Pasifik.

Tetapi hal itu tidak berarti bahwa di kawasan Asia-Pasifik tidak ada samasekali kemajuan dalam hubungan Uni Soviet dan Amerika Serikat, ataupun dalam usaha untuk mencapai kestabilan dan perdamaian.

Hanya usaha-usaha tersebut tidak selalu dilakukan karena hubungan Uni Soviet dan Amerika Serikat, meskipun dalam berbagai konflik regional sudah mulai ada pendekatan dari kedua negara adikuasa untuk turut mengatasi dan menyelesaikannya. Atau minimal jangan mengakibatkan konfrontasi antar mereka. Atau jangan sampai menghambat hubungan antar negara adikuasa di bidang-bidang lain. Misalnya, perlucutan senjata dan hubungan detente, seperti pernah terganggu pada pertengahan tahun 1970-an, yang mengakibatkan detente pertama yang dimulai Nixon-Kissinger menjadi batal dan menghambat diterimanya Perjanjian SALT II oleh Senat Amerika Serikat dan opini rakyatnya pada akhir tahun 1970-an.

Sudah dua kali Gorbachev mengemukakan pidato penting tentang hubungan Uni



Soviet dengan kawasan Asia-Pasifik yang dianggapnya makin penting yaitu di Vladivostok pada tahun 1986 dan di Krasnoyarsk pada tahun 1988. Tetapi kelihatannya belum mendapat tanggapan dari Amerika Serikat secara baik karena tidak dianggap mengandung usul-usul yang cukup realistis untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam hubungan antara kedua negara adikuasa.

Dalam pidatonya di Vladivostok, yang mengusulkan suatu konperensi keamanan ala Helsinki di Eropa dianggap tidak tepat karena situasi di Asia-Pasifik jauh berbeda dengan keadaan di Eropa. Sedangkan dalam pidato keduanya di Krasnoyarsk, dengan usul-usulnya untuk mengatasi ketegangan dengan Amerika Serikat di kawasan ini tidaklah realistis, karena khusus ditujukan untuk mengurangi ketegangan dan kompetisi dengan Amerika Serikat di bidang maritim saja, yang justru menjadi strategi andalan Amerika Serikat dan karenanya ditolak mereka karena dianggap bukanlah usul yang sungguh-sungguh.

Di lain pihak Amerika Serikat pun belum mempunyai pemikiran-pemikiran baru bagaimana menggantikan strategi *containment* terhadap Uni Soviet dengan suatu strategi baru yang memperhitungkan pula *multi-polarity* yang telah terjadi di kawasan Asia-Pasifik ini. Hingga kini kedudukan dan perimbangan kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan ini menguntungkan Amerika Serikat, baik di bidang militer, apalagi di bidang politik dan ekonomi, sehingga tidak ada insentif bagi mereka untuk memulai suatu pemikiran strategi yang baru sama sekali. Apalagi Uni Soviet telah banyak menarik armada Pasifiknya ke Utara dan terutama menempatkannya di Lautan Othskhotz, sehingga secara operasional hanya

sepertiga dari kehadiran armada tersebut berada di seluruh kawasan Pasifik lainnya.

Padahal banyak pula kemajuan di kawasan yang bersifat positif bagi Amerika Serikat, yaitu sekutu-sekutu dan kawan-kawannya telah dapat berkembang dengan pesat, dan telah mempunyai suatu kepercayaan pada diri sendiri yang tinggi, serta kemampuan ketahanan yang membaik. Dan karenanya mereka berkeinginan dan berkemampuan untuk meningkatkan pertahanannya tetapi tetap dalam rangka berbagi beban dengan Amerika Serikat. Misalnya Jepang, Korea Selatan, Australia dan pada tahap tertentu beberapa anggota ASEAN. Karena keterbatasan Amerika Serikat dalam soal anggaran pertahanannya, dan mengingat perkembangan di kawasan yang positif untuk Amerika Serikat dan sekutunya, maka perlu dipersiapkan mereka bersama suatu strategi baru di mana kehadiran pasukan Amerika Serikat secara teratur dan bertahap dapat dikurangi sesuai dengan strategi baru tersebut. Kesemuanya dilakukan bersama sekutu dan temannya, dan dalam suatu kerangka perlucutan dan pengawasan persenjataan dengan Uni Soviet di masa yang akan datang.

Yang terpenting ialah persekutuan antara Amerika Serikat dan Jepang untuk kawasan Asia-Pasifik. Mengingat keduanya telah dapat meletakkan suatu kerjasama yang komplementer dan berbagi beban secara memadai. Maka, mereka terutama dapat menahan kekuatan maritim Uni Soviet di Laut Othskhotz pada masa perang dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal selam Uni Soviet di sekitar Jepang sampai dengan jarak 1.000 mil ke Tenggara.

Persekutuan itu pun penting, karena akan mengurangi secara riil kekhawatiran negara-negara di kawasan Asia-Pasifik ter-



hadap kekuatan militer Jepang sebagai akibat sejarah Perang Dunia II yang telah pernah dirasakan sendiri ekseseksesnya oleh negara-negara di kawasan.

Di samping itu hubungan bilateral tersebut sangat penting peranannya di bidang ekonomi dan kemakmuran yang telah dicapai di kawasan ini, karena kedua negara merupakan sumber kapital dan teknologi serta pasar bagi negara-negara lain di kawasan.

Bagaimana hubungan terpenting ini akan dipengaruhi oleh detente antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentu vital untuk diamati dan dipikirkan terus demi kestabilan dan perdamaian di kawasan.

Hingga kini persekutuan itu dapat bertahan, didukung oleh mayoritas opini rakyat kedua negara, karena dianggap memang perlu untuk kepentingan nasional mereka masing-masing. Dan Uni Soviet yang terus melakukan peningkatan kekuatan armada Pasifiknya di kawasan dan belum mau melengkapi hubungannya dengan Jepang dengan suatu perjanjian perdamaian telah membantu memperkuat opini rakyat Jepang untuk meneruskan persekutuan dengan Amerika Serikat dan lebih meningkatkan kemampuan SDF (*Self Defense Forces*) sesuai dengan rencana Defence Agency tahun 1976 dan *mission* yang diberikan Amerika Serikat.

Tetapi ketegangan yang sedang terjadi dengan Amerika Serikat karena *trade deficit*, dan persaingan teknologi canggih akan menekan hubungan strategis di masa yang akan datang. Yaitu, seperti sudah terlihat dalam masalah "ko-produksi" pesawat tempur FSX, sehingga memang perlu diperhatikan pula dan diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena fase di mana dapat terus dipi-

sahkan bidang ekonomi dari bidang militer dalam hubungan kedua negara sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Jepang sendiri sedang mengalami fase perkembangan politik yang tidak menentu, di mana Partai Demokrasi Liberal (LDP) kehilangan mayoritas di Upper House dan semakin merosotnya perolehan kursi di Lower House, walaupun masih tetap mayoritas. Dengan demikian Jepang akan sulit memenuhi permintaan Amerika Serikat untuk lebih lagi berbagi beban dalam bidang pertahanan di kawasan dan untuk membuka lebih lebar lagi pasar dalam negerinya, karena tekanan-tekanan dari sebagian rakyatnya yang *vested interest* seperti petani, pemilik toko dan sebagainya. Keadaan itu justru dapat menimbulkan suatu ketegangan terus-menerus dengan Amerika Serikat dan dalam jangka menengah dapat mengganggu persekutuan yang demikian vitalnya.

Apalagi kalau partai sosialis yang menang dalam Pemilu di Upper House beberapa bulan yang lalu dapat menempa koalisi mayoritas di Lower House nanti setelah Pemilu, padahal kebijakan-kebijakannya di bidang pertahanan dan persekutuan dengan Amerika Serikat masih tidak berubah dan sangat pasifis sifatnya.

Meskipun perubahan-perubahan kelihatannya masih sedikit, namun perlu diamati terus perkembangan politik di Jepang yang mulai tidak menentu itu semenjak krisis yang dihadapi LDP dengan jatuhnya Takeshita.

Sikap Uni Soviet terhadap Jepang perlu mendapat perhatian, terutama karena Gorbachev akan melakukan kunjungan ke sana pada tahun 1991 nanti. Hingga kini memang Gorbachev belum mengusulkan sesuatu yang berarti dalam hubungan Uni Soviet de-



ngan Jepang, padahal Jepang lebih daripada RRC dapat merupakan lawan yang tangguh bagi Uni Soviet. Terutama Jepang bersama Amerika Serikat ataupun sendirian di masa depan, dapat menjadi sumber kapital dan teknologi bagi pembangunan Siberia dan bagian timur (Asia) dari Uni Soviet.

Keadaan itu terjadi karena Gorbachev belum dapat memusatkan perhatiannya pada Jepang. Atau memang masalah *Northern Territories* Jepang merupakan persoalan yang cukup pelik baginya berhubungan harus mengorbankan wilayah yang strategis penting. Hal mana dapat menimbulkan masalah-masalah dengan daerah-daerah Uni Soviet lainnya yang juga dapat menjadi tuntutan negara-negara lain untuk dikembalikan atau menghendaki kemerdekaannya sendiri terlepas dari Uni Soviet.

Tetapi mungkin pula Gorbachev yang terdesak sekali di dalam negerinya dapat mengusulkan hal-hal yang spektakuler terhadap Jepang tanpa memberikan sesuatu yang langsung pada Jepang. Misalnya dia dapat mengusulkan agar dua kepulauan terdekat dengan Jepang (Habomei dan Shikotan) diserahkan kembali pada Jepang sedangkan yang dua lagi demikian vitalnya bagi keamanan Uni Soviet, akan digantungkan pada peredaan ketegangan di Asia Timur, termasuk usahanya agar Jepang melepaskan diri dari *maritime strategy* dan *horizontal escalation strategy* Amerika Serikat di Asia-Pasifik, atau dengan tegas menjalankan kebijakan "3 nos" dalam *nuclear armament*, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi dan tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke dalam wilayah Jepang.

Dapat pula dia mengakui kedaulatan Jepang atas keempat pulau di Utara, tetapi meminjamnya untuk 10 tahun, dengan usul untuk menghapuskan di kedua belah pihak

persenjataan yang ditumpuk di wilayah tersebut. Dengan demikian membuat Jepang lambat-laun melepaskan diri dari aliansinya dengan Amerika Serikat.

Berbagai skenario dapat dipikirkan yang dapat diusulkan Gorbachev, dan tergantung dari perhitungan dan situasi dalam negerinya, apa yang akan dapat dilakukannya. Tindakan-tindakannya itu yang pada dasarnya bermaksud mengembalikan langsung/tidak langsung keempat pulau di Utara, dengan *quid pro quo* strategis yaitu agar Jepang melepaskan diri dari berbagai strategi Amerika Serikat (tanpa segera harus melepaskan aliansi pertahanannya dengan Amerika Serikat), dan ekonomis, yaitu membantu Uni Soviet membangun bagian Asia-nya dan menerima partisipasi mereka dalam dinamik kawasan Asia-Pasifik itu sendiri.

Persoalan pokok yang dapat terjadi ialah bahwa usul-usul tersebut akan menimbulkan perdebatan sengit dalam opini rakyat Jepang, karena hingga sekarang belum ada kesungguhan di pihak pemimpin Jepang untuk memikirkan lebih lanjut pengembalian keempat pulau tersebut dengan kompromi-kompromi yang perlu dilakukan oleh Jepang. Yang jelas dapat diduga dan dipersiapkan ialah bahwa Uni Soviet akan mencari kompromi tentang keempat pulau tersebut betapapun sulitnya Gorbachev memperolehnya di Moskow. Maka Jepang harus mempersiapkan opini rakyatnya tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut agar pemerintahnya tidak akan mendapat tekanan-tekanan dari opini rakyatnya untuk mengurangi hubungan strategis yang sudah ditempa dengan Amerika Serikat hingga kini. Hal ini perlu diperhatikan karena ketegangan di bidang ekonomi dan khususnya perdagangan telah membuat sikap elite rakyat Jepang terhadap Amerika Serikat tidak selalu simpatik



meskipun hal tersebut belum berpengaruh terhadap dukungan aliansi dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan.

Di lain pihak Amerika Serikat dan Jepang harus mengatasi ketegangan-ketegangan yang timbul karena beradanya dua budaya yang makin lama makin interdependen di segala bidang. Yaitu, ekonomi, politik dan keamanan yang sedang mengalami suatu proses penyesuaian baik di dalam negeri masing-masing maupun dalam lingkungan regional di kawasan Asia-Pasifik ataupun global.

Proses penyesuaian tersebut merupakan perkembangan yang terpenting di kawasan Asia-Pasifik, terutama bagi kestabilan dan perdamaian di kawasan ini. Proses itu tidak mudah, karena secara strategis mereka adalah sekutu tetapi secara ekonomis mereka memiliki unsur kompetisi yang besar.

Karena itu yang dibutuhkan dari kepemimpinan Amerika Serikat justru suatu pandangan strategis baru yang dapat mencakup perubahan-perubahan di kawasan. Dan ini mencakup baik kemampuan dan perubahan Amerika Serikat sendiri, maupun perubahan-perubahan dari kedudukan dan kemampuan teman atau sekutunya terutama Jepang, tetapi juga Korea Selatan, ASEAN, Australia dan New Zealand, di samping perkembangan dan perubahan yang terjadi dengan Uni Soviet dan Cina.

Dalam pandangan strategis tersebut dapat diperkirakan bagaimana *containment policy* diubah. Yaitu, melalui perundingan-perundingan dengan Uni Soviet tentang perlucutan dan pengawasan senjata, termasuk *Confidence Building Measures* (CBM), yang pasti harus meliputi pula pada akhirnya perundingan tentang kekuatan maritim secara lebih sungguh-sungguh daripada yang diu-

sulkan oleh Uni Soviet hingga kini. Perundingan-perundingan dengan Uni Soviet yang pada prinsipnya bersifat bilateral harus pula dilakukan dengan banyak konsultasi dan musyawarah bersama para sekutu dan teman-temannya.

Di samping itu Amerika Serikat perlu pula melakukan musyawarah dengan para sekutu dan teman-temannya mengenai berbagai beban dan tugas, yang meliputi beban untuk membayar kehadiran sebagian militer Amerika Serikat di Jepang, penarikan mundur pasukan-pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan yang dibarengi dengan kemandirian komando dari pasukan-pasukan Korea Selatan. Hal itu meliputi pula usaha mempertahankan pangkalan Subic Bay dan Clark Field di Filipina dalam rangka penggunaannya secara bersama oleh pasukan Amerika Serikat dan Filipina. Penggunaan fasilitas di Singapura untuk *repair* dan *maintenance* tetap penting, sebagian untuk membantu secara politis tetap dipertahankannya pangkalan-pangkalan di Filipina dan membantu proyeksi kekuatan Amerika Serikat ke Lautan Hindia bila fasilitas-fasilitas di Filipina dihapuskan.

Dukungan yang mulai diberikan oleh Presiden Aquino untuk dipertahankannya pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Filipina dan bantuan parlemen untuk mau melakukan suatu referendum bila perundingan-perundingan dengan Amerika Serikat telah selesai sebelum Senat akan meratifikasikannya, menunjukkan ada lebih banyak harapan bahwa pangkalan-pangkalan tersebut dapat dipertahankan. Namun fleksibilitas Amerika Serikat tentang masa berlakunya perjanjian baru, penguasaan dan yurisdiksi pangkalan-pangkalan tersebut, pembatasan wilayahnya serta kompensasi yang memadai masih sangat diperlukan.



Dukungan ASEAN terhadap pangkalan-pangkalan tersebut jelas dimulai dari fasilitas yang diberikan Singapura pada Amerika Serikat, sampai pada dukungan-dukungan pribadi dari Indonesia, di samping dukungan publik dari Muangthai dan Malaysia.

Pangkalan-pangkalan di Filipina tersebut penting terutama untuk tujuan politik. Yaitu, memberikan kemantapan pada negara-negara di Asia-Pasifik akan kestabilan dan perdamaian di kawasan. Dengan demikian kehadiran negara adikuasa yang *benign* yaitu Amerika Serikat memberikan kesempatan pada negara-negara tersebut untuk memusatkan perhatiannya pada pembangunan nasionalnya terutama pembangunan ekonomi.

Pangkalan-pangkalan tersebut penting pula secara strategis untuk mendukung pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Jepang dan kedudukan Armada VII di Asia Timur dengan *repair facilities* dan pusat logistik, serta sebagai landasan yang sama (yaitu logistik dan repair) untuk proyeksi kemampuan militer Amerika Serikat ke Lautan Hindia dan Teluk Parsi.

Pangkalan-pangkalan tersebut memang sukar diganti karena luasnya, letak geografis, pelabuhannya yang alamiah dan terutama karena tenaga kerjanya yang terlatih dan murah. Tetapi bila perlu sekali, untuk menggantikan sebagian besar fungsi-fungsinya, meskipun tidak sebaik Subic dan Clark, maka Amerika Serikat dapat memikirkan sejumlah fasilitas lain yang membujur mulai Okinawa di Jepang sampai Freemantle di Australia Barat. Ongkos peralihan yang dahulu dianggap tinggi sekali kalau harus menggantikannya dengan tuntas di satu tempat, dengan demikian tidak diperlukan. Dan menurut perkiraan ongkos-ongkos pemindahan tersebut akan memakan antara 3-4

milyar dollar Amerika Serikat.

Dengan penyesuaian-penyesuaian dalam perjanjian baru tentang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat tersebut, maka untuk jangka waktu 10 tahun ASEAN diberi waktu untuk mulai mengisi kekosongan-kekosongan yang mulai terasa di kawasan Asia-Pasifik dan Asia Tenggara khususnya. Karena kehadiran Amerika Serikat secara militer di kawasan ini memang telah berkali-kali disesuaikan semenjak Perang Vietnam selesai pada tahun 1975, bahkan sebenarnya semenjak Doktrin Guam dicanangkan oleh Nixon pada tahun 1969. Meskipun penyesuaian selama Perang Vietnam tidak terlalu dirasakan karena konflik yang berkelanjutan.

Semua negara di kawasan ini sedikit banyak telah menyesuaikan diri, baik berupa berbagi beban seperti dalam hal Jepang dan Australia serta Korea Selatan maupun dengan peningkatan kerjasama regional seperti dalam hal ASEAN terutama setelah KTT I, dan melalui peningkatan anggaran belanja pertahanannya masing-masing di kawasan.

ASEAN telah menjawab tantangan tersebut dengan ide dan cita-cita *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) yang menghendaki terciptanya orde regional untuk kawasan Asia Tenggara, di mana ASEAN harus menciptakan hubungan yang baik dan positif dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan hubungan yang seimbang dengan negara-negara besar. Kemudian ide ini dibarengi dengan SEA NWFZ untuk kawasan Asia Tenggara, meskipun diakui bahwa ide-ide tersebut merupakan sasaran jangka panjang.

Di masa depan memang perlu diperhitungkan apakah ide ZOPFAN dan NWFZ tersebut akan memadai. Atau justru karena pengunduran Amerika Serikat, secara wajar



perlu pula diciptakan suatu kerjasama ASEAN di bidang pertahanan, sehingga paling sedikit kekosongan kekuatan yang akan diakibatkannya dapat diisi oleh negara-negara ASEAN sendiri. Harus diakui bahwa hal ini memerlukan waktu dan uang, karena harus dapat mencapai kemampuan melakukan ASW (*Anti-Submarine Warfare*) apabila mau dan mampu mempertahankan *Sea Lanes of Communication* (SLOC) yang vital di kawasan Asia Tenggara ini. Dalam hal perangkat-perangkat persenjataan maka dibutuhkan bantuan dan alih teknologi dari Jepang kepada ASEAN, bila ASEAN setuju melakukan pengamanan SLOC tersebut, dan bila memang diperlukan dalam berbagi beban demi kestabilan dan perdamaian kawasan. Hal ini lebih dapat diterima daripada pengamanan SLOC tersebut diserahkan pada Jepang, bila Amerika Serikat sendiri tidak sanggup lagi melakukannya pada awal abad ke-21, dalam suatu skenario di mana pangkalan-pangkalan di Filipina harus ditinggalkan oleh Amerika Serikat karena berakhirnya perjanjian baru nanti.

Kerjasama ASEAN di bidang pertahanan memang baru dalam tahap pelontaran ide dan yang sampai kini sudah terjadi dan dilaksanakan adalah kerjasama bilateral dan kadang-kadang trilateral.

Masalah pokok yang harus diselesaikan lebih dahulu antar ASEAN untuk menempa suatu kerjasama di bidang pertahanan ialah mempersatukan persepsi tentang ancaman untuk kawasan Asia Tenggara. Konflik Kamboja telah membuat persepsi ini terpecah-pecah, di mana Muangthai mengandalkan Cina karena ancaman pasukan Vietnam di perbatasannya dengan Kamboja sebagai akibat penyerbuan pasukan-pasukan Vietnam ke sana semenjak akhir tahun 1978.

Di lain pihak Republik Indonesia dan Malaysia berpendapat bahwa Vietnam harus

diajak berteman, mengingat ide ZOPFAN hendak menciptakan suatu orde regional, supaya nantinya dapat menahan tekanan dari negara besar mana pun di kawasan, terutama dari Cina negara besar satu-satunya yang berada di kawasan itu sendiri.

Maka itu penyelesaian konflik di Kamboja tersebut akan dapat mengembalikan persepsi yang sama tentang ancaman dan pandangan tentang bagaimana menghadapinya melalui penciptaan suatu orde regional yaitu ZOPFAN tadi.

Kerjasama di bidang pertahanan dapat pula dilakukan di luar kerangka ASEAN seperti yang dikehendaki oleh *ASEAN Concord* yang diterima pada KTT I di Bali pada tahun 1976. Untuk itu hal-hal yang dapat dilakukan terutama tukar-menukar intelijen mengenai berbagai macam ancaman, melakukan berbagai macam latihan di berbagai bidang militer, termasuk di laut dan udara serta koordinasi dalam soal *procurement hardware*s yang diperlukan. Yang sudah terjadi ialah tukar-menukar siswa untuk berbagai macam pendidikan di masing-masing angkatan bersenjata.

Selain ASEAN, maka Australia pun sedang menyesuaikan diri menghadapi ancaman kontinentalnya dengan Defence White Paper tahun 1987. Di mana mereka mengubah strategi pertahanan demi menciptakan kemampuan menghalau penyerbuan ke bagian utara Australia. Di samping itu yang terutama adalah menciptakan suatu kawasan pengamanan di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan di mana mereka berkepentingan untuk bersama negara-negara di sekitarnya (yaitu negara-negara ASEAN dan negara-negara Pasifik Selatan), di mana Australia mempunyai *Five Power Defence Arrangement* (FPDA) dengan Malaysia dan Singapura serta secara bilateral kerjasama



dengan Republik Indonesia dan Muangthai serta Brunei, sedangkan dengan PNG mempunyai suatu perjanjian pertahanan yang serupa dengan *Five Power Defence Arrangement* (FPDA) tersebut.

Kerjasama dan pakta pertahanan dengan Amerika Serikat tentu masih merupakan hal yang penting bagi Australia terutama dalam menghadapi ancaman dari Uni Soviet, termasuk ancaman nuklirnya. Sayangnya New Zealand telah membekukan hubungannya dengan ANZUS, karena telah melarang kapal-kapal bertenaga atau bersenjata nuklir mampir pada pelabuhan-pelabuhan di sana, sehingga secara praktis tidak ikut lagi dalam usaha pertahanan dengan Amerika Serikat. Desakan opini rakyatnya untuk tidak menambah kapal-kapal frigate pada pasukan konvensional akan membuat kerjasama bilateral pertahanan dengan Australia juga tidak efektif, sehingga sulit dapat diandalkan.

Pada pihak lain, Gorbachev mulai menjalankan politiknya terhadap Asia dengan menormalisasikan hubungannya dengan RRC pada bulan Mei 1989 yang lalu, setelah tiga hambatan yang diajukan RRC dapat diatasinya. Yang terakhir di antaranya adalah penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja. Usaha normalisasi hubungannya dengan ASEAN, yaitu dengan menekan Vietnam menarik diri dari Kamboja, sebenarnya merupakan suatu fungsi dari hubungannya dengan Cina. Karena hubungan tersebut memang penting sekali untuk dinormalisasi agar pasukan-pasukannya di perbatasan Cina dapat ditarik atau dibubarkan untuk dapat mengurangi anggaran pertahanannya. Begitu pula Uni Soviet telah mulai membuka hubungan informal dan perdagangan dengan Korea Selatan, dan untuk itu telah mendesak Korea Utara agar jangan

menyerbu Korea Selatan. Meskipun pemberian persenjataan pada Korea Utara ditingkatkan demi mendapat beberapa fasilitas militer, termasuk hak untuk melakukan penerbangan di atas wilayah Korea Utara.

Tetapi seperti dikatakan di atas, karena masih tertahan oleh urusan dan perkembangan dalam negeri serta Eropa Timur maka perhatian Uni Soviet terhadap kawasan Asia-Pasifik masih terbatas. Meskipun Uni Soviet sangat menginginkan berpartisipasi secara politis dan ekonomis di kawasan ini. Namun perangkat dan kebijakannya untuk kawasan ini masih sangat terbatas, sehingga perkembangan hubungannya dengan negara-negara di kawasan dibatasi. Misalnya usul-usulnya untuk *Confidence Building Measures* (CBM), perlucutan dan pengawasan persenjataan dengan Amerika Serikat masih belum dianggap serius karena sangat berat sebelah. Padahal Amerika Serikat berkepentingan pula akan proses detente II dijalankan pula di kawasan ini asal benar-benar dilakukan secara realistis. Kedua, hubungan Uni Soviet dengan Jepang penting untuk dinormalisasi dengan pengembalian kepulauan di utara. Karena Jepang penting bagi negara-negara di sekitarnya, maka apa yang dimintanya harus ikut didukung yang lain-lain. Ketiga, perangkat-perangkat dan kebijakan-kebijakan ekonomi Uni Soviet belum memadai dan belum berkembang. Akibatnya mereka sulit berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi di kawasan dalam waktu yang dekat ini.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa dewasa ini Uni Soviet lebih terbuka untuk mau mengawasi konflik-konflik regional agar tidak menjadi konflik dari kekuatan adikuasa pula. Untuk menjaga agar bantuan mereka dalam konflik tersebut tidak akan mengakibatkan hubungan Uni Soviet de-



ngan Amerika Serikat dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam perlucutan dan pengawasan persenjataan menjadi rusak. Hal ini misalnya kelihatan dalam masalah penarikan mundur di Afghanistan, penyelesaian Namibia dengan Angola, masalah Kamboja (juga dalam hubungannya dengan Cina), perang Iran-Irak, dan dalam soal bantuan untuk Nikaragua. Meskipun lebih kompleks, hal yang sama dapat pula diharapkan dalam masalah pertentangan di jazirah Korea. Hal itu tidak berarti bahwa Uni Soviet telah melupakan sasarannya untuk mencari pengaruh di Dunia Ketiga, tetapi mau membatasi ongkos yang harus dibayarnya untuk pengaruh tersebut baik dalam bentuk jumlah bantuan ekonominya maupun dalam hubungan dengan Amerika Serikat yang harus dikorbankan.

## Penutup

Kalau dilihat perkembangan kawasan Asia-Pasifik dewasa ini, maka tanda-tanda bahwa detente II juga akan menjalar ke kawasan ini cukup banyak, meskipun masih akan membutuhkan waktu sebelum berkembang penuh secara lebih konkrit dalam hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet kelak. Tanda-tanda bahwa proses de-ideologisasi dan multipolaritas juga terjadi dengan pesat di kawasan dalam hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet dan dengan negara-negara lain, terutama dalam usaha Uni Soviet untuk menjadi anggota yang penuh dari kawasan yang dinamis ini di bidang politik dan ekonomi, dan tidak hanya di bidang militer.

Gorbachev telah dua kali mengadakan pidato khusus yang diarahkan ke kawasan

ini, lalu di Vladivostok telah diadakan pula pertemuan pada tahun 1988 untuk tokoh-tokoh kawasan Pasifik untuk mengajak bekerjasama dengan Uni Soviet membangun kawasan Timur Jauh-nya sambil mencari jalan bagaimana Uni Soviet harus berpartisipasi di kawasan Asia-Pasifik yang dinamis itu. Mereka telah membentuk pula suatu Komite Nasional PECC (*Pacific Economic Cooperation Conference*) yang terdiri dari tokoh-tokoh penting di Uni Soviet, dan Menlu Shevernadze telah mengadakan kunjungan-kunjungan ke kawasan untuk menarik perhatian ASEAN, Australia dan Pasifik Selatan serta Jepang pada usaha Uni Soviet yang baru ini. Dan tentu Uni Soviet telah pula menormalisasikan hubungannya dengan Cina dan mulai mengadakan perdagangan dengan Korea Selatan.

Amerika Serikat di lain pihak belum dapat menemukan ide-ide baru dalam kerangka proses de-ideologisasi dan multipolaritas yang terjadi, setelah kebijakan *containment* telah begitu berhasil selama 40 tahun terakhir ini. Tetapi pada akhirnya Uni Soviet tidak dapat mengelakkan proses ini yang dibarengi pula dengan lebih menonjolnya faktor dan hubungan ekonomi dalam pergaulan internasional.

Karena Amerika Serikat berpendapat bahwa kedudukannya di kawasan ini jauh lebih baik dan menguntungkan baik secara militer, apalagi di bidang politik dan ekonomi maka Amerika Serikat masih mempunyai waktu untuk menyusun bersama teman dan sekutunya suatu strategi baru untuk masa depan kawasan. Hanya kalau hal ini digantungkan pada administrasi Bush saja, pasti tidak akan memadai karena mereka terkenal akan kelambatan dan kehati-hatian-nya. Oleh karenanya perlu pula digerakkan



seluruh opini para pemimpin di sana, termasuk Kongres, media massa dan para cendekiawan. Karena meskipun Amerika Serikat memang lebih menguntungkan kedudukan dan pengaruhnya di kawasan namun terdapat tanda-tanda bahwa untuk masa depan belum tentu semuanya akan tetap berjalan lancar. Hal itu terutama karena ketidakpastian perkembangan politik dan perubahan-perubahan masyarakat di Jepang yang kelihatannya dengan menangnya Partai Sosialis Jepang (JSP) dalam pemilu Upper House yang lalu, dan perubahan-perubahan strategi di Cina karena tragedi Tienanmen dan lebih berkuasanya kelompok-kelompok yang konservatif di Cina. Terdapat pula kemungkinan pertarungan kekuasaan yang belum selesai di sana berlangsung sampai terjadi alih generasi dalam 5-10 tahun mendatang.

Tetapi tugas merumuskan strategi baru, yang sebenarnya dapat dilandaskan pada perkembangan ekonomi yang pesat di kawasan, harus merupakan tantangan bagi semua negara yang menghendaki perdamaian dan kestabilan di kawasan dan bisa dimulai dengan melaksanakan ide kerjasama ekonomi di Pasifik. Usaha-usaha ke arah itu seperti terjadi dalam PECC dan dalam usaha PM Hawke di Canberra bulan November 1989 untuk mengatur kerjasama yang serupa di antara pemerintahan di kawasan yang mempunyai ekonomi terbuka.

Ide kerjasama ekonomi inilah yang merupakan jawaban dari negara-negara yang terbuka ekonomi dan politiknya untuk menjawab usul-usul Gorbachev tentang keamanan dan perdamaian di kawasan Pasifik.



# Implementasi Pancasila

A.M.W. PRANARKA

## Arti Kata Implementasi

**S**EBELUM kita melangkah lebih lanjut mengembangkan gagasan dan pemikiran mengenai implementasi Pancasila, terlebih dahulu baiklah kita mengadakan presisi pengertian, agar kita tidak terperangkap dalam *semantic confusion*. *Semantic confusion* ini tidak jarang menjadi salah satu sumber terjadinya berbagai *confusion* lainnya, seperti misalnya *intellectual confusion*, *academic confusion*, *political confusion*, perbedaan pendapat dan lain sebagainya.

Implementasi adalah cangkokan dalam bahasa Indonesia dari kata Inggris *implementation*. Dan kata Inggris *implementation* itu berasal dari kata bahasa Latin *implementum*. Kata *implementum* akarnya adalah kata kerja dalam bahasa Latin *implere*, yang berarti: mengisi, memenuhi, yang dapat mempunyai arti fisik maupun non-fisik: mengisi gelas, memenuhi gelas, atau mengisi konsep, memenuhi amanat dan sebagainya.

Maka itu implementasi berarti: kegiatan mengisi, kegiatan memenuhi. Bahkan kadang-kadang implementasi diartikan sebagai usaha menuntaskan, mengakhiri. Implementasi karena itu kerap disinonimkan dengan istilah aplikasi, realisasi, operasionalisasi. Kata *implement* dalam bahasa Inggris masih juga mempunyai arti lain lagi, yaitu sarana atau alat untuk sesuatu.

Mengenai istilah-istilah tersebut, walaupun tampaknya ada kesamaan, perlu kiranya dikaji secara kritis, karena dapat saja terjadi suatu operasionalisasi yang sesungguhnya bukan realisasi. Hal ini menjadi penting apabila yang dibicarakan adalah implementasi dalam hubungannya dengan hal-hal yang bersifat non-fisik.

Berbicara mengenai implementasi Pancasila pada hakikatnya adalah berbicara tentang istilah implementasi dalam arti non-fisik. Implementasi Pancasila tidak dapat diartikan sebagai mengisi Pancasila. Bila kita menggunakan pengertian ini maka Pancasila



hanya akan menjadi sekedar wadah fisik semesta, dengan isi substansi yang dapat bervariasi dan tidak menentu.

Dalam hubungannya dengan Pancasila kata implementasi kiranya lebih tepat bila diartikan sebagai: kegiatan memenuhi amanat. Amanat tersebut adalah amanat dasarnya bangsa Indonesia. Apa yang diimplementasikan? Mengapa harus diimplementasikan? Bagaimana jalan untuk mengimplementasikan?

Implementasi adalah suatu tindakan, suatu keaktifan yang sifatnya transitif, bukan intransitif. Maka implementasi itu akan selalu berarti implementasi sesuatu. Maka yang harus diketahui terlebih dahulu tentu saja: apakah sesuatu yang harus diimplementasikan itu. Terkait dengan ini selanjutnya adalah pertanyaan: mengapa harus diimplementasikan, dan kemudian bagaimana jalan implementasi tersebut.

Karena yang kita bicarakan adalah implementasi Pancasila, maka pertanyaan dalam hal ini adalah: apakah itu Pancasila, mengapa Pancasila harus diimplementasikan dan bagaimana jalan mengimplementasikan Pancasila itu.

### Apa Itu Pancasila?

Pancasila yang diimplementasikan itu adalah ideologi nasional bangsa Indonesia, dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai kultural pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila yang diimplementasikan adalah satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara bangsa Indonesia.

Dengan demikian perlu kejelasan mengenai Pancasila yang mana yang diimplementasikan. Agama Budha mempunyai ajaran yang disebut Pancasila. India mempunyai doktrin Pan-shil. Di samping itu ada banyak naskah, banyak tulisan, banyak uraian mengenai Pancasila. Kenyataan seperti ini pernah menimbulkan masalah, yang dapat disebut sebagai problem heterogenitas Pancasila, khususnya sumber dan tafsirannya.

Dalam hal ini perlu sekali kejelasan bahwa Pancasila yang diimplementasikan itu adalah Pancasila-nya bangsa Indonesia (jadi bukan Pancasila-nya orang per orang), dan karena itu sumber pokoknya adalah Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, dan bukan yang lainnya, yaitu: dalam kerangka Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana termuat di dalam konstitusi, hukum dasarnya bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, pola Pancasila merupakan ideologi nasional bangsa Indonesia, dan menjadi nilai-nilai kultural pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersifat mengikat secara mendasar, secara konstitusional dan secara hukum.

### Tiga Sifat Dasar Pancasila

Pancasila terjadi dalam sejarah. Karenanya untuk dapat memahami apa itu Pancasila haruslah kita mulai dengan memahami sejarah Pancasila itu. Dari sejarah perkembangan Pancasila, dalam hubungannya dengan sejarah bangsa Indonesia (yang dapat disebut sebagai sejarah Indonesia modern) dari awal hingga saat ini dan di masa yang akan datang nanti, maka dapatlah kita menunjuk adanya tiga sifat dasar dari Pancasila.



*Sifat yang pertama* adalah sebagai dasar negara, sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Proklamasi, yaitu Hukum Dasarnya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Atas dasar sifat ini maka Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum kita.

*Sifat yang kedua* adalah sebagai ideologi, yaitu cara berpikir dan cara kerja bangsa Indonesia mengenai perjuangannya, dan cara kerja bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita perjuangannya itu.

*Sifat yang ketiga* adalah sebagai ajaran mengenai nilai-nilai budaya yang diangkat dari pandangan hidup bangsa Indonesia, yang berakar dari sejarah budaya bangsa Indonesia.

Ketiga sifat tersebut saling terkait satu dengan yang lain dan merupakan paduan yang manunggal bulat.

Pancasila adalah ideologi nasional, yang mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan menjadi dasar negara kita. Pancasila adalah dasar negara yang dibangun atas dasar ideologi perjuangan rakyat Indonesia dan atas nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pancasila adalah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mewujudkan di dalam ideologi nasional dan dasar negara.

Sebagai Ideologi, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Sebagai Dasar Negara, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang Konstitusi Proklamasi atau Hukum Dasar kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yaitu Pembukaan dan Batang Tubuh serta Penjelasan UUD 1945.

Sebagai Nilai Budaya, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang sejarah masyarakat dan kebudayaan Indonesia sebagai masyarakat Nusantara.

Dari ketiga sifat dasar itu pula terdapat jawaban terhadap pertanyaan: mengapa Pancasila harus diimplementasikan. Sebagai ideologi, sebagai dasar negara di dalam konstitusi, dan sebagai nilai kultural, Pancasila mengandung amanat kategori-imperatif. Sebagai ideologi, Pancasila membawa amanat imperatif-ideologis. Pancasila adalah garis-perjuangan bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila membawa amanat imperatif-yuridis-konstitusional. Sebagai nilai kultural, Pancasila membawa amanat imperatif-etis. Sebagai ideologi, Pancasila adalah sebuah kategori imperatif bagi kehidupan berbangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sebuah kategori imperatif bagi kehidupan bernegara. Sebagai nilai kultural, Pancasila adalah sebuah kategori imperatif bagi kehidupan bermasyarakat. Karena itu Pancasila adalah asas yang imperatif bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

## Dua Jenis Implementasi

Adanya heterogenitas sumber dan heterogenitas tafsir maupun uraian mengenai Pancasila, memerlukan adanya pembedaan yang jelas mengenai adanya dua jenis implementasi Pancasila:

Pertama: Implementasi yang mempunyai daya mengikat seluruh rakyat Indonesia secara konstitusional dan secara hukum (yuridis). Ini dapat disebut implementasi konstitusional-kenegaraan.



Kedua : Implementasi yang tidak mempunyai daya mengikat rakyat Indonesia secara konstitusional dan secara hukum. Ini dapat dinamakan implementasi kultural-kemasyarakatan.

Untuk mudahnya mungkin dapat dikatakan bahwa jenis pertama adalah implementasi kenegaraan-formal, konstitusional, jenis yang kedua adalah yang sifatnya individual, kultural, sosiologikal, kemasyarakatan dan non-formal.

Sudah barang tentu selalu ada interaksi antara jenis implementasi pertama dan implementasi kedua. Interaksi ini sifatnya dialektikal, baik dalam bentuk dialektika negatif ataupun dialektika positif, yang dapat terwujud di dalam konflik ataupun konsensus.

Dalam suasana interaksi seperti itu dapat terjadi tiga suasana yang mewarnai implementasi Pancasila itu:

1. Suasana asosiatif (tidak ada konflik, konsensus, partisipatif);
2. Suasana opositif (terjadi konflik, tidak ada konsensus);
3. Suasana juxtaopositif (tidak menerima tetapi juga tidak menolak suasana menengah - *indifferent*, acuh-tak-acuh).

Hubungan dialektika antara implementasi yang mempunyai daya mengikat secara yuridis konstitusional di satu pihak dengan implementasi yang tidak mempunyai daya mengikat secara yuridis konstitusional tercermin juga di dalam hubungan dialektikal antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik nasional kita.

Hubungan tersebut meminta kemampuan kita untuk memahami perbedaan dan jalinan antara apa yang disebut bangsa,

masyarakat, pemerintah. Hal-hal ini akan menjadi penting di dalam dinamikanya implementasi aktual dari Pancasila tersebut.

### **Mekanisme Implementasi Konstitusional-Yuridis-Kenegaraan**

Jalur konstitusional yuridis berawal dari Proklamasi, yang kemudian diikuti oleh terbentuknya negara dan konstitusinya, di mana terdapat dasar, ideologi dan nilai-nilai kultural yang membentuknya. Proklamasi dan Konstitusi merupakan landasan dasar dari implementasi Pancasila. Artinya amanat Pancasila dituangkan menjadi amanat imperatif bangsa, negara dan masyarakat Indonesia, melalui Proklamasi dan Konstitusi itu. Di dalam konstitusi itu terdapat Pancasila sebagai amanat ideologi perjuangan, dasar negara serta nilai-nilai budaya nasional. Konstitusi atau UUD 1945 tidaklah sekedar sebuah dokumen hukum dasar kenegaraan, akan tetapi juga dokumen perjuangan dan dokumen tata nilai. Dengan perkataan lain UUD 1945 bukanlah sekedar piagam hukum dasar, akan tetapi juga piagam ideologi dan piagam kebudayaan bangsa Indonesia.

Kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itulah yang kemudian dikenal sebagai demokrasi Pancasila yang meliputi: demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi kultural kemasyarakatan. Pancasila membawa amanat untuk diwujudkan-nya demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Amanat itu dilaksanakan melalui pembangunan nasional. Karenanya pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila. Pembangunan nasional adalah implementasi Pancasila.



## Pembangunan Nasional Sebagai Implementasi Pancasila

Pembangunan nasional selalu merupakan sebuah pilihan politik dan aktualisasi ideologi. Karena itu pembangunan nasional yang kita selenggarakan sebagai satu bangsa ini adalah juga pilihan politik nasional kita dan aktualisasi ideologi kita. Karena itu tepatlah apabila pembangunan nasional kita kemudian dinyatakan sebagai pengamalan Pancasila.

Bahwa pernyataan mengenai pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila itu baru terjadi secara eksplisit pada tahun 1983, hal tersebut menunjukkan betapa masalah pembangunan itu beberapa waktu yang lampau telah menjadi bahan pembahasan dari pendapat yang berbeda-beda. Pada tahun 1968, ketika pada waktu itu diharapkan MPRS dapat menyiapkan sebuah GBHN, kita masih belum dapat membuat sebuah batasan (definisi) mengenai pembangunan tersebut. Ada debat dan kontroversi mendasar antara berbagai aliran mengenai paham-pahamnya tentang pembangunan. Namun perbedaan-perbedaan itu kemudian telah diolah secara kreatif sehingga kita pada tahun 1974 dapat membuat konsensus mengenai konsep pembangunan: yang landasan idiilnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya UUD 1945, landasan operasionalnya GBHN, dan dimengerti sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kita perlu ingat bahwa definisi pembangunan ini dibentuk oleh interaksi dialektikal kontekstual pada waktu itu. Definisi pembangunan nasional itu adalah definisi politis-strategis. Membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pilihan politik dan aktualisasi ideologi nasional tentulah tidak

lain kecuali membangun manusia dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila. Inilah modal dan konsep pembangunan yang kita anut.

Pembangunan nasional, yang berencana, bertahap, berkesinambungan, dilaksanakan berdasarkan konstitusi, demokratis dan berdasarkan hukum, merupakan paduan besar dari implementasi Pancasila pada tingkat kenegaraan dan implementasi Pancasila pada tingkat perorangan dan tingkat kemasyarakatan. Di dalamnya terdapat wujud implementasi Pancasila melalui pembangunan ideologi, pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya dan pembangunan hukum, untuk membangun lingkungan kehidupan nasional.

Dalam memahami pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tentu saja kita dapat mengikuti sistematika GBHN. Namun demikian sebagai usaha analitikal ada manfaatnya kita melihat beberapa bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta hukum dan aspek pertahanan-keamanannya. Hal ini juga lebih sesuai dengan acuan di depan mengenai tiga sifat dasar Pancasila baik sebagai ideologi, dasar negara maupun sebagai nilai-nilai kultural.

## Pembangunan Ideologi

Ideologi adalah cara berpikir suatu bangsa ataupun suatu kelompok mengenai apa yang ingin diperjuangkan (cita-cita) dan juga cara kerja mengenai bagaimana perjuangan itu dilaksanakan.

Pancasila sebagai ideologi nasional adalah ideologi perjuangan bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila itu terkandung muatan mengenai apa yang ingin kita perjuangkan



sebagai bangsa. Di dalam Pancasila itu terkandung pula amanat mengenai cara kita melakukan perjuangan tersebut.

Pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi tidak dapat dilepaskan dari pemahaman kita mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya sejak babak sejarah Indonesia modern yang berawal dari Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Ini berarti bahwa pemahaman kita mengenai Pancasila sebagai ideologi atau doktrin perjuangan nasional, memerlukan pemahaman kita tentang wawasan kebangsaan Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi dibentuk oleh kondisi yang kompleks, dibentuk oleh interaksi dialektikal yang majemuk. Dari situasi seperti itulah bangsa kita secara kreatif merumuskan wawasan-wawasan dasar mengenai perjuangan itu. Dengan perkataan lain salah satu masalah mendasar yang dijawab oleh Pancasila adalah apa yang lazim disebut sebagai problem legitimasi dan problem struktural. Kebangkitan nasional sebagai *liberation movement*-nya rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan memang harus mampu menjawab pertanyaan ini: Indonesia merdeka itu untuk siapa? Dan jawabannya adalah: untuk seluruh rakyat Indonesia yang disatukan dalam satu cita-cita perjuangan kemerdekaan. Indonesia merdeka itu adalah dari seluruh rakyat Indonesia, oleh seluruh rakyat Indonesia, dan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang disatukan sebagai satu bangsa Indonesia, tanpa ada sekat-sekat struktural diskriminatif di dalamnya.

Pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi (yaitu doktrin perjuangan bangsa Indonesia) memerlukan pemahaman mengenai Wawasan Kebangsaan Indonesia. Dalam

wawasan kebangsaan itu terkandung antara lain cita-cita kemerdekaan, cita-cita kemajuan, cita-cita kesejahteraan, cita-cita persatuan, cita-cita kebersamaan, cita-cita demokrasi, cita-cita republik, cita-cita kerakyatan. Atas dasar pemahaman ini menjadi jelas bahwa Pancasila mengandung amanat tentang demokrasi dan kemajuan.

Wawasan perjuangan seperti itulah yang kemudian mengantarkan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Proklamasi melahirkan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang satu, merdeka, berdaulat, menumbangkan struktur kolonial menjadi struktur nasional.

Sifat-sifat seperti dikemukakan di atas, misalnya saja sifat kerakyatan, tetap amat besar artinya untuk masa setelah Proklamasi, yaitu pada masa perang kemerdekaan. Dari dinamika itulah kita dapat melihat betapa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu lahir dari kandungan perjuangan rakyat Indonesia, dan karena itu mempunyai wawasan kebangsaan yang kuat serta dengan kemanunggalan dengan rakyat yang mendasar. Dalam konteks inilah kita dapat memandang bahwa segala kekuatan-kekuatan perjuangan bangsa adalah kekuatan-kekuatan nasional, kekuatan kebangsaan, kekuatan kerakyatan Indonesia. Dari kandungan itu pula tidak dikenal ada perbedaan dogmatik-diskriminatif antara ABRI dan Sipil sebagai kekuatan nasional.

Memang untuk perjuangan nasional akan selalu diperlukan kekuatan-kekuatan nasional, yaitu kekuatan yang memahami, menghayati, mempunyai komitmen mendasar, dan mempunyai kemampuan operatif untuk mencapai perjuangan nasional tersebut. Dan membangun kekuatan nasional seperti itu adalah salah satu esensi dari pembangunan ideologi.



Pada zaman pembangunan sekarang pun amanat Pancasila sebagai ideologi tetaplah sama. Pembangunan nasional adalah aktualisasi ideologi, dan untuk itu diperlukan pula kekuatan-kekuatan nasional yang mampu mengaktualkan ideologi nasional kita tersebut melalui upaya pembangunan.

Berbicara mengenai Pancasila sebagai ideologi jelas meminta kita untuk memahami makna dari wawasan kejuangan nasional kita. Wawasan itu antara lain adalah: berusaha untuk mencapai yang sebesar-besarnya bagi kejayaan bangsa dan negara kita, namun demikian tidak mundur apalagi berkhianat bila harus menghadapi situasi yang sejelek-jeleknya. Terkait dengan ini adalah ajaran tentang Ketahanan Nasional.

Pembangunan nasional adalah suatu wujud aktual dari perjuangan bangsa kita untuk mencapai cita-cita nasional. Dan perjuangan itu berjalan terus. Maka pembangunan nasional itu pun harus berjalan terus pula. Salah satu masalah nyata dewasa ini dan karenanya mengamanatkan tugas nasional saat ini: memikirkan kesinambungan pembangunan jangka panjang pertama dengan pembangunan nasional jangka panjang yang kedua. Pembangunan di masa yang akan datang itu pun tetaplah merupakan aktualisasi ideologi, yaitu menunaikan amanat Pancasila.

## Demokrasi Politik

Implementasi Pancasila yang amat penting tentu saja adalah di bidang pembangunan politik. Pembangunan politik adalah pembangunan yang amat penting, namun demikian juga pembangunan yang amat rumit.

Pembangunan politik itu mempunyai format yang mulai mantap sejak Orde Baru, sesudah bangsa kita merasakan berbagai pengalaman sejak dari tahun 1945 hingga tahun 1965, baik yang manis maupun yang pahit.

Orde Baru, yang tekad dasarnya adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, bertekad pula menunaikan amanat Pancasila dan amanat Konstitusi tersebut secara konsekuen dalam bidang politik, yang kemudian kita kenal dengan ajaran tentang Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila tidak lain adalah penataan dan pengembangan kehidupan kenegaraan dan politik berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945, baik yang berkenaan dengan struktur politik maupun kultur politiknya.

Secara singkat sekarang ini kita dapat melihat bagaimana Demokrasi Pancasila tersebut telah tumbuh menjadi suatu sistem, suatu tradisi, suatu kerangka landasan, yang memiliki komponen-komponen yang makin jelas. Yaitu landasan idiil, landasan konstitusional, landasan undang-undang, suprastruktur politik, infrastruktur politik, maupun kultur politik, mekanisme serta siklus kalender konstitusi, mencakup baik politik dalam negeri, politik luar negeri, dan pertahanan keamanan nasional. Terwujudnya landasan sistem politik nasional tersebut merupakan produk dari suatu proses yang tidak sederhana, bahkan rumit, kompleks. Landasan sistem politik nasional, yang diangkat dari pengalaman panjang itu, kiranya dapat menjadi bekal guna mengelola dinamika politik nasional kita dengan berbagai masalah dan tantangannya di masa yang akan datang.



## Demokrasi Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi merupakan prioritas dalam pembangunan nasional, walaupun tanpa mengesampingkan pembangunan bidang-bidang lain. Bahkan diupayakan terjadinya keterkaitan yang saling menunjang antara yang satu dengan yang lain. Perlu kiranya diperhatikan bahwa pemberian prioritas kepada pembangunan ekonomi itu pada hakikatnya adalah suatu keputusan politik nasional. Dalam pengertian ini pembangunan ekonomi merupakan pilihan politik nasional.

Pembangunan bidang ekonomi juga harus merupakan aktualisasi ideologi. Dengan demikian pembangunan ekonomi tersebut haruslah merupakan upaya memenuhi amanat Pancasila, baik sebagai ideologi, sebagai dasar negara dan sebagai nilai kultural.

Langsung ataupun tidak langsung sebuah ideologi dari suatu bangsa, masyarakat, atau negara, akan selalu mempunyai implikasi terhadap bidang ekonomi. Dalam perkembangan modern hal tersebut menjadi makin kentara. Cita-cita mengenai masyarakat, negara ataupun kehidupan berbangsa, selalu mempunyai dampak terhadap cita-cita ekonomi dari bangsa, masyarakat ataupun negara itu, dan akan mempunyai kaitan dengan sistem sosialnya, sistem politiknya, sistem hukumnya. Ideologi-ideologi besar dunia dewasa ini adalah ideologi yang menjadi semakin sadar terhadap faktor ekonomi itu.

Perjuangan bangsa Indonesia pun amat menyadari hal ini. Problem legitimasi dan struktural tidaklah semata-mata problem politik, akan tetapi juga problem ekonomi. Itu sebabnya di samping demokrasi politik, maka demokrasi ekonomi menjadi salah

satu cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Demokrasi ekonomi menjadi bagian dari cara bangsa kita berpikir mengenai masyarakat yang dicita-citakan, dan bagaimana masyarakat itu diwujudkan.

Demokrasi ekonomi, sebagaimana demokrasi politik, mengamanatkan bahwa kedaulatan ekonomi itu ada di tangan rakyat. Ekonomi nasional kita adalah ekonomi dari rakyat Indonesia, oleh rakyat Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Kedaulatan ekonomi tidaklah berada di tangan perorangan, kelompok ataupun golongan. Amanat mengenai demokrasi ekonomi itu tertuang antara lain dalam Pasal 33 UUD 1945, walaupun amanat mengenai pembangunan ekonomi tidak hanya terpaku kepada amanat pasal ini saja. Ada pasal-pasal lain yang memuat amanat yang harus diperhatikan dalam pembangunan ekonomi kita.

Berbeda dengan ideologi Marxis, Sosialis ataupun Kapitalis, yang menjadikan faktor ekonomi titik analisis dan titik gravitasinya, maka Pancasila sebagai ideologi perjuangan, dan juga sebagai nilai-nilai kultural, tidak menjadikan ekonomi sebagai faktor gravitasi, melainkan sebagai salah satu bagian dari faktor gravitasi itu. Ideologi kita tidak menganut determinisme ekonomi secara dogmatik struktural. Pancasila sebagai ideologi dan sebagai nilai kultural mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional itu tidak meninggalkan sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi harus diselenggarakan secara kultural.

Di dalam pola wawasan Pancasila yang mengamanatkan demokrasi ekonomi itu, ki-



ranya amat penting bagi kita untuk membuat pembedaan antara sistem ekonomi sebagai konsep ideologikal-kultural dan sistem ekonomi sebagai konsep teknikal. Politik ekonomi tentu saja merupakan upaya bagaimana mengembangkan ekonomi teknikal itu dalam kerangka wawasan ekonomi ideologikal kultural. Kita perlu membedakan ekonomi sebagai konsep kebudayaan dan ekonomi sebagai konsep peradaban, dan bagaimana memadukan hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Pembedaan antara ekonomi sebagai konsep ideologikal-kultural di satu pihak dengan ekonomi sebagai konsep teknikal di lain pihak saat ini menjadi makin aktual, seperti misalnya apa yang terjadi di Uni Soviet dan dalam usaha modernisasi Cina. Banyak orang beranggapan bahwa dengan menerapkan pola kerja sistem ekonomi liberal-kapitalis, maka Soviet telah mengadakan perubahan ideologi dari Komunisme ke Kapitalisme. Pandangan seperti ini kurang memahami apa arti ideologi. Ideologi sekedar dipandang sebagai suatu ajaran atau doktrin tertentu yang statis. Ideologi kurang dilihat sebagai cara berpikir mengenai perjuangan dan bagaimana melaksanakan perjuangan tersebut. Ideologi Rusia sudah barang tentu pada dasarnya adalah kepentingan negara Rusia itu sendiri. Dilihat dari segi ini maka yang sesungguhnya terjadi bukanlah perubahan ekonomi sebagai konsep ideologikal-politikal-kultural, melainkan ekonomi sebagai konsep teknikal. Sudah tentu dua hal tersebut bukan dua dimensi yang dapat disekat-sekat. Masalahnya di sini adalah bagaimanakah penguasaan ekonomi teknikal itu merupakan aktualisasi ideologi nasional.

Dalam hubungan dengan demokrasi ekonomi, kiranya kita juga dapat dan perlu ber-

bicara mengenai suprastruktur dan infrastruktur. Implementasi demokrasi ekonomi di tingkat suprastruktur adalah implementasi di tataran kebijaksanaan, di tataran normatif-direktif. Bukan pada tataran pelaku. Departemen Perdagangan misalnya atau Komisi VI DPR-RI misalnya bukanlah institusi perdagangan dan industri. Tataran pelaku politik itu terdapat pada infrastruktur demokrasi ekonomi. Dalam tataran infrastruktur ini kita dapatkan tiga pelaku atau aktor ekonomi utama: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Koperasi. Demokrasi ekonomi perlu mengatur pula hubungan inter-suprastruktur dan inter-infrastruktur, dan intra-suprastruktur serta intra-infrastruktur itu.

Karena dalam GBHN hanya dinyatakan bahwa demokrasi ekonomi kita itu tidak menganut etatisme ekonomi di satu pihak dan tidak pula menerapkan sistem *freefight liberalism* di lain pihak, maka masih banyak yang mempertanyakan ciri-ciri positif dari sistem ekonomi nasional kita. Sementara orang mengatakan bahwa berbeda dengan pembangunan bidang politik nasional, yang kerangka landasannya menjadi makin jelas, maka dalam pembangunan ekonomi ini kita belum melihat wujud yang mantap dari kerangka landasan Demokrasi Pancasila.

Terhadap pandangan terakhir ini kiranya kita perlu menyadari bahwa pembangunan ekonomi modern yang dalam arti sesungguhnya sebagai bagian dari kehidupan internal kemasyarakatan dan kenegaraan, itu secara sadar dan sistematis baru dimulai pada tahun 1969, walaupun ekonomi modern sebagai fenomena sudah masuk ke Indonesia beratus tahun yang lalu sebagai bawaan dari ekspansionisme kolonialisme modern. Kita harus meletakkan dasar-dasar tradisi baru untuk menjadi bangsa, masyarakat, negara,



yang secara internal memiliki kemampuan menguasai dan mengembangkan sistem ekonomi (terutama ekonomi teknikal) sebagai peradaban modern, bahkan peradaban global. Termasuk di sini adalah penguasaan manajemen, teknologi dan sistem moneter. Harapan kita berdasarkan pengalaman selama 25 tahun ini, baik yang manis maupun yang pahit, ialah agar kita dapat merakit serta meramu kerangka landasan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

### Kehidupan Sosio-Budaya Nasional yang Demokratis

Pembangunan sosio-budaya pada hakikatnya menyentuh lalu lintas interaksi dan komunikasi aktual yang menyangkut institusi kemasyarakatan maupun nilai-nilai kultural. Pengertian sosio-budaya memang merupakan suatu pengertian yang kompleks dan juga dinamik, akan tetapi yang jelas bidang sosio-budaya itu mencakup bidang kemasyarakatan dan bidang kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan itu merupakan hal yang manunggal saling terkait. Kalaupun sosiologi misalnya merupakan disiplin ilmiah mengenai masyarakat, maka sosiologi itu pun berbicara mengenai nilai-nilai dan norma. Sebaliknya anthropologi budaya yang berpusat pada nilai-nilai, akan pula menyentuh masalah kelompok maupun institusi. Kultur itu menjadi aktual dalam wujud struktur, sebaliknya struktur itu terjadi karena dinamikanya kultur.

Pembangunan sosial budaya ditinjau dari segi kemasyarakatan akan menyentuh masalah-masalah sekitar kelompok masyarakat (*social groupings*), baik kelompok atas dasar teritorial, keturunan (*gineakolo-*

*gis*), nilai-nilai budaya, agama-agama maupun tingkat peradaban, ekonomi dan status sosial. Pembangunan sosio-budaya ditinjau dari segi kemasyarakatan akan menyentuh pula masalah-masalah sekitar stratifikasi, dan masalah perubahan (*social-change*), baik yang berupa problem mobilitas vertikal maupun mobilitas horisontal, internal maupun eksternal.

Pembangunan sosio-budaya ditinjau dari segi kebudayaan akan menyentuh masalah-masalah sekitar nilai-nilai, pandangan hidup, baik mengenai sumbernya maupun hubungan antara sistem nilai yang satu dengan nilai yang lain.

Karena problem kultural itu tidak jarang menyatu dengan problem struktural maka masalahnya tidak sekedar menjadi nilai-nilai *an sich*, melainkan mengenai hubungan antara penganut sistem nilai yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini dapat terjadi pula perebutan legitimasi sebagai sumber sistem nilai, yang lazim bermuara pada politik.

Problem yang pertama-tama timbul sesuai dengan sifat dasar masyarakat kita adalah problem pluralisme, yang sekarang ini banyak dibicarakan orang, bahkan oleh sementara kalangan ingin dikembangkan sebagai ideologi baru. Dalam pandangan kita, pluralisme tersebut tidaklah dilihat sebagai kenyataan yang tersekat-sekat secara deterministik struktural, melainkan bahwa ada interdependensi antara satu dengan yang lain, ada interrelasi antara yang satu dengan yang lain, yang memungkinkan pula membangun persatuan dan kesatuan atas dasar kemajemukan sosial yang ada. Maka kita tidak membangun konsep masyarakat berdasarkan "pluralisme" semata-mata, namun kita tidak pula membangun masyarakat atas dasar pola "uniformisme-monolitik." Ki-



ta membangun konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan pola ini adalah yang sesuai dengan amanat Pancasila dan Demokrasi.

Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaan nasional itu merupakan muara yang ingin kita wujudkan dari segala usaha. Kita ingin mewujudkan masyarakat Pancasila, dalam arti masyarakat di mana terjadi interaksi dan komunikasi sosial dan kultural dalam suasana demokrasi berdasarkan Pancasila. Di tingkat ini kita mencita-citakan Pancasila mewujudkan di dalam *way of life* nasional.

Salah satu masalah yang masih menjadi beban dalam usaha mewujudkan masyarakat Pancasila seperti itu adalah problem kehidupan beragama. Beban ini sekarang sudah menjadi makin ringan, dan insya Allah akan menjadi semakin lapang sehingga agama-agama di dalam masyarakat dan kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila itu tidak terasa sebagai *constraints* melainkan sebagai asset. Kita tidak perlu terperangkap dalam pengalaman pahit dan menyesatkan yang terjadi di berbagai belahan bumi lain, seperti misalnya yang terjadi dalam sejarah politik, masyarakat, negara dan kebudayaan Barat, di mana terjadi polarisasi antara determinisme keagamaan di satu pihak dengan determinisme non-keagamaan di lain pihak. Agama ingin menjadi sumber legitimasi dan kedaulatan secara mutlak. Sebaliknya determinisme non-keagamaan menolak dan karena itu mencari sumber legitimasi lain. Determinisme non-keagamaan itu telah melahirkan sekularisme yang anti-agama bahkan kemudian anti-Tuhan, dan lahirlah konsep-konsep seperti rasionalisme, positivisme, materialisme, determinisme ekonomi, kapitalisme, Marxisme, sosialisme, nasionalisme (di Barat, lain halnya dengan di Indonesia), strukturalisme, anti-determinisme dan lain

sebagainya. Wawasan Pancasila sebagaimana dikembangkan oleh bangsa Indonesia, adalah sebuah alternatif terhadap determinisme keagamaan maupun terhadap sekularisme. Hal ini menjadi amat penting karena di Indonesia terdapat kehidupan beragama yang majemuk. Pluralisme keagamaan tidaklah bertentangan dengan konvergensi di dalam kebudayaan dan wawasan kebangsaan, di dalam cita-cita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu masyarakat berdasarkan Pancasila.

Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebudayaan berdasarkan Pancasila itu di-jauhkanlah segala bentuk diskriminasi, baik atas dasar kedaerahan, kesukuan, keturunan, kedudukan sosial, agama-agama dan sosial ekonomi. Dalam demokrasi sosio-budaya ini terjadilah aktualisasi sila kelima Pancasila secara lebih khusus, dan hal ini amat erat hubungannya dengan sistem ekonomi yang mendukungnya. Demokrasi ekonomi merupakan aktualisasi tata nilai maupun institusi teknikal yang mendukung terwujudnya demokrasi sosial kemasyarakatan dan kebudayaan.

Titik pusat dari pembangunan sosio-budaya tidak lain adalah faktor manusianya. Maka itu amanat Pancasila dalam hal ini berarti usaha membangun manusia Indonesia yang menghayati dan mempunyai kemampuan untuk mengaktualkan Pancasila itu. Dengan perkataan lain, pendidikan merupakan fungsi dan wahana yang amat mendasar artinya dalam pembangunan kehidupan masyarakat dan kebudayaan yang kita cita-citakan itu. Karenanya Pancasila mengamanatkan adanya satu sistem pendidikan nasional, yang alhamdulillah, undang-undangnya baru saja ditetapkan beberapa bulan yang lalu, dalam wujud UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Na-



sional.

Masyarakat bergerak. Kebudayaan berkembang. Zaman berubah. Ini adalah kenyataan sejarah. Demikian pula halnya masyarakat kita. Sementara itu masyarakat dan kebudayaan kita juga bukanlah satu-satunya masyarakat dan kebudayaan yang ada di dunia ini. Kita merupakan bagian dunia dan kita berinteraksi dan berkomunikasi pula dengan bangsa-bangsa dan masyarakat lain di dunia ini. Bahkan kecenderungan dewasa ini adalah bahwa kita makin terlibat secara struktural dengan perkembangan global tersebut. Dalam hal ini kita mengemban dua tugas: tugas kontinuitas (yaitu menjaga kesinambungan sejarah masyarakat, negara, bangsa, kebudayaan) dan tugas konvergensi (yaitu menjaga keterkaitan yang sebaik-baiknya dengan perkembangan global). Pedoman untuk melaksanakan tugas kultural ini adalah apa yang termuat dalam Pasal 32 UUD 1945 serta dengan Penjelasannya.

## Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Walaupun peranan para pemimpin amat penting, namun kehidupan masyarakat tidak dapat semata-mata tergantung kepada peranan para pemuka dan pemimpin secara perorangan. Masyarakat, bangsa dan negara karena itu membentuk institusi, menyelenggarakan sosialisasi nilai, membangun sistem bersama. Dalam perkembangan ini, terutama sekali berkaitan dengan cita-cita dan amanat Pancasila, pembangunan sistem hukum menjadi amat penting. Sistem hukum itulah yang harus menjadi pengayom maupun penjaga dinamikanya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, berdasarkan Pancasila.

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah merubah struktur kolonial menjadi struktur nasional. Masyarakat Indonesia menjadi masyarakat baru.

Ini berarti bahwa masyarakat Indonesia menjadi suatu masyarakat hukum baru (*rechtsgemeenschap*), yaitu masyarakatnya rakyat Indonesia yang sudah menjadi satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Adanya masyarakat hukum baru ini dikukuhkan oleh konstitusi sebagai hukum dasarnya bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan dasarnya, sehingga Pancasila juga adalah sumber dari segala sumber hukum nasional.

Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional haruslah beranjak dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan beranjak pula dari UUD 1945 sebagai hukum dasar nasional kita. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu kita menjabarkan amanat pasal-pasal (yang dapat dipandang sebagai postulat-postulat hukum), ke dalam ketentuan-ketentuan hukum, yang menyangkut pembentukan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, pelayanan hukum maupun pendidikan hukum.

Berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945, sistem hukum nasional yang kita bangun itu bukanlah sistem hukum yang tertutup, karena justru dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai sistem hukum lain yang ada, baik di dalam masyarakat kita sendiri maupun di luar negeri kita.

Pembangunan sistem hukum nasional yang merupakan penjabaran amanat Pancasila karena itu perlu didasarkan atas wawasan kebangsaan, atas cita-cita demokrasi dan juga cita-cita modernisasi. Dengan jalan seperti itu maka akan dapatlah dibangun sistem hukum nasional sebagai realisasi dari kebudayaan Indonesia.



## Membangun Lingkungan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Pembangunan nasional sebagai implementasi Pancasila adalah usaha mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara aktual dan terus-menerus sesuai dengan amanat Pancasila, baik sebagai ideologi, sebagai dasar negara dan sumber hukum maupun sebagai nilai-nilai budaya. Usaha ini berarti berpikir dan bekerja terus-menerus mewujudkan lingkungan kehidupan nasional kita.

Implikasi dari usaha dan tugas itu adalah bahwa bangsa Indonesia memerlukan kemampuan untuk dapat membaca gerak berubahnya perkembangan alam dan zaman secara terus-menerus *in the light of* amanat Pancasila. Diperlukan gerak berubahnya kondisi-kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal, dengan berbagai faktor yang berinteraksi di dalamnya, untuk kemudian melihat berbagai kemungkinan pilihan dan akhirnya untuk membuat suatu pilihan nasional mengenai arah dan haluan nasional yang aktual, baik yang menyangkut sifat, isi, bentuk maupun irama gerak kegiatan tersebut.

Usaha pembangunan berarti usaha mengelola tumbuh dan berkembangnya interaksi dari berbagai kekuatan, baik kekuatan daya alam maupun kekuatan daya kultural, agar selalu dapat memberikan *response* yang sifatnya aktual, relevan, produktif dan efektif.

Membangun lingkungan kehidupan nasional dalam kerangka medan aktualisasi diri bangsa seperti itu tidak lain adalah usaha membangun ketahanan nasional. Batas minimal ketahanan nasional itu adalah kekuatan untuk bertahan. Batas maksimalnya adalah kemungkinan mengembangkan

bukan kekuatan-kekuatan nasional untuk mencapai setinggi-tingginya cita-cita nasional.

Dalam konteks dan perspektif itu maka sebagai bagian dari tugas menunaikan amanat Pancasila, perlulah bangsa Indonesia mempunyai konsep maupun sistem tentang pertahanan keamanan. Sistem pertahanan keamanan ini harus mempunyai wawasan kebangsaan dan wawasan kejuangan bangsa dan merupakan sebuah sistem yang tidak sekedar bersifat defensif, akan tetapi juga bersifat antisipatif.

Walaupun lingkungan hidup nasional itu dibentuk oleh interaksinya kekuatan daya alam dan daya kultural, namun sistem pertahanan keamanan nasional pada hakikatnya adalah sistem yang tumpuannya adalah pada seluruh rakyat sebagai kekuatan nasional potensial. Berarti pada potensi kulturalnya.

Karenanya amanat mengenai bela negara, menunjuk kepada hak dan tanggung jawab seluruh rakyat, walaupun dalam sistem aktualisasinya bangsa Indonesia mempunyai ABRI sebagai pengemban inti fungsional dari tugas pertahanan dan keamanan nasional ini.

Karena itu pula maka fungsi mengemban amanat mengenai pertahanan dan keamanan tersebut tidak terbatas kepada fungsi tempur semata melainkan juga fungsi sosial politik. Dengan perkataan lain, pertahanan dan keamanan adalah fungsi dalam pembangunan nasional sebagai pilihan politik nasional dan sebagai aktualisasi ideologi, yang tidak lain adalah implementasi amanat Pancasila.

Dalam kerangka pikir ini maka segala kekuatan nasional perlu mempunyai satu konvergensi, yaitu berpangkal atas dan berlandasan pada Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara dan sebagai nilai kultu-



ral. Dengan kekuatan-kekuatan nasional seperti itulah dapat diwujudkan, dijaga serta dikembangkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebagai suatu lingkungan hidup, kehidupan dan penghidupan nasional, baik secara internal maupun dalam interaksi secara eksternal.

## Penutup

Ditinjau dari sejarah perjalanan perjuangan bangsa, periode sekarang ini merupakan periode yang amat penting, namun juga amat kritis. Kita berada dalam suatu masa transisi, dari akhir abad XX memasuki abad XXI. Kita berada dalam masa transisi dari Pembangunan Nasional Jangka Panjang I untuk memasuki Pembangunan Nasional Jangka Panjang II; dan periode ini kebetulan jatuh bersamaan dengan saat terjadinya alih generasi.

Problem transisi adalah problem perubahan. Dalam situasi seperti itu lazim terdapat dua kecenderungan: yang pertama berpegang pada pola lama; yang kedua ingin mengubah, membuang pola lama. Kedua sikap seperti itu dengan mudah dapat terpelempang ke dalam *irrealisme*. Realisme sejarah dan kehidupan masyarakat serta kebudayaan mengajarkan bahwa perubahan adalah jalinan antara masa kini dan masa mendatang, dan manusia mengemban tugas untuk dapat membangun jembatan kontinuitas. Dalam segi pemikiran atau konsep perjuangan periode seperti itu juga membawa permasalahan antara ortodoksi dan aktualisasi, dan tugas manusia adalah membangun jembatan yang secara kreatif menjalin antara ortodoksi dengan aktualisasi.

Secara politis ideologis, periode transisi sebagai periode perubahan tidak jarang

menjadi saat di mana berbagai kekuatan politik dengan berbagai aspirasinya melihat momentum untuk bergerak. Maka periode seperti itu tidak jarang menjadi periode yang fluktuatif dan kompleks sifatnya. Kekuatan-kekuatan politik tersebut dapat bergerak secara *open* maupun *covered*, secara *direk* maupun *indirek*. Maka periode seperti ini, ditinjau dari amanat ideologi nasional, memerlukan kewaspadaan bersama yang lebih tinggi. Kemungkinan seperti itu dapat terjadi, karena di samping "watak dasar manusia yang dapat cenderung menjadi potensi konstruktif dan destruktif," proses pembangunan nasional telah menghasilkan perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan dan memacu aspirasi. Juga dunia internasional sedang berada dalam pergeseran-pergeseran kekuatan yang tidak mustahil akan berdampak terhadap situasi nasional.

Tidak jarang dalam suasana seperti itu terjadi berbagai desakan untuk menggoyahkan sendi-sendi lama yang sudah berjalan. Tidakkah mengherankan apabila pada saat seperti sekarang ini terdapat arus yang menampilkan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai konsensus-konsensus dasar nasional, mengenai Pancasila, Demokrasi Pancasila, UUD 1945, dwifungsi ABRI, organisasi politik, floating mass, peranan pemerintah, peranan masyarakat, kebebasan pers, dan sebagainya. Bahkan ada yang menampilkan ajakan untuk mencari ideologi alternatif. Ada arus yang aspirasinya adalah pembaruan dalam tingkat instrumental, ada arus yang aspirasinya adalah pembaruan dalam tingkat yang fundamental.

Masalah lain yang menjadi bagian dari perkembangan khusus ini adalah masalah suksesi dan posisi kepresidenan, satu dan lain hal karena dalam sistem kenegaraan kita kedudukan presiden memang amat penting.



Tidak perlu diherankan apabila situasi transisi ini membangkitkan berbagai aspirasi baik individu maupun kolektif untuk mencapai posisi kepresidenan tersebut. Demokrasi Pancasila dan masalah suksesi itu kebetulan merupakan dua hal yang akhir-akhir ini dibicarakan dan dijelaskan oleh presiden.

Ditinjau dari segi sistem sebetulnya perangkat untuk membuat masa ini menjadi masa yang tidak bergejolak sudah tersedia. Ada UUD 1945, ada Ketetapan-ketetapan MPR, ada undang-undang, ada tradisi.

Dalam situasi seperti itu bangsa kita dihadapkan kepada suatu ujian berat, namun bila ujian itu dapat diatasi, bangsa ini akan menjadi makin kuat dan dewasa sebagai bangsa yang bersatu, merdeka, berdaulat dan maju. Dengan perkataan lain kita diuji sejauh mana kita sebagai bangsa dapat mengimplementasikan Pancasila dalam masa seperti itu.

Ditinjau dari amanat Pancasila, maka segala sikap yang ada harus selalu kita kaji: sejauh mana tidak bertentangan dengan Pancasila, sejauh mana tidak bertentangan dengan UUD 1945, sejauh mana tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Apabila salah satu amanat Pancasila adalah persatuan dan kesatuan, maka kiranya kita perlu sekali mengusahakan agar

periode transisi termasuk apa yang dinamakan suksesi itu merupakan proses transisi *with stability* dan bukannya transisi *with instability*, atau sekurang-kurangnya suatu transisi *with a minimum of instability*. Maka tugas yang diamanatkan oleh Pancasila itu adalah bagaimanakah dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya proses transisi dalam suasana stabilitas. Dengan perkataan lain, kita menghendaki transisi yang berkebudayaan.

Implementasi Pancasila dalam tiga sifat dasar membawa kita kepada tugas untuk mengembangkan secara konsepsional dan aktual Pancasila sebagai konsep negara, konsep masyarakat, konsep kebangsaan, konsep hukum, konsep politik, konsep ekonomi, konsep budaya, konsep demokrasi. Tugas tersebut harus dilaksanakan secara kreatif, kritis, berpijak kepada realisme dan berwawasan ke depan. Pancasila terjadi karena ada masalah-masalah dasar yang harus dipecahkan. Adanya Pancasila sekarang ini pun adalah untuk menjawab masalah-masalah dasar yang ada, baik saat ini maupun di masa yang akan datang nanti. Dengan terus-menerus berinteraksi secara kritis dan kreatif dengan berubah-bergeraknya lingkungan alam dan zaman, kita akan menjadi semakin dewasa dalam memiliki, menghayati dan mengamalkan Pancasila.



# Dinamika Pembangunan Politik Indonesia dan Integrasi Nasional\*

Sayidiman SURYOHADIPROJO

## Pendahuluan

**M**ESKIPUN pembangunan nasional di Indonesia dititikberatkan pada pembangunan ekonomi, namun adalah penting untuk tidak mengabaikan pembangunan politik. Sebab pembangunan ekonomi secara hakikat amat tergantung pada faktor manusia yang menjalankannya, dan tidak semata-mata pada teori ekonomi yang dipergunakan untuk menyukseskan pembangunan itu atau pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tentu teori ekonomi yang menjadi landasan penentuan strategi ekonomi yang ditempuh untuk menyukseskan pembangunan tidak dapat diabaikan, demikian pula politik ekonomi yang diletakkan oleh pemerintah berupa berbagai peraturan dan ketentuan. Namun itu semua tidak akan dapat menghasilkan kesejahteraan yang kita ingin-

kan, kalau rakyat Indonesia sendiri tidak berada dalam kondisi fisik dan mental yang dengan penuh komitmen dan kesungguhan mengejar tujuan pembangunan. (Lihat harian *Kompas* tanggal 26 Mei 1989: Sayidiman Suryohadiprojo, "Mengapa Demokrasi Pancasila Diperlukan".)

Oleh sebab itu, meskipun tidak menjadi titik berat, pembangunan politik perlu kita lakukan di Indonesia. Sekurang-kurangnya harus ada pembangunan politik sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perkembangan politik dalam masyarakat yang dapat merugikan jalannya pembangunan. Sebab manusia tidak dapat dilepaskan dari politik, sebagaimana juga tidak dapat dilepaskan dari ekonomi. Makin manusia mengalami pendidikan, maka makin ia dapat menggunakan pikirannya. Dan makin ia menggunakan pikirannya makin ia mengembangkan aspirasinya atau kehendaknya. Dan karena itu, semakin manusia mengalami pendidikan makin ia tidak dapat dilepaskan dari politik. Itu tidak berarti bahwa ia kemudian menjadi politikus yang menja-

---

\*Berasal dari Prasaran pada Temu Ilmiah PP-PMKRI, Jakarta, 10 Juni 1989, dengan beberapa tambahan dari penulisnya.



lankan politik sebagai profesinya atau terjun dalam politik praktis. Tetapi sekurang-kurangnya ia mengikuti perkembangan politik dalam masyarakatnya.

Kalau perkembangan itu sesuai dengan keinginannya, maka ia merasakan kepuasan. Akan tetapi kalau perkembangan itu tidak sesuai dengan keinginannya, apalagi kalau ia rasakan bahwa perkembangan itu menimbulkan ancaman kepada hari depannya, maka ia diliputi oleh ketidakpuasan dan kekhawatiran. Apabila mayoritas rakyat berada dalam kondisi kurang puas dan khawatir tentang masa depannya, maka itu tidak mendukung pembangunan ekonomi. Sebab rakyat yang demikian akan kurang mampu mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk bekerja dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan. Lebih parah lagi kalau tidak dirasakan adanya perubahan yang dapat menghilangkan atau mengurangi ketidakpuasan itu. Kondisi mental seperti itu dapat mengakibatkan gejolak yang berupa kecauan dalam masyarakat. Sudah jelas bahwa hal demikian lebih-lebih merugikan pembangunan ekonomi.

Karena itu pembangunan politik perlu diadakan, sekali pun bukan menjadi titik berat atau tidak mempunyai prioritas setinggi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, malahan kita perlu melakukan pembangunan politik yang justru mendukung pembangunan ekonomi. Itu dapat terlaksana, apabila pembangunan politik menimbulkan kepuasan dan kegairahan pada mayoritas rakyat sehingga mereka bersemangat tinggi. Itu dapat terjadi kalau oleh rakyat dirasakan bahwa perkembangan dalam masyarakat sesuai dengan aspirasinya dan keinginannya.

Integrasi Nasional adalah hal yang selalu penting untuk Indonesia. Adalah satu kenyataan bahwa secara geografis Indonesia

terdiri atas beribu-ribu pulau yang meliputi wilayah yang luas sekali. Akibat dari kondisi geografis itu maka rakyat Indonesia juga mempunyai adat istiadat yang beranekaragam, meskipun ada unsur persamaannya. Itu mengakibatkan adanya pikiran dan perasaan yang tidak sama bagi rakyat Indonesia, meskipun ada kesamaannya pula. Ini semua kita sadari sejak lama dan karena itu kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau terjadi pembangunan politik yang kurang tepat, maka ada kemungkinan bahwa tidak dapat dijaga harmoni atau keselarasan antara kebhinnekaan rakyat kita. Akibatnya adalah bahwa tidak tercipta ketunggal-ikaan yang kita perlukan. Di pihak lain dapat pula terjadi bahwa terlalu diutamakan ketunggalikaan, dan kebhinnekaan diabaikan. Ini pun akan merugikan, oleh karena kemudian kurang dapat diharapkan keikutsertaan seluruh rakyat. Maka yang dimaksudkan dengan integrasi nasional adalah satu usaha untuk mewujudkan harmoni atau keselarasan yang baik antara kebhinnekaan dan ketunggal-ikaan bangsa Indonesia.

Pembangunan politik yang demikian itu dapat mengharapkan terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dengan partisipasi maksimal dari seluruh bagian wilayah dan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan tujuan itu maka tulisan ini akan berusaha untuk mengemukakan hal-hal yang bersangkutan dengan pembangunan politik yang menghasilkan integrasi nasional itu.

## **Orientasi Pembangunan Politik Indonesia**

Ketika Orde Baru pada tahun 1966 dimulai, maka segenap pendukungnya bertekad



untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sikap demikian merupakan reaksi terhadap keadaan sebelumnya. Pada tahun 1950 hingga tahun 1959 telah berlaku sistem politik berdasarkan demokrasi parlementer yang liberal. Dalam kurun waktu itu pemerintahan Indonesia tidak pernah stabil oleh karena kabinet pemerintahan seringkali berganti sebagai akibat dari kegiatan parlemen. Sudah jelas bahwa sistem politik itu tidak sesuai dengan UUD 1945 dan demokrasi Pancasila.

Pada tahun 1959 dengan Dekrit Presiden Indonesia kembali kepada UUD 1945. Akan tetapi kemudian sistem politik yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin yang juga jauh sekali dari Ketentuan UUD 1945. Sebab hakikatnya demokrasi terpimpin adalah satu sistem politik yang menggunakan nama demokrasi, namun dalam kenyataan kehendak rakyat banyak samasekali tidak dipertimbangkan atau diperhatikan. Sebab Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia berpendapat bahwa beliau adalah penyambung lidah rakyat. Jadi apa yang menjadi pikiran dan kehendak beliau adalah pikiran dan kehendak rakyat, sehingga dianggap tak perlu lagi mempertimbangkan dan memperhatikan pikiran dan kehendak rakyat yang sebenarnya. Hal demikian tentu saja bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, apalagi setelah Bung Karno mengumandangkan NASAKOM yang merupakan tidak saja pemberian tempat utama bagi pihak komunis dalam kehidupan politik Indonesia di samping kaum nasionalis dan kaum agama, melainkan malahan memegang posisi yang dominan dalam kehidupan politik Indonesia. Ini semua bermuara ke dalam pemberontakan Gestapu/PKI sebagai langkah pihak komunis untuk sepenuhnya menguasai pemerintahan di Indonesia. Namun Pancasila dengan pendukungnya masih

cukup kuat untuk mengatasi gerak PKI itu dan bahkan dapat menghancurkannya.

Maka Orde Baru yang lahir setelah penghancuran pemberontakan Gestapu/PKI adalah satu tatanan yang bertujuan mengembalikan Indonesia kepada UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Langkah demi langkah sisa-sisa Orde Lama dihapuskan untuk digantikan dengan tuntutan UUD 1945. Kalau tadinya terdapat jumlah partai politik yang banyak sehingga merupakan hambatan bagi kemantapan dunia politik, maka jumlah itu mula-mula diturunkan menjadi sembilan partai politik dan kemudian menjadi dua partai politik dan satu golongan karya, atau total tiga organisasi politik saja. Maksudnya adalah agar berbagai aspirasi politik rakyat dapat ditampung oleh tiga orpol itu sehingga dapat diwujudkan kehidupan politik yang lebih mantap.

Selain itu berbagai kelembagaan yang ditentukan oleh UUD 1945 diadakan dan diberi fungsi sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945. Kalau sebelum Orde Baru hanya sekali diadakan Pemilihan Umum di Indonesia, yaitu pada tahun 1955, maka setelah Orde Baru sejak tahun 1971 telah diadakan Pemilihan Umum secara teratur, yaitu setiap lima tahun. Kalau sebelum Orde Baru yang ada hanyalah MPR Sementara yang anggotanya semua ditetapkan, maka sejak Orde Baru setiap lima tahun setelah pemilihan umum terbentuk MPR. Dan MPR itu menjalankan fungsinya yang sebelum itu belum pernah dilakukan, yaitu menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, mendengarkan dan mengambil sikap terhadap laporan Presiden periode sebelumnya, dan membuat berbagai ketetapan yang perlu dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Demikian pula DPR yang betul-betul diben-



tuk dan tidak lagi berupa DPR Gotong Royong yang anggotanya ditetapkan. Di samping itu juga ditetapkan lembaga tinggi negara yang lain sesuai dengan Ketentuan UUD 1945. Demikian pula pada tingkat daerah tingkat satu dan tingkat dua dibentuk DPRD sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden yang dipilih oleh MPR setiap lima tahun menetapkan menteri-menteri sebagai pembantu Presiden; menteri-menteri itu ada yang membawahi departemen dan ada pula yang tidak. Sebagai pembantu Presiden mereka bertanggungjawab kepada Presiden dan tidak kepada DPR, sesuai dengan Ketentuan UUD 1945. Pada Tingkat Daerah ditetapkan Gubernur/Kepala Daerah oleh Presiden dengan mempertimbangkan calon-calon yang dipilih oleh DPRD yang bersangkutan. Demikian pula Bupati/Kepala Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan mempertimbangkan calon-calon yang diajukan oleh Gubernur dan DPRD yang bersangkutan. Boleh dikatakan bahwa sejak Orde Baru ada usaha yang jelas dan konsisten untuk memenuhi tuntutan UUD 1945 dan Pancasila.

Untuk lebih memantapkan kehidupan politik dan demokrasi Pancasila kemudian diusahakan agar Pancasila diterima dan diakui sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Dengan begitu tidak lagi ada ideologi lain di Indonesia selain Pancasila. Dalam kehidupan politik itu berarti bahwa ketiga orpol sama-sama berpedoman kepada Pancasila sebagai ideologi. Yang membedakan mereka satu sama lain adalah program mereka dalam mewujudkan tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

Dengan pembangunan politik demikian telah terbentuk satu kehidupan politik yang stabil di Indonesia. Ini jauh berbeda dengan kehidupan politik sebelumnya, ketika dalam periode demokrasi liberal kehidupan politik senantiasa dalam kekacauan sebagai akibat pertarungan partai politik yang besar jumlahnya atau ketika dalam periode demokrasi dipimpin kehidupan politik diliputi suasana gejolak akibat usaha PKI untuk menciptakan kondisi revolusioner. Kehidupan politik yang stabil itu perlu ada untuk memungkinkan pembangunan nasional yang perlu diselenggarakan bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan bangsa yang telah diabaikan dalam masa demokrasi liberal dan demokrasi dipimpin.

Akan tetapi kendati segala kebaikan dan kemajuan yang telah diciptakan Orde Baru namun seperti setiap hal tidak ada yang sempurna, maka juga dalam hal pembangunan politik itu terdapat kekurangan dan kelemahan.

### **Dinamika dan Implikasi Pembangunan di Indonesia**

Dilihat dari keperluan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, hal mana penting sekali untuk dapat memanfaatkan segenap potensi yang terkandung dalam bumi dan penduduk Indonesia, maka sebenarnya perlu ada politik dalam negeri yang menjamin terwujudnya harmoni atau keselarasan antara Pusat dan Daerah. Namun dalam kenyataan Indonesia sejak dahulu kala selalu berada dalam satu sistem politik yang berorientasi kepada sentralisasi.

Ketika masih dalam penjajahan Belanda pihak penjajah yang hanya memerintah dengan jumlah orang Belanda yang sedikit memang harus melakukan sentralisme untuk



menjamin kekuasaan mereka. Ketika kita mempersiapkan kemerdekaan para Pendiri Republik menyadari bahwa perlu ada keselarasan antara Pusat dan Daerah. Namun kemudian kenyataan politik memaksa para pemimpin Republik untuk menjalankan sentralisme. Itu pertama disebabkan pihak Belanda yang mau kembali menjajah Indonesia datang dengan konsep negara federal dengan dibentuknya negara-negara di setiap daerah Indonesia.

Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai negara kesatuan, di mana dalam konsep negara kesatuan itu hendak diwujudkan harmoni antara Daerah dan Pusat. Namun karena Belanda datang dengan konsep negara federal, maka Republik harus menghadapinya dengan politik sentralisme. Ketika pada tahun 1950 kedaulatan atas wilayah Indonesia sepenuhnya berada di tangan Republik Indonesia (setelah selama sekitar 6 bulan mengalami Republik Indonesia Serikat), maka terjadi masalah-masalah keamanan dalam negeri sebagai epilog masa penjajahan. Sebab itu pemerintah Republik Indonesia tetap menjalankan politik yang sentralistis. Selain itu mungkin juga ada pengaruh dari pemerintahan yang dijalankan oleh Belanda di masa penjajahan terhadap aparat pemerintahan kita.

Ketika kita kembali kepada UUD 1945 pada tahun 1959 dengan demokrasi terpimpin, maka sentralisme itu justru menjadi lebih kuat lagi. Bahkan sentralisme itu berpusat pada satu orang, yaitu Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Pada waktu Orde Baru dimulai dalam Seminar TNI-AD Kedua pada tahun 1966 telah dicetuskan beberapa pendapat yang berhubungan dengan politik, yaitu perlunya sistem pemilihan distrik dan adanya desentralisasi pemerintahan. Akan tetapi dalam kenyataan dua hal itu belum mendapat perwujudan.

Tentang sistem pemilihan akan dibicarakan tersendiri nanti, sedangkan mengenai desentralisasi terdapat beberapa faktor obyektif yang menghalangi. Pertama adalah keharusan kita mengadakan pembersihan terhadap seluruh sisa-sisa Gestapu/PKI. Karena dalam masa jayanya PKI telah berhasil menyusup di mana-mana di seluruh Indonesia, maka untuk pembersihan itu diperlukan pengelolaan yang sentral. Antara lain dalam bentuk KOPKAMTIB, tetapi juga dalam pemerintahan dalam negeri. Kedua adalah penerimaan negara yang meningkat mendadak sebagai akibat kenaikan harga minyak yang hebat, sehingga Pemerintah Pusat menguasai sumber daya keuangan yang banyak. Oleh sebab kita menjalankan pembangunan nasional yang bertitik berat ekonomi, maka kemudian Pemerintah Pusat menjadi sumber keuangan utama bagi pembangunan. Hal demikian makin memperkuat sentralisme dan berakibat bahwa daerah amat besar ketergantungannya pada Pusat.

Itu semua merupakan sebab mengapa Indonesia belum pernah menjalankan politik yang merupakan harmoni antara Pusat dan Daerah. Namun hal demikian, apabila berlanjut terus, akan amat merugikan Indonesia. Pertama karena Pemerintah Pusat tidak lagi dalam posisi yang sama dalam penguasaan keuangan. Penerimaan dari migas sudah amat jauh berkurang, karena harga migas kembali turun dengan amat drastis. Selain itu harus dilakukan pembayaran kembali utang luar negeri yang angsurannya setiap tahun, termasuk pembayaran bunga, tidak kurang dari 12 trilyun rupiah. Jadi tak mungkin lagi diharapkan Pemerintah Pusat sebagai sumber utama pembangunan. Kedua karena bangsa-bangsa di sekeliling Indonesia menjadi makin maju kemampuannya. Kalau kita sendiri kurang mampu memanfaatkan potensi alam yang ada di



daerah-daerah, maka pasti bangsa-bangsa itu yang akan memanfaatkannya. Itu berarti bahwa justru kita yang dirugikan.

Itu berarti bahwa harus ada pemanfaatan lebih besar dari daerah-daerah untuk pembangunan nasional kita. Sebab itu perlu ada pembangunan daerah yang lebih terarah dan itu memerlukan politik yang lebih sesuai dengan itu. Hal demikian tak mungkin tercapai melalui politik yang sentralistis.

Hal lain dalam pembangunan politik yang akan berpengaruh besar kepada masa depan adalah yang bersangkutan dengan peranan dan penyusunan lembaga legislatif. Karena hendak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, maka kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh memahami isi UUD 1945 dan kemudian melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Pasal 1 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jelas sekali selama Orde Lama, Ketentuan Pokok dari UUD 1945 tidak dilaksanakan, karena belum pernah ada pembentukan MPR sebagai hasil pemilihan umum. Yang ada hanyalah MPR Sementara yang anggotanya semuanya tidak merupakan hasil pemilihan oleh rakyat. Karena itu ketika Orde Baru mulai membenahi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, disadari bahwa yang harus segera diusahakan adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk dapat membentuk MPR, DPR dan DPRD.

Dalam Seminar TNI-AD Kedua pada tahun 1966 dikemukakan bahwa sebaiknya diadakan pemilihan umum dengan menggunakan sistem distrik. Artinya, rakyat langsung memilih orang-orang yang dipercayainya untuk duduk menjadi wakilnya dalam

MPR dan lembaga legislatif lainnya. Akan tetapi kemudian dipertimbangkan oleh para tokoh pimpinan, bahwa akan kurang menguntungkan perkembangan politik Indonesia apabila waktu itu digunakan sistem distrik yang bersifat langsung itu. Sebab dinilai bahwa pada waktu itu pengaruh PKI belum sepenuhnya hilang dari masyarakat. Selain itu perasaan primordial dalam masyarakat masih amat kuat. Maka kalau rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya dianggap bahwa kurang memberikan hasil yang sebenarnya untuk kepentingan rakyat sendiri. Ada kemungkinan besar bahwa wakil-wakil dipilih atas dasar emosi belaka yang waktu itu masih amat kuat dalam sikap rakyat umumnya. Maka diputuskan untuk tidak memenuhi kehendak Seminar TNI-AD Kedua dan akan digunakan sistem proporsional. Dalam sistem proporsional rakyat tidak memilih secara langsung wakil-wakilnya, melainkan menentukan organisasi politik mana yang disukainya untuk mewakili kepentingannya. Kemudian orpol itulah yang menetapkan siapa yang akan duduk dalam MPR dan lembaga legislatif atas nama orpol itu.

Kemudian juga timbul persoalan mengenai anggota ABRI, yaitu apakah anggota ABRI turut memilih dan dipilih atau tidak. Tampaknya partai-partai politik kurang setuju kalau anggota ABRI turut memilih, sebab mereka mengkhawatirkan pengaruh ABRI di daerah setelah Gestapu/PKI kuat sekali sehingga mudah sekali mempengaruhi para pemilih yang lain. Maka dicapai konsensus secara nasional bahwa anggota ABRI tidak turut memilih. Akan tetapi sebagai kompensasi karena tidak memilih dan dipilih, anggota ABRI akan diberikan kursi di MPR dan lembaga legislatif lain melalui pengangkatan. Juga akan ada pengangkatan dari wakil-wakil golongan untuk duduk



dalam MPR, demikian pula wakil-wakil daerah. Ini merupakan kelanjutan dari praktek yang telah dilakukan dalam masa Orde Lama.

Pada waktu permulaan Orde Baru pengaturan seperti ini cukup menimbulkan kepuasan dalam masyarakat. Sebab itu sudah merupakan satu kemajuan yang besar dibandingkan dengan apa yang terjadi selama Orde Lama. Tidak lagi hanya ada MPR Sementara dan DPR Gotong Royong yang tidak saja anggotanya tidak ada yang dipilih rakyat, melainkan di samping itu MPRS ditempatkan di bawah Pemimpin Besar Revolusi. Dengan perkataan lain: samasekali tidak ada kedaulatan di tangan rakyat. Sebaliknya dalam Orde Baru mulai ada MPR dan DPR serta DPRD yang sebagian anggotanya adalah hasil pemilihan rakyat, meskipun tidak secara langsung. Jadi secara obyektif satu kemajuan yang berarti.

Kalau dalam Pemilihan Umum Pertama yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde Baru masih ada sembilan kontestan, maka itu kemudian dinilai terlalu banyak dan kurang menguntungkan perkembangan dan kemantapan politik di Indonesia. Maka kemudian berhasil diadakan pengurangan jumlah partai politik, sehingga ketika menghadapi Pemilu Ketiga di Indonesia hanya ada dua partai politik dan Golkar, atau tiga kontestan Pemilu saja. Perkembangan itu pun disambut positif oleh masyarakat pada umumnya, meskipun partai-partai yang dihapuskan atau harus melakukan penggabungan menunjukkan sikap kurang puas. Akan tetapi masyarakat yang pandangannya mengarah kepada pembangunan serta tidak lupa bagaimana peranan partai-partai politik dalam periode liberal dan dalam masa Orde Lama, samasekali tidak memberikan simpati kepada sikap partai politik yang

kurang menyukai pengurangan jumlah partai.

Dalam pembangunan nasional tercipta kemajuan-kemajuan yang berarti. Kehidupan rakyat pada umumnya makin baik dibandingkan dengan masa Orde Lama. Lambat laun hilang dari pandangan mata, rakyat yang tidak berbaju, yang harus bersusah payah untuk memperoleh beras atau makanan lainnya; jalan-jalan yang tadinya sukar ditempuh kendaraan karena berlobang-lobang menjadi makin mulus. Hubungan antara kota dan daerah makin lancar. Pendeknya, tercipta kehidupan yang jauh lebih baik bagi rakyat. Akan tetapi kemajuan itu sendiri kemudian juga menimbulkan kekurangpuasan, karena dirasakan bahwa dalam kemajuan itu ada golongan yang majunya jauh lebih cepat dari golongan lain. Dan yang majunya jauh lebih cepat itu jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang majunya lambat. Karena rakyat sudah mulai terbiasa dengan kehidupan yang maju, maka timbul kekurangpuasan mengapa hal yang kurang baik itu tidak dapat dihentikan. Mereka berpikir, bukankah Pancasila dan UUD 1945 menghendaki kesejahteraan untuk bagian terbesar rakyat secara merata?

Selain itu kemajuan ekonomi juga membawa ketidakpatutan yang lain, yaitu makin meluasnya dan membesarnya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Bukannya dalam Orde Lama tidak ada korupsi, sebab dulu pun ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menjengkelkan banyak orang. Akan tetapi dalam Orde Baru jumlah orang yang terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan wewenang jauh lebih besar. Dan karena penggunaan uang dalam pembangunan ekonomi jauh lebih banyak daripada di masa Orde Lama, maka korupsi kemudian juga menyangkut jumlah jauh lebih be-



sar daripada di Orde Lama. Ini pada umumnya menyangkut orang yang bekerja di aparat pemerintah yang memperoleh kerjasama dengan swasta yang berkepentingan dengan terjadinya korupsi itu. Bagi mereka yang tetap berpendapat bahwa korupsi dan penyalahgunaan wewenang merusak kehidupan negara dan bangsa tentu timbul pikiran mengapa hal demikian tidak dapat dihindarkan. Maka timbul pula ketidakpuasan dalam masyarakat karena itu.

Dalam hal ini harapan masyarakat adalah terhadap lembaga-lembaga legislatif yang dianggap harus dapat melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah serta aparatnya. Namun dalam kenyataan MPR hanya bersidang sekali dalam lima tahun. Dan dalam sidang itu MPR hanya melibatkan diri dengan mendengarkan pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, menyusun GBHN untuk lima tahun berikutnya, membuat ketetapan-ketetapan yang pokok untuk kehidupan bernegara, termasuk pula ketetapan yang menerima pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, dan kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa lima tahun berikutnya. Sidang untuk melakukan hal-hal ini sudah makan waktu cukup lama, meskipun biasanya diadakan pembatasan waktu dalam sidang-sidang komisi. Karena ada pembatasan keuangan, maka Sidang MPR tidak dapat dibuat lebih lama lagi untuk membicarakan hal-hal lain. Juga tidak pernah diadakan sidang kedua atau ketiga selama lima tahun itu. Sebab sidang kedua dianggap hanya diperlukan apabila mengadakan sidang khusus, yaitu kalau DPR minta diadakan sidang khusus karena menilai pelaksanaan pekerjaan Mandataris terlalu berbeda atau bertentangan dengan GBHN dan Ketetapan-ketetapan MPR.

Dengan begitu sebenarnya kedaulatan rakyat yang menyangkut kontrol sosial yang

seharusnya dilakukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara didelegasikan kepada DPR. Akan tetapi oleh masyarakat dirasakan bahwa DPR kurang bergiat untuk menyampaikan kehendak dan keinginan masyarakat kepada pemerintah sebagai eksekutif. Oleh sebab itu timbul ketidakpuasan yang makin meningkat dalam masyarakat. Hal demikian dapat merugikan perkembangan negara dan bangsa untuk selanjutnya. Sebab kalau ketidakpuasan dalam masyarakat tumbuh terus dapat saja terjadi gejolak-gejolak yang dapat berakibat luas terhadap pembangunan nasional yang sedang kita lakukan. Padahal kalau pembangunan nasional kurang dapat berjalan baik kita akan menghadapi kelemahan yang gawat terhadap lingkungan kita yang menjadi makin maju dan dinamis sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi pada bangsa-bangsa di wilayah Asia-Pasifik.

Sebetulnya Orde Baru telah mengadakan banyak perubahan bila dibandingkan dengan Orde Lama, termasuk dalam pembangunan kelembagaan. Yaitu, ditegakkannya lembaga legislatif di Pusat dan Daerah; demikian pula lembaga-lembaga hukum dan segala sesuatu yang ditetapkan oleh UUD 1945. Akan tetapi masyarakat yang semula cukup puas ketika membandingkan usaha Orde Baru itu dengan apa yang dilakukan di masa Orde Lama, kemudian menjadi kurang puas karena lembaga-lembaga itu kurang berjalan sebagaimana diharapkannya. Memang harus diakui bahwa hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, juga perkembangan masyarakat belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945. Sebenarnya apa yang menjadi sebab sehingga lembaga-lembaga itu belum berfungsi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat?

Di sini akan dibatasi uraian untuk menjawab pertanyaan itu pada lembaga-lembaga



politik saja, oleh karena tulisan ini menyangkut persoalan politik. Pertanyaannya adalah: mengapa lembaga legislatif tidak dapat melakukan kontrol sosial yang efektif sehingga pemerintah diarahkan untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya?

Pertama, itu dipengaruhi oleh posisi DPR terhadap eksekutif sebagaimana ditetapkan oleh UUD 1945. Dalam Penjelasan UUD 1945 dicantumkan bahwa Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, ia hanya bertanggungjawab kepada MPR. Karena Menteri Negara adalah pembantu Presiden, maka mereka pun tidak bertanggungjawab kepada DPR. Hanya dikatakan bahwa Presiden (dan para Menteri) harus bekerjasama dengan DPR dan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR. Itu berarti bahwa dilihat dari sudut yuridis formal dan konstitusional DPR tidak dapat menentukan apa pun kepada eksekutif, kecuali kalau eksekutif bersedia untuk melakukannya. Biasanya dalam pergaulan manusia pihak satu memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara pihak lain, apabila pihak satu menghargai atau memandang tinggi pihak kedua itu. Karena dalam konstelasi politik Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, posisi pemerintah Pusat amat kuat, terlebih-lebih dalam Orde Baru, maka secara nyata pihak eksekutif kurang menghargai suara pihak legislatif. Sebagai hal yang umum berlaku di negara mana saja bahwa pihak eksekutif ingin jalan dengan hambatan atau rintangan sesedikit mungkin, termasuk hambatan dari legislatif. Di Indonesia itu diperkuat oleh bunyi Penjelasan UUD 1945. Andaikata para anggota DPR mempunyai citra atau wibawa yang kuat dalam masyarakat, mungkin pihak eksekutif masih terdorong untuk memperhatikan pendapat DPR, meskipun secara konstitusional tidak ada keharusan untuk itu. Sebab mereka berkepentingan agar pekerjaan mereka

dapat berjalan mulus. Kalau eksekutif tidak menghiraukan pendapat DPR, padahal para anggota DPR mempunyai wibawa dan pengaruh politik yang kuat dalam masyarakat, tidak mustahil masyarakat akan merintangi pekerjaan para menteri sehingga kurang berhasil. Oleh sebab itu dalam hal demikian eksekutif mendapat dorongan politik untuk selalu mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara dan pendapat anggota DPR.

Tetapi anggota DPR bukanlah orang-orang dengan wibawa dan pengaruh yang terlalu kuat dalam masyarakat. Sebab dengan sistem proporsional yang kita terapkan sejak Pemilu Kedua, para anggota DPR itu bukan dipilih langsung oleh rakyat melainkan mereka sebagian diangkat oleh orpol (Golkar, PDI dan PPP) dan sebagian lagi diangkat oleh pemerintah. Selain itu semua orpol dalam kenyataan amat dikuasai oleh pemerintah dan tidak mempunyai kemandirian yang menjadi syarat adanya kewibawaan dan citra politik yang berpengaruh. Maka dalam kenyataan boleh dikatakan bahwa ketergantungan legislatif terhadap eksekutif besar sekali. Malahan keanggotaan dari orpol untuk masuk DPR harus ada persetujuan Presiden. Bagaimana dapat diharapkan eksekutif memandang tinggi terhadap wibawa dan pengaruh politik para anggota DPR, kalau ketergantungan anggota DPR begitu tinggi terhadap pemerintah?

Ditambah lagi bahwa ada semacam keengganan pada anggota DPR untuk mengkritik eksekutif oleh karena ada kekhawatiran di-*recall* oleh pimpinan orpolnya. Sebab orpol yang secara moril maupun materiil begitu tergantung pada pemerintah tidak mau mengambil risiko dijauhi oleh pemerintah karena sikap para anggota DPR-nya. Dan anggota DPR masih banyak yang kehidup-



annya amat tergantung pada penghasilan yang diterima sebagai anggota DPR itu dan tidak mau kehilangan penghasilan itu.

Faktor lain adalah bahwa legislatif selalu ketinggalan dalam pengumpulan informasi dibandingkan dengan eksekutif. Menteri sebagai eksekutif mempunyai aparat seluruh departemennya untuk mengolah sesuatu, sedangkan anggota DPR samasekali tidak mempunyai staf. Jadi meskipun sesuai UUD 1945 DPR dapat pula mengajukan rancangan undang-undang baru, namun dalam kenyataan itu sukar terjadi. Dan yang selalu mempunyai prakarsa dalam perundang-undangan adalah pihak eksekutif.

Walaupun para anggota DPR terdiri dari orang yang kuat wibawa dan pengaruh politiknya, mereka akan tetap dalam posisi defensif terhadap eksekutif selama mereka tidak mempunyai staf yang memadai untuk membantu mereka dalam pengumpulan informasi dan dalam penyusunan rancangan undang-undang.

Itulah kelemahan yang terjadi dalam perkembangan politik di samping yang bersangkutan dengan hubungan Pusat dan Daerah.

## **Pembangunan Politik yang Kita Perlu**

Pembangunan politik harus dapat berperan untuk menjadikan pembangunan nasional lebih berhasil. Dan itu terutama bersangkutan dengan tumbuhnya kemampuan bangsa untuk sejauh mungkin menimbulkan partisipasi seluruh kekuatan dan potensi bangsa, baik yang berupa faktor manusia maupun faktor alam. Itu berarti bahwa Demokrasi Pancasila harus dapat lebih terwujud sesuai dengan ketentuan yang ter-

muat dalam UUD 1945. Karena kita ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka pembangunan politik harus selalu dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945. Itu berarti bahwa kita harus dapat mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945 dengan sebaik mungkin, lebih baik dari apa yang telah dikerjakan hingga kini.

Apa yang telah dilakukan hingga kini tidak salah. Akan tetapi kalau itu diteruskan akan menjadi salah, oleh karena kita berada dalam kerangka waktu dan kondisi yang berbeda dari masa lampau. Sebab itu perlu ada penyesuaian dan perubahan dalam Pelaksanaan UUD 1945, sebagaimana juga dulu dilakukan pada tahun 1967.

Satu hal positif dari 20 tahun yang lampau yang harus terus kita jaga dan manfaatkan adalah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Ini adalah modal yang penting sekali untuk masa depan.

Yang menjadi kewajiban kita selanjutnya adalah menciptakan harmoni antara legislatif dan eksekutif, dengan catatan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara dan bahwa eksekutif tidak bertanggungjawab kepada DPR dan hanya kepada MPR. Untuk menciptakan harmoni ini dan membuat agar MPR benar-benar lembaga tertinggi, maka yang menentukan adalah orang-orang yang duduk dalam MPR dan DPR. Kita harus memperoleh anggota-anggota MPR dan DPR yang benar-benar patut untuk duduk dalam lembaga itu. Dan itu baru terjawab apabila semua anggota lembaga itu adalah warganegara Indonesia yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Itu berarti bahwa sistem pemilihan harus beralih dari sistem di mana rakyat memilih orpol men-



jadi sistem di mana rakyat memilih wakil-wakilnya.

Pada tahun 1967 dikatakan rakyat Indonesia belum matang untuk itu, tetapi sekarang bangsa Indonesia sudah meningkat usianya lebih dari 20 tahun. Dalam 20 tahun lebih itu sudah jauh lebih banyak yang mengalami pendidikan formal dan informal, memperoleh pengalaman aneka ragam, sehingga kondisi mentalnya tidak lagi sama dengan tahun 1967. Adalah terlampau memandang rendah rakyat Indonesia, kalau dikatakan sekarang masih kurang matang, pada hal tetangga kita bangsa Malaysia yang tidak beda dengan kita sudah dari dulu memilih wakil-wakilnya. Dengan adanya sistem tersebut juga ada dorongan atau tantangan bagi para orpol untuk menjadi lebih mandiri. Sebab kalau tidak mandiri dan lebih kuat serta mampu, tidaklah mustahil bahwa rakyat samasekali tidak memilih seorang wakil dari orpol itu. Dengan adanya pemilihan wakil rakyat itu, maka semua anggota DPR adalah orang yang mewakili rakyat. Kecuali masalah anggota ABRI yang masih perlu dipertimbangkan. Sebaiknya juga anggota ABRI turut memilih dan dipilih. Akan tetapi kalau rakyat masih menganggap perlu untuk mempertahankan konsensus nasional yang menyatakan anggota ABRI tidak memilih dan dipilih dan sebagai kompensasinya diangkat oleh pemerintah untuk menjadi anggota DPR, maka kita tidak dapat menolak kehendak rakyat itu. Akan tetapi dalam hal demikian hanya anggota ABRI saja yang masih diangkat, sedangkan yang non-ABRI harus semua dipilih.

Kita harus dapat menimbulkan di Indonesia satu pandangan bahwa merupakan satu kehormatan dan penghargaan serta kebanggaan untuk menjadi wakil yang dipilih rakyat. Sekarang orang mempunyai kebang-

gaan menjadi pegawai atau pejabat pemerintah. Itu merupakan hal yang baik oleh karena akan merangsangnya untuk menjadi pegawai dan pejabat pemerintah yang baik. Akan tetapi karena kita telah bertekad untuk membangun Republik Indonesia menjadi satu negara demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka kebanggaan menjadi wakil rakyat yang dipilih secara langsung adalah lebih fundamental. Sebab itu harus kita usahakan agar semua anggota DPR dan DPRD adalah pilihan rakyat secara langsung.

Untuk keanggotaan MPR masih harus ada wakil daerah dan wakil golongan. Itu pun harus terdiri dari orang-orang yang dipilih dan bukan diangkat. Sebaiknya wakil daerah dipilih oleh setiap DPRD dari anggota DPRD yang bersangkutan. Karena anggota DPRD adalah wakil rakyat yang sudah dipilih secara langsung, maka dengan begitu wakil daerah pun hasil pilihan rakyat. Wakil golongan sebaiknya dipilih oleh para anggota setiap golongan dari mereka yang menjadi anggota golongan itu. Masih harus ditetapkan apa yang kita maksudkan dengan golongan dan golongan mana saja yang berhak mempunyai wakil dalam MPR. Karena anggota golongan adalah sebagian dari rakyat yang aktif dalam golongan bersangkutan, maka wakil mereka yang duduk dalam MPR pun telah dipilih oleh rakyat, yaitu rakyat yang menjadi anggota golongan bersangkutan.

Dengan penyusunan demikian, maka anggota MPR dan DPR mempunyai wibawa politik yang jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada kalau hanya diangkat, baik diangkat oleh orpol atau oleh pemerintah. Karena itu pihak eksekutif akan lebih terdorong untuk memperhatikan pendapat



dan suara mereka, sebaliknya akan tidak mengabaikan mereka karena dapat menimbulkan konsekuensi politik yang berat. Karena para anggota DPR dan DPRD merupakan wakil rakyat, maka mereka akan didorong untuk senantiasa menyuarakan kehendak rakyat yang mereka wakili. Kalau tidak maka tidak mustahil mereka akan di-*recall* oleh daerah pemilihan mereka atau dalam Pemilu berikutnya tidak akan dipilih lagi oleh rakyat. Dengan dorongan demikian mereka harus lebih aktif sebagai anggota legislatif.

Selain itu dalam tiap-tiap fraksi DPR dan DPRD harus dibentuk staf yang membantu para anggota DPR. Kemungkinan lain adalah adanya staf yang membantu tiap komisi DPR. Dalam hal itu staf tersebut membantu para anggota DPR tanpa memandang keanggotaan fraksi. Masing-masing cara ada untung-ruginya. Para anggota staf itu akan memperoleh pengalaman yang baik sekali yang sekaligus mematangkan mereka untuk nantinya menjadi politikus yang turut mencalonkan diri dalam Pemilu. Hal demikian banyak kita lihat di AS. Dengan adanya staf itu dapat diharapkan bahwa kegiatan dan pendapat para anggota DPR akan lebih efektif dalam menghadapi eksekutif dan setiap pekerjaan yang lain.

Maka dengan pengaturan itu dapat diharapkan bahwa akan tercipta harmoni yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif tanpa mengganggu kehendak UUD 1945, yaitu bahwa eksekutif kuat untuk dapat menjalankan pemerintahan yang hanya bertanggung jawab kepada MPR. Masih perlu pula dipertimbangkan aktivitas MPR yang tidak terbatas pada sidang sekali dalam lima tahun. Sebab sebagai lembaga tertinggi negara MPR dapat lebih dimanfaatkan daripada hanya untuk persidangan selama sekitar 14 hari

dalam lima tahun. Khususnya ini menyangkut pembangunan Bhinneka Tunggal Ika.

Umumnya di negara-negara lain perwakilan terdiri dari dua kamar, yaitu satu kamar yang bersifat DPR yang menghadapi problem negara sebagai satu kesatuan. Sedangkan kamar yang lain bersifat Senat yang menghadapi negara yang terdiri dari daerah-daerahnya. Meskipun di Indonesia hanya ada satu MPR dan satu DPR, mungkin sekali karena para Pendiri Republik hendak mempertahankan secara konsekuen negara kesatuan, namun kita melihat bahwa di MPR ada wakil daerah. Jadi jelas bahwa para Pendiri Republik pun menyadari pentingnya perwakilan daerah dalam lembaga tertinggi.

Oleh sebab itu adalah kurang sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 kalau peranan MPR hanya dibatasi seperti sekarang saja. Oleh sebab itu perlu ada lebih dari satu persidangan dalam lima tahun tanpa mengarah kepada sidang khusus yang mempunyai makna tersendiri. Dalam UUD 1945 tidak dilarang MPR bersidang lebih dari satu kali, oleh karena Pasal 2 hanya menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. Dan sidang kedua itu sebaiknya diarahkan kepada masalah Bhinneka Tunggal Ika, atau hubungan Pusat dengan Daerah. Karena peranan daerah menjadi semakin penting dalam pembangunan nasional, maka pengaturan seperti itu tidaklah mengada-ada. Keinginan untuk integrasi nasional yang mantap justru memerlukan pengaturan demikian.

Kalau kita patriot Indonesia sejati tentu kita ingin melihat kemajuan di seluruh bagian Indonesia. Dan tidak hanya kemajuan



Pulau Jawa atau Sumatera saja. Justru untuk menciptakan Indonesia yang maju, kuat dan sejahtera diperlukan kemajuan seluruh bagian Indonesia. Untuk keperluan itu perlu ada politik desentralisasi yang bijaksana dan maju. Politik desentralisasi yang bijaksana adalah politik yang memberikan kesempatan dan kemampuan bagi tiap daerah untuk maju dan mandiri, tetapi selalu dalam kerangka kesatuan Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara. Politik demikian harus berpangkal pada pengembangan sumber daya manusia di daerah-daerah. Sebab hanya dengan kualitas manusia yang memadai dapat dicapai kemajuan dan kemandirian daerah yang senantiasa berada dalam kerangka kesatuan Indonesia. Tanpa kualitas manusia yang memadai politik desentralisasi hanya akan merupakan pemborosan sumber daya dan bahkan dapat menimbulkan kerawanan bagi Indonesia secara keseluruhan serta daerah yang bersangkutan. Separatisme adalah salah satu akibat itu yang pada akhirnya merugikan daerah yang bersangkutan maupun Indonesia sebagai kesatuan.

Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di daerah harus berpangkal pada pendidikan dan kepemimpinan. Pendidikan di lingkungan keluarga dan rumah tangga merupakan tempat utama untuk memperoleh kualitas manusia yang berwatak dan berkepribadian, sedangkan pendidikan sekolah melengkapi itu dengan transfer ilmu pengetahuan dan informasi yang menciptakan kecakapan kerja dan pembinaan profesi. Kepemimpinan menimbulkan suasana masyarakat yang kondusif untuk perkembangan daerah dalam perkembangan nasional dan internasional. Inilah yang perlu diutamakan terlebih dahulu dalam politik kita untuk menjamin integrasi nasional.

Segera menonjol di situ bagaimana kita menetapkan para Gubernur dan Bupati sebagai Kepala Daerah Tingkat Satu dan Tingkat Dua. Sebab kepemimpinan mereka itu yang akan mempunyai pengaruh besar kepada penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia itu. Pada waktu ini lebih berperan pihak Pusat dalam penentuan pada Kepala Daerah itu. Misalnya, Gubernur ditentukan oleh Keputusan Presiden sesuai dengan calon-calon yang diajukan DPRD Tingkat I yang bersangkutan, sedangkan Bupati ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengaturan demikian untuk menjamin bahwa para Gubernur dan Bupati adalah lebih banyak yang diyakini oleh Pusat daripada semata-mata merupakan pilihan daerah yang bersangkutan.

Selama kita masih dalam tahap pengembangan sumber daya manusia di daerah pengaturan demikian perlu dipertahankan. Dengan begitu dapat lebih dijamin, bahwa proses penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia masih selalu dikontrol oleh Pusat. Kalau tingkat kemajuan di daerah sudah menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi mungkin dapat dipertimbangkan adanya wewenang lebih luas bagi daerah. Proses itu menunjukkan perlunya kegiatan MPR yang lebih banyak dari sekedar bersidang satu kali dalam lima tahun dengan acara yang sekarang sudah menjadi kebiasaan.

Apabila pembangunan politik demikian dapat terwujud, maka dapatlah diharapkan adanya stabilitas nasional yang lebih dinamis dengan disertai pemeliharaan dan peningkatan integrasi nasional yang kesemuanya mendekatkan kita kepada pencapaian tujuan nasional tanpa meninggalkan rel Pancasila dan UUD 1945.



## Penutup

Sudah amat jelas bahwa pembangunan nasional yang berintikan pembangunan ekonomi tidak mungkin berhasil baik kalau tidak disertai pula oleh pembangunan politik. Dan bahwa pembangunan politik yang telah dilakukan oleh Orde Baru cukup baik untuk masanya, tetapi sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi masa kini dan masa depan.

Selain itu juga amat jelas bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya menciptakan sekedar kemajuan saja. Kemajuan yang diciptakan pembangunan nasional harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kemajuan dan dinamika yang sedang berkembang di wilayah Asia-Pasifik yang menjadi lingkungan hidup bangsa Indonesia. Kalau tidak, maka timbul bahaya bahwa Indonesia menjadi sasaran dari berbagai kegiatan bangsa-bangsa yang tinggal di keliling kita yang lebih cakap dan lebih mampu dalam memanfaatkan segenap potensi yang dikandung alam kita. Oleh sebab itu kemajuan dan pembangunan harus meluas ke segenap daerah di Indonesia yang mengandung berbagai potensi yang berharga. Untuk itu diperlukan pembangunan politik yang menimbulkan integrasi nasional. Suatu politik yang menjamin harmoni antara Pusat

dan Daerah.

Sedangkan pembangunan politik yang menjamin dinamika yang stabil atau stabilitas yang dinamis untuk keseluruhan bangsa banyak tergantung dari kemampuan untuk mewujudkan harmoni antara eksekutif dan legislatif. Memang kita perlukan eksekutif yang kuat dan mampu menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga langkah demi langkah tercipta setiap unsur yang membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Akan tetapi, di pihak lain juga diperlukan legislatif yang berwibawa dan berpengaruh dalam masyarakat, sehingga dengan begitu dapat dipelihara kedaulatan rakyat sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945. Dengan demikian perjalanan bangsa Indonesia ke tujuan nasionalnya akan senantiasa dijaga agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat yang membentuk bangsa kita ini.

Inilah tantangan yang kita hadapi untuk masa depan dalam menyelenggarakan pembangunan politik guna keberhasilan pembangunan nasional. Kemampuan kita mengatasi tantangan itu dengan memadai akan menentukan keberhasilan melaksanakan tinggal landas dalam pembangunan nasional.



# Pembangunan Politik Sesudah Tahun 1993

SOEMITRO

## Pendahuluan

**I**NTERMEDIATE-range Nuclear Forces (INF) Agreement sebagai hasil pendekatan Amerika Serikat-Uni Soviet (AS-US) menyadarkan orang bahwa dunia memasuki era baru yaitu Era Pasca Perang Dingin. Dalam proses terbentuknya era baru tersebut umat manusia dihadapkan kepada tantangan baru guna menata kembali pandangan dan persepsinya dan meninggalkan sikap konservatif dan ortodoks yang dibelenggu oleh nilai-nilai lama. Perubahan dan pembaruan menjadi isunya.

Bangsa Indonesia pun tidak lepas dari pengaruh tersebut, karena dunia semakin kecil dan saling ketergantungan antar bangsa semakin besar sebagai akibat kemajuan pesat di bidang elektronika dan informatika. Di pihak lain persaingan antar bangsa menjadi semakin ketat.

Bangsa Indonesia akan mengakhiri era perintisan (era pembangunan politik dan era awal pembangunan ekonomi) yang penuh

*trial & error*. Bangsa Indonesia juga akan meninggalkan kondisi yang dicipta oleh suasana revolusi (tanpa menghancurkan ciri-ciri positif bangsa di tengah revolusi) dan meninggalkan kultur serta struktur sosial yang diciptakan oleh konsep nasakom atau komunisme. Kondisi tersebut di atas penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian (*insecurity & confusion*).

Menatap abad XXI atau mulai tahun 1993, setiap aspirasi yang menghendaki perubahan dan pembaruan harus dilakukan secara berencana (*planmatig*) dan terkendali (*orderly process of change*) kalau tidak ingin kembali ke situasi penuh ketegangan, membingungkan dan penuh dengan ketidakpastian, bahkan yang paling berbahaya adalah terjadinya proses disintegrasi.

## Penerapan UUD 1945 di Tengah-tengah Tuntutan Perubahan dan Pembaruan

Berbahagialah bangsa Indonesia bahwa menghadapi situasi perubahan dan pemba-



ruan tersebut, kita telah memiliki pegangan dan dasar yang kuat yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Harus diakui betapa arif dan dalamnya wawasan serta *farsightedness* para pendiri Republik Indonesia. Mereka secara dini telah menjaga kekenyalan UUD 1945. Pada Bab IV Penjelasan UUD 1945 dinyatakan: "Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin 'supel' (*elastic*) sifatnya aturan itu makin baik. ... Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Sebaliknya meskipun UUD 1945 itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintah baik, UUD 1945 itu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting adalah semangat."

Jelas penerapan UUD 1945 tidak boleh kaku dan dogmatik. Di Bab VII tentang Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas dinyatakan: "Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan 'diktator,' artinya kekuasaan tidak tak terbatas. ... Kecuali itu, ia harus *memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat*." Tentang kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dinyatakan: "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. ... Kecuali itu anggota-anggota DPR *semuanya merangkap menjadi anggota MPR*. Oleh karena itu DPR *dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden*. ..."

Jiwa penjelasan tersebut adalah: *pertama*, mencegah proses akumulasi kekuasaan di tangan Presiden, yang dapat menjurus ke kekuasaan mutlak (*absolute power*), dan *kedua* mempertegas bahwa anggota-anggota DPR adalah merangkap anggota *lembaga*

*demokrasi tertinggi* MPR, di mana Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi *di bawah MPR*. Memang DPR tidak dapat menjatuhkan seorang Mandataris/Presiden. Ini adalah jaminan stabilitas pemerintahan. Tapi pengawasan terhadap seorang Presiden oleh DPR adalah wajar, sehingga pada akhir masa jabatan permintaan pertanggungjawaban melalui MPR harus dilakukan.

Selama 5 tahun melalui anggota DPR (anggota MPR) telah dimonitor kesalahan-kesalahan seorang mandataris. Kewajiban anggota DPR/MPR adalah meneruskan hasil pemantauannya kepada induk organisasi masing-masing, sehingga Sidang MPR hasil Pemilu yang baru, dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih sempurna. Kalau tidak demikian maka MPR hasil Pemilu tidak mungkin menilai pertanggungjawaban mandataris dengan sempurna.

Di pihak lain harus dihindari kebutuhan untuk memanggil Sidang Istimewa MPR sebelum masa jabatan seorang mandataris selesai. Hal tersebut perlu. Kalau tidak, stabilitas pemerintahan akan terganggu seperti zaman politik liberal (tahun 1950-an) hanya polanya saja yang lain.

Berdasar hal-hal tersebut di atas ditambah pengalaman selama lebih dari 40 tahun merdeka serta fenomena umum di negara-negara berkembang, maka perlu ada ketentuan Undang-undang Pelaksanaan Pasal 7 UUD 1945, agar masa jabatan seorang Presiden/Mandataris dibatasi sampai sebanyak-banyaknya dua kali, sama halnya dengan Gubernur dan Bupati/Kepala Daerah (2 X 5 tahun maksimal). Kontinuitas usaha tidak boleh digantungkan pada manusia, tapi pada sistem, sesuai UUD 1945, bahwa setiap mandataris harus melaksanakan pemerintahan berdasar GBHN. Selain itu pegangan setiap



mandataris adalah Rencana Strategi Pembangunan Jangka Panjang yang ada. Perlu dicatat, GBHN dan Rencana Strategi Pembangunan tersebut harus dijaga kekenyalannya guna menghadapi perubahan-perubahan cepat atau perkembangan-perkembangan baru. Untuk ini perlu dilembagakan satu mekanisme yang didasari Undang-undang. Misalnya pembentukan Badan Pekerja (yang diperluas) dengan kewenangan tersebut.

Khusus mengenai Pasal 6 UUD 1945 ayat 2 harus benar-benar dipertahankan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan *suara yang terbanyak*. Budaya musyawarah mufakat tidak tepat diterapkan di sini. Memilih seorang pemimpin pada dasarnya adalah manifestasi *kepercayaan*. Sama halnya dengan pemilihan pengurus perkumpulan harus dilakukan secara *bebas dan rahasia*. Kejujuran dan kebersihan dalam kehidupan politik harus mulai dikembangkan, di samping itu harus dihindari kesenangan bermanipulasi. Penegakan etika dalam berpolitik harus menjadi budaya politik bangsa.

Calon tidak boleh hanya satu, karena harus dihindari *pengaruh kekuasaan dan paksaan kekuatan*. Kewenangan utama MPR tersebut harus dihargai oleh setiap warganegara dan semua kekuatan sosial politik.

Mengenai kedudukan seorang Menteri menurut Penjelasan Pasal 17 UUD 1945, memang tidak bertanggungjawab kepada DPR, yang berarti tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Di pihak lain tujuan kita adalah membangun budaya dan etika politik yang baik. Seorang Menteri tidak dapat selalu berlindung di belakang wibawa seorang Presiden apabila berbuat kesalahan atau kegagalan yang prinsipil. Praktek semacam ini selain akan mendorong proses akumulasi kekuasaan yang terpenting juga tidak mendidik para Menteri mengerti tanggung jawab.

Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 bukanlah bertujuan untuk mendidik para pejabat menjadi *easy going* dan merasa kuat tidak tergoyahkan, *onschendbaar* atau *untouchable*. Karenanya perlu dijadikan konsensus agar menjadi etika bahwa seorang Menteri yang gagal atau membuat kesalahan besar dan prinsipil mengajukan pengunduran diri atau di-*recall* oleh induk organisasinya. Bila tidak ia akan kehilangan wibawanya dan akan menjadi *laughing stock* di tengah masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan wibawa Pemerintah. Pengunduran diri semacam ini juga merupakan mata rantai *kadervorming* yang akan membuka kesempatan bagi kader politik lain agar mendapat pengalaman dalam pemerintahan.

Juga perlu dibentuk *Clearing House* untuk calon menteri, umpamanya melalui Komisi/Komite Khusus di DPR atau dalam bentuk lain.

Mengenai sistem dan prosedur penyusunan Kabinet hendaknya dicipta konvensi di mana 4 faktor dijadikan dasar. *Pertama*, bahwa seluruh orsospol telah menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal. Kaitan mereka dengan ideologi primordial telah tidak ada lagi dan medium persaingan adalah program.

*Kedua*, bahwa demokrasi Pancasila tidak mengenal adanya oposisi sehingga semua parpol wajar disertakan dalam Kabinet. Dengan demikian mereka diajak ikut bertanggungjawab dan "oposisi terselubung" dapat dihindari.

*Ketiga*, GBHN merupakan konsensus nasional yang harus dijadikan pedoman kerja setiap kekuatan sosial politik. Penyimpangan dari GBHN dapat dianggap tidak konstitusional. Oleh karenanya perumusan GBHN harus benar sempurna dan semua ke-



kuatan sosial politik mutlak harus berpartisipasi (vertikal & horisontal).

*Keempat*, adalah komitmen pada kontinuitas pembangunan. Karena titik beratnya adalah kesejahteraan bangsa atau ekonomi, maka kehadiran tim teknokrat di dalam susunan Kabinet merupakan kebutuhan, bahkan keharusan. Yang ideal adalah hadirnya teknokrat yang sudah berpengalaman dalam bidang politik (anggota orsospol, anggota DPR dan lain-lain), sehingga citra dan persepsinya tidak semata-mata *pure* teknokrat. Seorang teknokrat politikus akan selalu memperhatikan dampak sosial politik dari kebijakannya dan karenanya dapat menghindari timbulnya kesenjangan sosial yang tidak diperhitungkan. Dengan demikian yang dibangun akhirnya adalah manusia sebagai bagian dari masyarakatnya. Proses atau sistemnya hendaknya melalui konsultasi dan *hearing* dengan semua orsospol yang diwakili di dalam DPR tanpa menjurus ke budaya *koehandel* zaman politik liberal. Alangkah sempurnanya kalau setiap orsospol memperhatikan tulisan-tulisan atau buah pemikiran (konsep) perorangan yang dikemukakan dalam media massa, seminar atau forum apa pun. Presiden terpilih dibantu tim kecil biasanya mengadakan wawancara dengan para calon menteri guna mengetahui kedalaman pikiran serta *insight* mereka pada permasalahan strategik dan masalah jangka pendek yang dihadapi bangsa.

### Kepemimpinan Kolektif

Kabinet yang akan datang harus merupakan tim yang homogen dan merupakan kepemimpinan yang kolektif, terutama dalam masa transisi dari Generasi '45 ke generasi berikutnya. Cara kerja tim semacam ini jangan terlampau mengandalkan dan menggantungkan diri kepada kemampuan perso-

rgan, tapi utamakan dan biasakan bekerja secara kolektif terutama dalam proses pengambilan keputusan yang penting-penting.

### Parpol & Ormas

Sudah waktunya parpol dijadikan partai massa yang mempunyai organisasi sampai ke tingkat desa. Dengan diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal, dan hilangnya kaitan parpol dari ideologi primordial, serta medium persaingan adalah Program Partai, ditambah pengalaman pahit peristiwa berdarah kup gagal PKI tahun 1965, maka tidak ada alasan untuk tidak mengubah struktur kepartaian di Indonesia.

Menjelang era modernisasi dan akselerasi pembangunan, di mana tuntutan transformasi sosio kultural sangat dibutuhkan, maka partisipasi rakyat luas perlu digalakan, dan tidak dapat hanya mengandalkan birokrasi (Korpri), Golkar dengan organisasi profesinya maupun ABRI. Parpol harus dijadikan perpanjangan tangan dalam kampanye modernisasi. Parpol ikut bertanggungjawab dalam usaha modernisasi bangsa. Hanya saja praktek dan citra demokrasi harus benar-benar menjadi fokus pendidikan di semua kekuatan sosial politik maupun lembaga negara.

Kepekaan dan daya tanggap parpol terhadap masalah-masalah kerakyatan atau sosial akan meningkatkan mutu DPR/MPR. Apabila dipelajari periode setelah 1965, di mana parpol dijadikan partai kader tampak kecenderungan kuat menonjolnya kekuatan sosial lain yang merupakan wadah *floating mass* seperti KNPI, AMPI, GMNI, PII, HMI, LSM dan lain-lain terlepas ikatannya dari mana pun dan bebas menganut "politik"-nya sendiri. Timbul gejala, kekuatan sosial tersebut cenderung berperan tidak beda dengan orsospol hanya saja mereka tidak



ada wakilnya di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka dapat sangat vokal dan mampu menggerakkan massa sesuai dengan isu yang ada pada saat tertentu. Kalau benar pengamatan ini, maka secara tidak disadari kita telah kembali ke zaman liberalisme (tahun 1950-an) dikombinasikan dengan pola zaman Nasakom (gerakan massa dan *pressures from below*). Karenanya sudah waktunya parpol diubah menjadi partai massa kembali sehingga komponen-komponen tersebut masuk tanggung jawab parpol. Gerakan yang ada sekarang dari LSM dan lain-lain dapat dimengerti dan diterima, karena orsospol maupun DPR tidak atau kurang peka terhadap masalah kerakyatan. Penyebab utama dari keadaan tersebut adalah proses "birokratisasi" orsospol dan kurang mulusnya kehidupan demokrasi di dalamnya. Di pihak lain perlu diperhitungkan, bahwa fungsi setiap LSM kini mengarah untuk dijadikan bagian (*subfield*) dari ilmu dan sebagai obyek studi tentang perilaku sosial (*social behavior*).

Berbicara mengenai penyehatan demokrasi dalam orsospol, di antaranya perlu dihapus dari struktur organisasi apa yang disebut Pelindung, Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan sebagainya. Organisasi tersebut merupakan penunjang bagi hidupnya kembali neo-feodalisme dalam orsospol. Selain itu pemilihan pengurus harus dilakukan melalui *voting* secara bebas dan rahasia. Persaingan sehat antar kader harus dikembangkan. Praktek saling mendiskreditkan, "ngrasani," "sikut-sikutan" dan praktek negatif lainnya harus ditiadakan, karena melanggar norma etik kehidupan politik bangsa yang akan dibangun bersama. Demikian pula ketergantungan pada kekuasaan atau penggunaan kekerasan harus dianggap pelanggaran hukum dan campur tangan pemerintah.

Misi pendidikan politik setiap pengurus partai umumnya adalah memapankan jiwa demokrasi Pancasila atau demokrasi kekeluargaan tanpa menghilangkan *zakelijkheid*. Rasa saling membutuhkan walau berbeda pendapat, kemampuan berdialog dengan menggunakan argumentasi sehat perlu dipupuk dan hilangnya sifat-sifat a priori atau pemaksaan pendapat, lebih-lebih oleh seorang pimpinan/atasan. Membangun muafakat melalui musyawarah (*consensus building*) dimulai sedini mungkin dalam setiap upaya untuk mencari alternatif pikiran atau pemecahan masalah.

Khusus mengenai Golkar sudah waktunya untuk mengadakan transformasi struktural dan menjadikan dirinya sebagai parpol biasa. Pada hakekatnya setiap parpol pun mempunyai golongan karya atau profesi. Perlu pula dipertanyakan apakah bukannya sudah waktunya untuk meniadakan kuno/ormas atau apapun namanya seperti SOKSI, MKGR dan lain-lain agar benar-benar terlaksana peleburan penuh.

Paling lambat dalam 10 tahun yang akan datang Korpri tidak boleh menjadi *onderbouw* Golkar atau Parpol mana pun. Organisasi Korpri harus benar-benar non-politik yang dilarang berafiliasi dengan orsospol manapun tanpa menghilangkan hak pilih para anggotanya dalam Pemilu. Melalui perubahan ini diharapkan akan terjadi penyehatan kehidupan politik terutama dalam praktek demokrasi.

*Kadervorming* dalam orsospol hendaknya lebih teratur dan menganut sistem yang jelas. Pada dasarnya proses yang dilalui pemimpin/kader untuk naik ke jenjang lebih tinggi adalah melalui "perebutan" kepercayaan dari lingkungannya melalui demonstrasi kemampuan, prestasi dan integritas kepemimpinan yang tangguh.



Perubahan struktur dan budaya politik "pembaruan" dalam kepartaian harus dimulai sedini mungkin menjelang Sidang MPR yang akan datang. Kongres orsospol seyogyanya diadakan segera setelah Sidang MPR dengan kurun waktu sama dengan MPR (5 tahun). Pemilu adalah tugas dari pengurus lama, karena tujuan "memenangkan" Pemilu dibutuhkan waktu persiapan lama (4 tahun). Guna melakukan kontrol dan penilaian pertanggungjawaban yang berarti serta jujur dalam setiap Sidang MPR terhadap seorang Mandataris/Presiden, problemnya adalah, semua anggota MPR hasil Pemilu yang akan melakukan fungsi tersebut mungkin samasekali baru. Dengan demikian para anggota MPR yang baru tidak mengikuti atau tidak tahu secara pasti prestasi serta kegagalan Mandataris selama masa lima tahun yang lalu yang akan dinilai pertanggungjawabannya.

Hal ini dapat dihindari apabila kepengurusan orsospol mapan dan dapat mengembangkan wibawanya. Pengurus lamalah yang mampu menilai apakah seorang Mandataris berhasil atau gagal sebagai dasar untuk menentukan apakah dia dapat dipilih kembali atau tidak untuk masa jabatan kedua yang merupakan masa jabatan terakhir.

## Konsep Pemilu

Akhir-akhir ini timbul pemikiran untuk mengubah sistem Pemilu dari sistem proporsional menjadi *district stelsel*. Reaksi terutama datang dari orsospol bukan Golkar, karena harus diakui perkembangan politik pasca tahun 1965 atau selama Orde Baru, Golkar menikmati mayoritas mutlak dalam DPR/MPR. Perannya dalam kehidupan politik setelah selesai masa transisi dominan sekali. Khususnya setelah pemantapan semua hasil positif Orde Baru selesai seperti

Pancasila sebagai asas tunggal, kehidupan konstitusional, toleransi dalam kehidupan antar agama, hilangnya sukuisme/daerahisme dan lain-lain, maka persaingan harus lebih bebas dan orsospol benar-benar dapat mencapai kemenangan dalam Pemilu, bila prestasi (*performance & achievements*) pada periode sebelumnya diakui pemilih dan programnya benar-benar menarik. Masa 5 sampai 10 tahun yang akan datang hendaknya dimanfaatkan oleh semua orsospol guna konsolidasi ke dalam agar selambat-lambatnya pada Pemilu tahun 2003 sudah dapat diterapkan Pemilu berdasar *district stelsel*, sehingga orang yang dipilih benar-benar dikenal dan dipercayai rakyat dan hilanglah sistem daftar yang di "drop" dari Pusat. Dan setiap wakil yang dipilih harus bertanggungjawab juga pada distrik pemilihnya.

## Pengembangan Budaya dan Etika dalam Kehidupan Politik Bangsa

Setelah berpengalaman lebih dari 40 tahun Bangsa Indonesia mestinya sudah mampu menentukan secara konsensus *the don't's and do's* atau aturan permainan bagi kehidupan politik bangsa. Adanya Panitia bersama yang terdiri dari wakil-wakil semua fraksi DPR guna mendiskusikan dan mengkonsolidasikan semua pengalaman tersebut akan sangat bermanfaat. Hasil Panitia dapat dijadikan bahan pendidikan politik nasional oleh semua kekuatan sosial politik maupun semua lembaga kenegaraan.

## Politik yang Mendukung Pembangunan Nasional

Politik apapun yang dikembangkan harus menjamin kontinuitas pembangunan, meningkatkan daya saing ekonomi dan poli-



tik bangsa di fora internasional, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan gerak pembangunan di semua daerah (bagian timur Indonesia khususnya, luar Jawa-Sumatera pada umumnya), keadilan sosial, pemerataan pendapatan serta pengurangan kesenjangan sosial yang ada; pemberantasan korupsi, "birokratisme," dan feodalisme; menyuburkan kehidupan demokrasi (pengakuan terhadap kelemahan umum negara sedang berkembang) dan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa sepanjang masa.

Politik desentralisasi dalam manajemen pembangunan sangat penting pada waktu yang akan datang. Desentralisasi manajemen akan menciptakan arus modal dan manusia secara sentrifugal dari Jawa ke luar Jawa. Mendekatkan modal dan manusia ke sumber daya alam di daerah-daerah akan mempercepat proses penciptaan Indonesia sebagai satu keutuhan ekonomi. Pola desentralisasi adalah wahana untuk pemerataan. Dengan *policy* ini terjamin adanya Pemerintah Pusat yang *bersih dan berwibawa*, karena fungsi Pusat hanya *centralized planning/programming and control*.

Wawasan Nusantara mulai tahun 1993 harus benar-benar dapat diterapkan dan diawasi sejak tingkat perencanaan (*planning stage*) sampai ke pelaksanaan. Pertumbuhan penduduk yang mencapai 200 juta pada akhir abad XX akan menjadi pasar dalam negeri yang produktif kalau penduduk yang sebesar itu tersebar merata di seluruh Nusantara dari Sabang ke Merauke dan konsentrasi penduduk yang besar di kawasan harus dihindari (Jawa, Bali) secara vertikal dan horisontal.

Perhatian perlu pula difokuskan kepada kenyataan bahwa Indonesia sebagai satu ke-

utuhan politik telah tercapai, tetapi sebagai keutuhan ekonomi dan budaya masih harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.

## Politik Pendidikan Nasional

Fakultas ilmu politik seyogyanya dipusatkan hanya pada beberapa universitas seperti UI, Unpad, Gama, Unair, Unhas dan USU. Dalam jangka waktu minimal satu atau dua generasi *policy* ini perlu guna memantapkan budaya dan etika politik yang ideal yang menjamin stabilitas politik nasional dengan kehidupan demokrasi yang subur serta menjamin kontinuitas pembangunan nasional.

## Bangsa Indonesia Ditengah-tengah Dunia Baru

Dengan pengalaman selama lebih dari 40 tahun, terutama selama era Awal Pembangunan Ekonomi, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mampu keluar dengan konsep-konsep segar untuk mengisi Era Dunia Baru pasca Era Perang Dingin. Dapur-dapur atau *Think Tank* perlu diciptakan guna merumuskan hal-hal tersebut, sehingga politik luar negeri Indonesia akan lebih aktif dan terarah.

## Penutup

Hendaknya menjadi tekad bulat bangsa Indonesia bahwa pada akhir Rencana Strategi Pembangunan Jangka Panjang II Bangsa Indonesia harus sudah menjadi bangsa yang kuat ekonomi dan politik sehingga dapat memberi arti pada posisi silangnya dan pemilikan atas sumber daya yang sangat luas.



# Arti Partai Politik Bagi Pembangunan Nasional

HARDI

PANDANGAN masyarakat mengenai arti partai-partai politik dan peranan para pemimpinnya selalu berubah-ubah. Seperti dijelaskan di bawah, arti partai politik dan peranan para pemimpinnya dalam pencetusan gerakan kebangsaan dan dalam memelopori perjuangan kemerdekaan, telah tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa heroik.

Sebaliknya, sekarang ini ada suatu gejala mengenai timbulnya *dichotomi*. Artinya, di samping kita memiliki pemerintah yang kuat, tetapi kedudukan partai-partai politik adalah lemah. Masyarakat menilai Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia sebagai kekuatan sosial politik kurang mandiri. Karena tubuhnya sering dilanda kericuhan dan karena adanya campur tangan dari kekuatan ekstern, maka kedua partai politik itu tidak lagi memiliki kemandirian yang diperlukan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan politik.

Mengingat hal-hal seperti dijelaskan di atas dan dalam rangka upaya menyajikan

bahan masukan yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas partai-partai politik, maka tulisan yang berjudul "Arti Partai Politik Bagi Pembangunan Nasional" ini ditulis, dengan harapan mudah-mudahan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca majalah *Analisis CSIS*.

## Arti Partai Politik dalam Zaman Penjajahan

Kita semua menyadari bahwa kemerdekaan yang dinikmati bangsa Indonesia sekarang ini merupakan buah dari perjuangan para *Perintis Kemerdekaan* sejak tahun 1908. Dengan didirikannya *Budi Utomo* pada tanggal 20 Mei 1908, mereka -- untuk pertama kalinya -- menanamkan jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme serta mencetuskan era Kebangkitan Nasional. Perjuangan Perintis Kemerdekaan dilanjutkan oleh para pemimpin partai politik, baik yang berasaskan agama Islam seperti Sarekat Islam (1911); yang beraliran Marxisme antara lain Indische Sociaal Demokratische Vereniging



(1914), maupun yang berasaskan Marhaenisme/Nasionalisme yaitu Partai Nasional Indonesia (1927).

Kemudian, perjuangan rakyat membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan diteruskan oleh para pelaku Sumpah Pemuda (1928) yang menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya, dengan dibekali jiwa, semangat dan nilai-nilai '45 para pejuang Angkatan '45, termasuk warga partai politik yang bersangkutan, telah berhasil mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 lahirlah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Perjuangan para tokoh pergerakan kebangsaan dan pergerakan kemerdekaan, termasuk para pemimpin partai-partai politik pada zaman kolonial yang mewarnai titian perjalanan sejarah bangsa masa lampau, merupakan suatu proses yang tidak mengenal henti. Perjuangan itu ialah untuk menyongsong derap kehidupan bangsa menuju ke arah terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang telah dicanangkan pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

## Peranan Partai Politik dalam Zaman Kemerdekaan

Dalam alam kemerdekaan, terjadilah suatu perubahan besar mengenai sasaran yang dituju oleh partai-partai politik. Jika dalam alam penjajahan perjuangan partai-partai politik difokuskan untuk melawan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menghapuskan sistem kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme dari bumi Indonesia, maka dalam alam kemerdekaan tenaga dan pikiran para tokoh-tokoh yang memimpin

partai-partai politik dicurahkan untuk menentukan keserasian jalannya pemerintahan dengan kehendak rakyat. Hal itu sesuai dengan pemikiran Edmund Burke, yang mengatakan bahwa partai itu adalah suatu organisasi politik yang dibentuk oleh orang-orang yang -- dilandasi oleh idealisme -- hendak memajukan kepentingan bersama berdasarkan suatu asas tertentu dan aspirasi yang disetujui oleh warganya.

Dalam UUD 1945 tidak terdapat perkataan "partai politik." Namun, Pasal 28 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, ditetapkan dengan undang-undang. Ketiga hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 ini merupakan sebagian dari landasan formal bagi terwujudnya kehidupan demokratis dalam negara Republik Indonesia, di mana terjamin hak hidup partai-partai politik sebagai kekuatan sosial politik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan membela kepentingan rakyat.

Mengingat hal tersebut dan mengingat landasan teoritisnya, seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen (*General Theory of Law and State*, hal. 295), maka kehadiran partai politik dalam masyarakat merupakan esensialia dari demokrasi. Sehubungan dengan eksistensi partai-partai politik, para pengemban ide perlu memperhatikan amanat *Founding Fathers* Republik Indonesia<sup>1</sup> yang menegaskan, bahwa Negara dan Pemerintah termasuk ABRI hendaknya berdiri di atas semua golongan dan tidak hanya menjadi pelindung dari golongan yang paling besar atau paling kuat.

Meskipun landasan-landasan formal dipahami, gagasan teoritis diketahui dan setiap

<sup>1</sup>Lihat Panitia Lima, *Uraian Pancasila* (Jakarta: Mutiara, 1977).



pengemban ide perlu mewujudkan pikiran-pikiran luhur dari *Founding Fathers* Republik Indonesia, namun -- dalam praktek -- tampak terjadinya penyimpangan tidak dapat dicegah, seperti digambarkan di bawah ini.

Sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi parlementer yang dianut oleh UUD Sementara tahun 1950, yang berlaku hingga Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, terjadilah sistem multi partai, yang -- dengan sendirinya -- menimbulkan eksesekses. Misalnya, dengan timbulnya golongan oposisi yang berhadap-hadapan melawan partai pemerintah, maka sering terjadi pergantian Kabinet sehingga badan eksekutif pada zaman tersebut berumur paling lama dua tahun. Karena umur Kabinet-kabinet singkat, maka upaya pembangunan nasional menjadi tersendat-sendat.

Sementara itu sebagai dampak dari jiwa liberalisme, muncullah pemimpin-pemimpin yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan. Dalam situasi yang demikian itulah, maka timbul pergolakan seperti DI/TII, PRRI-Permesta yang diprakarsai oleh sementara tokoh-tokoh politik tertentu yang bekerjasama dengan oknum-oknum militer. Dapatlah dipahami bahwa tragedi-tragedi nasional ini merobek-robek persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam keselamatan kehidupan bangsa dan negara serta mengganggu tatanan politik.

Perkembangan di negara-negara berkembang yang menganut sistem liberal seperti Indonesia dalam kurun waktu tahun 1950-1959 membawakan pergeseran nuansa. Agar konstataasi ini menjadi jelas, sebaiknya masalahnya kita kaji berdasarkan pendapat Schumpeter seorang pemikir politik seperti dijelaskan di bawah ini.

Dalam negara-negara berkembang, di mana berlaku sistem demokrasi parlementer yang liberal, ada kecenderungan bahwa rakyat hanya diperlukan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum. Rakyat yang berbondong-bondong memberikan suaranya lewat kotak-kotak suara, nyatanya tidak akan menjadi anggota Badan Eksekutif untuk melaksanakan pemerintahan. Sebaliknya, mereka menjadi pelaku dalam "pesta demokrasi" itu, untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat atau yang akan mengalami nasib baik untuk duduk dalam kabinet.

Jelasnya dengan berkembangnya liberalisme, peranan partai politik dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan politik, cenderung menjadi kabur. Dengan lain perkataan, para pemimpin partai cenderung kurang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila serta norma-norma kehidupan masyarakat. Bahkan mereka seringkali menyalahgunakan partai politik untuk dijadikan tempat memperoleh dukungan rakyat. Sebaliknya, kepentingan rakyat dilupakan, aspirasi, opini dan gagasan yang berasal dari masyarakat diabaikan, tersumbat atau tidak tersalurkan secara efektif ke forum lembaga-lembaga perwakilan rakyat atau kepada Pemerintah.

Akhirnya, seorang pemimpin partai politik -- meskipun mereka duduk dalam lembaga-lembaga demokrasi mewakili rakyat -- pada hakikatnya hanya mementingkan kepentingan pribadinya.

Demikian itulah gambaran mengenai gejala penyimpangan terhadap prinsip konstitusionalisme dalam sistem politik liberal, yang pernah memudahkan arti dan peranan partai politik dalam pembangunan nasional.

Lahirnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sebenarnya merupakan momentum



sejarah yang diharapkan untuk mengembalikan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Prof. Usep Ranawijaya SH sebagai mantan Sekjen Konstituante menyatakan, bahwa konsep demokrasi dipimpin sebenarnya dimaksud tidak hanya sebagai penolakan terhadap paham liberalisme berdasarkan UUD Republik Indonesia tahun 1950, akan tetapi juga terhadap paham-paham politik lainnya seperti sistem politik otoriter, oligarchi, fasisme, komunisme dan sebagainya.<sup>2</sup> Untuk memperkuat pendapatnya bahwa maksud semula dari demokrasi dipimpin adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, ilmuwan tersebut menunjuk pada amanat Presiden Soekarno kepada Konstituante pada tanggal 22 April 1959, di mana dijelaskan bahwa demokrasi dipimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh Pancasila sebagai *guiding principle*. Sebaliknya, ada pepatah yang mengatakan bahwa *you cannot escape history*.

Jelasnya, meskipun Presiden Soekarno sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa "demokrasi dipimpin" itu adalah demokrasi yang dipimpin oleh *guiding principle* yaitu Pancasila, namun dalam praktek terulang kembali penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dengan kenyataan ini telah dibuktikan kebenaran dari pepatah tersebut di atas, yaitu bahwa proses sejarah yang membawakan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dielakkan oleh bangsa Indonesia, termasuk Bung Karno sendiri.

Adapun faktor-faktor yang mendorong perkembangan sejarah politik termaksud dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam suatu Sidang MPRS diambil keputusan yang menetapkan Bung Karno sebagai

"Presiden seumur hidup" disertai titel "Pemimpin Besar Revolusi." Sebagai dampak dari sanjungan yang diperolehnya dari segenap lapisan masyarakat, Bung Karno mengira bahwa semua tindakannya dibenarkan oleh rakyat, termasuk kebijaksanaannya yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila.

Sebagai konsekuensi dari titel "Pemimpin Besar Revolusi" yang diberikan oleh MPRS, Presiden Republik Indonesia pertama itu menetapkan bahwa lembaga-lembaga tinggi negara, partai-partai politik dan Pemerintah merupakan "alat revolusi" dan harus tunduk pada komando Presiden. Karena partai-partai politik menganggap dirinya juga sebagai "alat revolusi," maka para pemimpinnya juga harus mematuhi atau tunduk pada komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, meskipun isi komando itu dinilai berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.

Adapun timbulnya loyalitas mutlak terhadap Pemimpin Besar Revolusi itu terdorong oleh beberapa faktor, yaitu antara lain: timbulnya budaya politik yang diwujudkan dalam sikap "Asal Bapak Senang" (ABS) dan adanya kekhawatiran menerima tuduhan atau fitnahan tertentu, sehingga dapat membawa kecelakaan bagi manusia yang bersangkutan.

Dengan mudahnya sikap keterbukaan, maka perkembangan politik menjurus ke sistem otoriter. Dapat dipahami praktek kehidupan politik yang menjurus ke sistem otoriter menghambat perwujudan hak-hak asasi dan kebebasan yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, di mana para pemimpin partai-partai politik juga terdorong untuk mengabaikan asas dan tujuan partai politik, yaitu sebagai organisasi penyalur aspirasi masyarakat dan lembaga pembela kepentingan

<sup>2</sup>Lihat Usep Ranawijaya, *Hukum Tatanegara Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 1983), hal. 57.



an rakyat. Hal-hal itulah yang menyebabkan partai-partai politik tidak dapat berperan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan politik.

Di samping hal-hal tersebut, demokrasi terpimpin yang seharusnya mendorong pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, juga membawakan dampak perpecahan di dalam tubuh sementara partai politik. Konstataasi itu diungkapkan berdasarkan kejadian-kejadian tragis yang dialami oleh warga PNI-Front Marhaenis.

Jelasnya, perpecahan itu terjadi setelah timbul perbedaan pendapat tajam antara satu kelompok yang berhaluan "radikal revolusioner" sesuai dengan garis kebijaksanaan Pemimpin Besar Revolusi dan kelompok lainnya yang hendak tetap berpijak pada asas Marhaenisme ajaran Bung Karno pada tahun 1927. Singkatnya, gagasan golongan "radikal revolusioner" yang ditenatang oleh kelompok Pancasilais ialah gagasan yang berbunyi: "Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia."

Tragisnya, kelompok yang mempertahankan asas PNI yaitu Marhaenisme, karena dianggap sejiwa dengan Pancasila, kemudian dinilai sebagai warga partai yang dihindangi oleh penyakit *komunisto phobia*, dan oleh karenanya dianggap bersikap anti Bung Karno. Bahkan, pendapat dan penilaian dari kelompok yang "radikal revolusioner" itu diikuti suatu tindakan yang gegabah, yaitu melakukan tindakan pemecatan massal terhadap kawan separtainya yang hendak menegaskan kebenaran. Perpecahan menjadi lebih parah, setelah tindakan gegabah itu dilawan oleh kelompok Pancasilais dengan cara membentuk DPP-PNI tandingan. Jelaslah kiranya bahwa perpecahan dalam tubuh PNI-Front Marhaenis, sebagai

ekses dari pelaksanaan demokrasi terpimpin, membuat partai tersebut tidak dapat berperan dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan politik.

Demikian itulah gambaran mengenai mudarnya arti partai-partai politik dan peranan para pemimpinnya dalam kurun waktu yang disebut "Orde Lama."

## Arti Partai Politik di Zaman Orde Baru

"Orde Baru" adalah suatu tatanan pemerintahan yang bertekad untuk menegakkan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Para pengamat politik memahami bahwa garis kebijaksanaan baru demikian, yang dibarengi dengan semboyan: "Politik, No dan Ekonomi, Yes" merupakan reaksi terhadap garis kebijaksanaan pemerintah Orde Lama, yang membawakan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 dan mendorong potensi PKI menjadi kuat, sehingga pada tanggal 30 September 1965 berani menjalankan "kup" yang gagal, peristiwa mana tercatat dalam sejarah sebagai Peristiwa G-30-S/PKI.

Sebaliknya, mengingat perkembangan kehidupan partai-partai politik selama dua dasawarsa hingga kini dan mengingat pula dampak dari gelombang pembaruan serta tuntutan mengenai "keterbukaan" yang terdengar dalam masyarakat, kita perlu memiliki keberanian untuk mawas diri dan mengkaji secara jujur dan obyektif apakah cita-cita Orde Baru seperti dikemukakan di atas sudah terwujud sepenuhnya atau belum.

Pengkajian itu adalah perlu bahkan urgen, mengingat anjuran dari nenek moyang agar kita menarik pelajaran dari pengalaman sejarah. Di samping itu, para pengemban ide perlu melaksanakan amanat



Presiden Soeharto pada Pembukaan Musyawarah Nasional Golkar dan pada Peringatan Hari Pers Nasional beberapa waktu yang lalu, di mana dianjurkan agar kita melaksanakan pembaruan.

Jelasnya, intisari gagasan Presiden tentang pembaruan adalah sebagai berikut:

Pembaruan meliputi hal-hal yang bermanfaat, yang selama ini kita raih, agar serasi dan sepadan dengan tujuan kemajuan zaman, serta pengembangan hal baru yang berguna dan memang dibutuhkan dalam mengarungi masa depan.

Mengingat anjuran Presiden Soeharto tersebut dan dalam rangka menarik pelajaran dari pengalaman sejarah, maka tibalah waktunya bagi semua pengemban ide, khususnya para penyelenggara negara, termasuk pimpinan ABRI, untuk berupaya mencegah kelemahan dan kesalahan yang pernah dilakukan dalam zaman Orde Lama. Jelasnya, kita harus benar-benar melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dengan menggunakan isi pidato Kepala Negara itu sebagai patokan, pertanyaan yang harus kita jawab ialah: "apakah pembangunan politik, khususnya perkembangan partai-partai politik selama dua dasawarsa ini sudah sesuai dan sepadan dengan kemajuan zaman serta sudah membawakan pengembangan hal baru yang berguna dan memang dibutuhkan dalam mengarungi masa depan?"

Dalam rangka menjawab pertanyaan itu, pertama-tama perlu dikaji praktek pelaksanaan beberapa undang-undang bidang pembangunan politik antara lain:

- a. UU No. 1/1985 tentang Pemilihan Umum
- b. UU No. 3/1985 tentang Parpol dan Golkar
- c. UU No. 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan dalam UU No. 3/1975 juncto UU No. 3/1985 menyebutkan bahwa, baik kedua partai politik, yaitu PPP dan PDI maupun Golkar, kesemuanya merupakan kekuatan sosial politik yang sama dan sederajat. Akan tetapi, jika dinilai secara obyektif pelaksanaan dari undang-undang tersebut dalam praktek, maka akan tampak ketimpangan mengenai eksistensi Golongan Karya di satu pihak dan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia di lain pihak.

Ketimpangan termaksud menjadi jelas, jika masalahnya dikaji berdasarkan amanat *Founding Fathers* Republik Indonesia seperti dijelaskan di atas. Kongkritnya Golkar, yang dipimpin oleh pejabat-pejabat Pemerintah atau Perwira-perwira ABRI (purnawirawan), memperoleh bantuan, dukungan dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan ABRI. Kenyataan itulah yang dinilai oleh masyarakat tidak sesuai dengan amanat *Founding Fathers* Republik Indonesia dan bertentangan dengan prinsip kebersamaan dan keadilan.

Sebagai akibat dari ketimpangan seperti dijelaskan di atas, demikian pula jika diteliti siapa-siapa yang bertindak sebagai juru kampanye dalam pemilihan umum, baik dari Golkar maupun dari PPP/PDI, maka kita akan berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip mengenai pemilihan umum yaitu: "langsung, umum, bebas dan rahasia" serta prinsip pemilu yang "jujur dan adil" tidak sepenuhnya ditegakkan.

Mengingat maksud dan tujuan tulisan ini, Penulis mengharapkan pengertian para penyelenggara negara terhadap penilaian warga masyarakat (kecuali warga Korpri dan Golkar), bahwa pelaksanaan UU tentang Parpol dan Golkar serta UU yang mengatur pemilihan umum yang sekarang diterapkan akan tetap mendorong Golkar



untuk menduduki posisi dominan dalam per-caturan politik. Akibatnya, ialah bahwa partai politik dan peranan para pemimpinnya dalam pembangunan nasional jangka 25 tahun mendatang akan tetap minimum.

Di samping hal-hal tersebut, maka posisi dominan Golkar juga disebabkan pelaksanaan UU tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menimbulkan ketimpangan. Jelasnya, masyarakat melihat sebagai kenyataan bahwa ada sementara organisasi kemasyarakatan seperti: Kosgoro, MKGR, Korpri, Pepabri dan lain sebagainya bernaung di bawah panji-panji Golkar. Sebaliknya, kedua partai politik -- sesuai dengan ketentuan yang berlaku -- tidak lagi memiliki ormas-ormas sebagai *onderbouw* dari partai yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut diungkapkan dalam karangan ini, mengingat bahwa pelestarian posisi dominan dari Golkar untuk masa-masa mendatang dapat menjurus ke arah sistem politik yang "monopolitik" atau "otoriter," hal mana bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mengingat penjelasan seperti dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ada perbedaan yang menyolok antara bunyi ketentuan dalam tiga undang-undang yang mengatur pembangunan politik dengan pelaksanaannya dalam praktek. Penyimpangan terhadap prinsip Konstitusionalisme itu timbul karena adanya kecurigaan Pemerintah Orde Baru terhadap sikap partai politik, yang -- pada zaman Orde Lama -- pernah memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Di samping itu, ada semacam praduga bahwa kedua partai politik itu akan menghambat garis kebijaksanaan Pemerintah untuk menyukseskan pembangunan ekonomi.

Mengingat hal-hal tersebut, timbul suatu perkiraan bahwa strategi politik yang dite-

rapkan Pemerintah lewat beberapa undang-undang bidang pembangunan politik, yang nota bene disetujui oleh pemimpin partai-partai politik yang duduk dalam DPR, tampaknya memang bertujuan untuk melestarikan posisi dominan Golkar, agar kekuatan sosial politik itu tetap merupakan pendukung utama Pemerintah yang tidak tergo-yahkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka akan terus diupayakan supaya Golkar tetap unggul dalam pemilu-pemilu yang akan diselenggarakan dalam waktu-waktu mendatang. Sehubungan dengan strategi politik itulah, maka Pemerintah dan ABRI hingga sekarang tetap memberikan bantuan, dukungan dan fasilitas kepada Golkar.

Mengingat kuatnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dan ABRI kepada Golkar, maka diperkirakan partai-partai politik tidak akan mampu bersaing dengan Golkar dan tidak akan dapat meniadakan keganjilan tersebut dengan segala dampaknya yang dapat menghambat stabilitas nasional dan derap laju pembangunan.

Akhirnya, perlu dikemukakan suatu persoalan lain yaitu "massa mengambang," mengingat hal itu juga merupakan faktor yang menyebabkan arti partai politik tetap kecil dan lemah serta tidak dapat mengimbangi posisi Golkar yang dominan. Penjelasaannya adalah sebagai berikut.

Rakyat yang bertempat tinggal di desa dan kecamatan dan yang ditetapkan sebagai *floating mass* atau "massa mengambang" -- berdasarkan budaya panutan -- lebih banyak akan mengikuti petunjuk Pamong Praja, yang sekaligus menjadi pimpinan Korpri sebagai organisasi yang berafiliasi pada Golkar. Hal ini dengan sendirinya merupakan faktor yang akan tetap menciptakan situasi tidak adanya keseimbangan antara posisi dan peranan kedua parpol di satu pihak dan Golkar di lain pihak.



Jelaslah kiranya bahwa, jika keadaan yang pincang karena tidak dipatuhinya prinsip keadilan dan kebersamaan itu berjalan terus, maka peranan partai politik baik dalam pembangunan nasional maupun dalam pembangunan politik untuk masa-masa mendatang akan tetap minim sekali.

Mengingat beberapa faktor yang memungkinkan posisi dominan Golkar pada dasarnya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka Penulis menganjurkan agar masalah-masalah tersebut sebaiknya diperhatikan oleh setiap eksponen Orde Baru yang bertekad untuk mewujudkan ikrar seperti dikemukakan dalam permulaan karangan ini.

### **Faktor-faktor yang Menyebabkan Lemahnya Partai Politik**

Di bawah ini akan dibahas faktor-faktor yang menyebabkan partai politik kurang berperan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam upaya pembaruan politik. Kongkritnya, selama dua dasawarsa ini dalam perkembangan politik di Indonesia, PPP dan PDI tidak berdaya atau kurang dapat mewujudkan gagasan-gagasan konseptual dan inovatif dalam mengatasi masalah-masalah politik yang krusial, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partai politik menjadi tidak berkembang sesuai dengan arti dan fungsinya dalam demokrasi Pancasila, akan dibahas di bawah ini.

### **Faktor Intern**

Sebagai hasil observasi, dapat dinyatakan bahwa kelemahan partai politik terutama disebabkan oleh adanya friksi atau kericuhan yang sering dialaminya. Kericuhan yang sering melanda sementara partai politik itu antara lain disebabkan, karena tipe pemimpin partai politik zaman sekarang tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat perjuangan seperti disandang oleh pemimpin partai politik zaman dahulu.

Jelasnya, masyarakat menilai sementara pemimpin partai sekarang kurang menunjukkan ketekunan atau kesediaan berkorban dalam mengabdikan pada kepentingan rakyat. Sebaliknya, justru ada gejala timbulnya rivalitas yang disebabkan oleh ambisi untuk menduduki kursi yang terhormat dalam masyarakat. Sebagai akibatnya, friksi terjadi karena perbedaan kepentingan pribadi, ditambah dengan adanya campur tangan oleh kekuatan ekstern.

Karena pemimpin partai politik kurang mampu menjalankan fungsi politiknya, maka organisasi itu tidak dapat melaksanakan sosialisasi politik, partisipasi politik, perekrutan politik, komunikasi politik dan artikulasi kepentingan, hal mana diperlukan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Mereka juga tidak memiliki pandangan futurologis dan kurang memiliki pemikiran konseptual untuk dijadikan bahan pembuatan kebijaksanaan pada tingkat eksekutif atau dalam melaksanakan tugasnya di DPR.

Adapun faktor-faktor lain yang merupakan kendala bagi tumbuhnya partai politik yang kuat, tegar dan mandiri, ialah karena kurangnya kemampuan organisatoris, kurangnya dana dan belum tumbuhnya jiwa



profesionalisme dalam bidang kehidupan politik modern.

## Faktor Ekstern

Salah satu faktor yang mengganggu ketahanan nasional dan yang menyebabkan melemahnya partai-partai politik ialah adanya infiltrasi dari kekuatan yang berasal dari luar negeri dan adanya campur tangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara negara terhadap kehidupan partai-partai politik.

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional, perlulah diungkapkan kembali fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa beberapa kekuatan luar negeri pernah menjalankan infiltrasi terhadap masyarakat Indonesia, termasuk terhadap partai-partai politik. Misalnya, dalam peristiwa pemberontakan PRRI-Permesta beberapa tokoh politik dan oknum-oknum ABRI terjebak, keterlibatan CIA sangat menyolok. Hal itu dibuktikan dengan adanya *dropping* senjata "bazooka" di Sumatera Barat, serta petualangan Lawrence Pope yang menembaki pasar-pasar di Maluku pada saat-saat terjadinya peristiwa PRRI-Permesta.

Kemudian, terjadinya pemberontakan DI-TII atau kasus-kasus tindak pidana subversi di Lampung dan daerah-daerah lain, tampaknya tidak lepas dari kaitannya dengan kaum fundamentalis dari negara-negara Islam tertentu.

Adapun kekuatan yang sangat jelas berupaya menanamkan pengaruhnya di Indonesia adalah kaum komunis internasional. Contohnya, pada zaman penjajahan gerakan komunis internasional telah berhasil memecah belah Partai Sarekat Islam. Pada tahun 1948 -- sewaktu bangsa Indonesia sedang menjalankan perlawanan terhadap

NICA -- maka PKI sebagai agen gerakan komunis internasional telah memberontak terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Bahkan pada akhir bulan September 1965, PKI telah menjalankan kup yang terkenal dengan Peristiwa G-30-S/PKI.

Singkatnya, Peristiwa G-30-S/PKI merupakan tragedi nasional, di mana beberapa perwira tertinggi dan perwira menengah lainnya terbunuh secara kejam hingga mereka wajar memperoleh gelar *Pahlawan Revolusi*. Karena dalam zaman "proloog" G-30-S/PKI, kekuatan komunis itu mengadakan infiltrasi tidak hanya dalam tubuh ABRI dan birokrasi tetapi juga dalam tubuh sementara partai politik, maka "epilog" G-30-S/PKI membawakan situasi yang rawan. Jelasnya, keadaan yang demikian itu dianggap mengganggu stabilitas nasional; padahal stabilitas nasional itu merupakan prasyarat bagi suksesnya pembangunan nasional.

Masyarakat menyadari bahwa -- untuk memulihkan stabilitas nasional -- perlu diterapkan suatu kebijaksanaan yang disebut *security approach*. Karena ada suatu praduga bahwa sementara partai politik juga terkena infiltrasi PKI, maka terjadilah campur tangan atau intervensi aparaturnya Pemerintah terhadap kehidupan partai-partai politik. Dilakukannya campur tangan aparaturnya Pemerintah berlandaskan *security approach* terhadap kekuatan sosial politik itu juga didorong oleh timbulnya friksi yang tajam di kalangan partai-partai politik yang bersangkutan.

Adapun latar belakang dari timbulnya pertentangan itu adalah sebagai berikut. Zaman peralihan dari masa Orde Lama menuju masa Orde Baru membawakan pergeseran terhadap nilai-nilai Pancasila dan norma-norma kehidupan masyarakat, sehingga sekaligus juga menimbulkan dampak negatif



terhadap kehidupan partai-partai politik. Seperti halnya pada waktu transisi dari zaman demokrasi liberal menurut UUD Sementara tahun 1950 ke zaman demokrasi terpimpin, terjadilah perbedaan pendapat. Ada kelompok dalam partai yang mendukung Orde Baru "tanpa reserve" dan ada pula kelompok yang bersikap korektif konstruktif terhadap kebijaksanaan yang ditentukan oleh Pemerintah.

Tragisnya, dalam suasana transisi itu terulang kembali eksese-eksese dalam sikap dan perilaku dari oknum-oknum partai, yang bersikap "ABS." Dengan harapan bahwa memberikan "dukungan tanpa reserve" terhadap Pemerintah Orde Baru akan memperoleh peluang untuk menduduki posisi yang mapan, maka mereka menuduh kelompok yang bersikap korektif konstruktif sebagai manusia-manusia yang menentang Presiden Soeharto dan Orde Baru.

Jelaslah kiranya, bahwa pertentangan dalam tubuh partai politik yang bersangkutan itu dianggap mengganggu stabilitas nasional yang diperlukan bagi suksesnya pembangunan. Pertentangan dalam tubuh partai politik itulah yang mengundang campur tangan aparatur Pemerintah terhadap kehidupan Partai Nasional Indonesia. Adapun tujuannya ialah agar partai yang bersangkutan itu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dianggap loyal terhadap Pemerintah.

Dengan latar belakang campur tangan kekuatan ekstern terhadap kehidupan kepartaian itulah yang membawa dampak: kurang adanya peranan partai-partai politik yang seharusnya menegaskan kemandirian dan kedewasaan demi suksesnya pembangunan politik dan suksesnya pembangunan nasional.

## Tantangan dan Jawaban

Jika kita menyadari luasnya dan sulitnya pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua yang harus dilaksanakan berdasarkan GBHN 1988 melalui Pelita VI dan seterusnya, kita juga berkesimpulan bahwa tugas yang dihadapi oleh Pemerintah, pemimpin-pemimpin masyarakat, termasuk pimpinan partai-partai politik adalah tidak ringan. Untuk memperoleh gambaran mengenai luasnya pembangunan nasional, kita perlu ingat bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses dinamik yang merupakan rangkaian upaya bangsa Indonesia dan Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa tujuan pembangunan nasional ialah untuk meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan kemajuan dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Perlu ditambahkan bahwa misi partai-partai politik secara khusus ialah untuk memantapkan demokrasi Pancasila, menyempurnakan manajemen nasional atas sumber daya manusia dan sumber daya alam serta untuk menciptakan tata nilai. Kesemuanya itu adalah dalam rangka membangun masyarakat adil makmur yang berkeadilan sosial.

Lagipula, dengan memperhitungkan adanya dampak dari faktor-faktor baik dari dalam negeri, seperti meningkatnya kesadaran politik dan tuntutan akan keterbukaan dan pembaruan, maupun pengaruh dari peredaran politik internasional, dapat diperkirakan bahwa permasalahan yang akan kita hadapi cenderung makin kompleks; spektrumnya makin luas; interrelasi dan interaksi antara permasalahan yang satu dengan yang lain makin kuat dan batas antara permasa-



lahan bidang yang satu dengan permasalahan yang lain semakin kabur.

Misalnya, permasalahan bidang ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya secara teknis-ekonomis belaka, tetapi perlu dibarengi dengan pendekatan terhadap tuntutan masyarakat untuk membenahi ketimpangan dalam bidang politik, perlunya penerapan nilai-nilai luhur, atau sinkronisasi peranan ABRI dengan upaya memantapkan demokrasi Pancasila. Semuanya itu menunjukkan beratnya *tantangan* yang harus dijawab oleh penyelenggara negara, pimpinan ABRI, dan para pemimpin masyarakat, termasuk pengurus partai-partai politik.

Untuk dapat memberikan *response* yang tepat terhadap *challenge* seperti digambarkan di atas, maka GBHN menentukan pula bahwa sasaran utama dalam pembangunan nasional ialah menciptakan kualitas manusia dan menumbuhkan *quality of social life*. Adapun untuk menciptakan *quality of social life* diperlukan dua syarat yaitu: (a) kemampuan untuk mewujudkan masyarakat di mana warganya menikmati kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum; (b) tersedianya peluang bagi partisipasi politik masyarakat dalam proses demokratisasi sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Demikian itulah gambaran mengenai tantangan-tantangan yang memerlukan jawaban yang tepat. Mengingat bahwa pengurus partai-partai politiklah yang harus memberikan *response* atas *challenge* termaksud, untuk mengubah nasib partai-partai politik, maka timbullah pertanyaan: "apakah pengurusnya akan mampu memberikan jawaban yang tepat atas tantangan tersebut?".

Berdasarkan penilaian yang obyektif ter-

hadap situasi dan kondisi parpol sekarang, setiap pengamat politik -- dengan rasa prihatin -- akan berkesimpulan bahwa -- tampaknya -- peranan partai politik dalam pembangunan nasional adalah minim sekali.

## Perlunya Pelaksanaan Pembaruan Sedin Mungkin

Negara Republik Indonesia ini milik kita semua, yaitu mereka yang duduk dalam pemerintahan, ABRI, para pengusaha, semua kekuatan sosial politik dan rakyat kecil. Berdasarkan filsafah hidup ini kita semua mempunyai kewajiban membenahi permasalahan yang dipaparkan dalam tulisan ini.

Berpangkal tolak dari gagasan Presiden mengenai pembaruan seperti dikutip di atas, maka di bawah ini akan disajikan beberapa butir pemikiran sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan peranan partai-partai politik.

1. Sejarah masa lalu yang penuh dengan pengalaman mengandung pelajaran yang bernilai. Oleh karenanya, kita semua hendaknya mampu menarik pelajaran dari sejarah. Sikap yang salah tanpa diikuti oleh upaya memperbaikinya, akan menjadi bumerang yang akan mengakhiri masa kejayaan hari ini, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang datangnya selalu terlambat. Maka hendaknya kita semua berani mawas diri. Mungkin saja belum terlambat dalam meningkatkan peranan partai-partai politik, apabila kita semua memulai dari satu titik mawas diri.
2. Peranan partai-partai politik akan dapat ditingkatkan, jika Pemerintah serta ABRI -- secara sungguh-sungguh -- mengusahakan agar timbul keseimbangan



mengenai kedudukan dan peranan dari Golkar di satu pihak dan kedua parpol di pihak lain; sekaligus dengan menciptakan keadilan dan kebersamaan dalam perlakuan terhadap sesama kekuatan sosial politik.

3. Untuk masa-masa mendatang, penerapan dwifungsi ABRI dan fungsinya sebagai stabilisator dan dinamisator perlu disesuaikan dengan upaya memantapkan demokrasi Pancasila, mengingat aspirasi masyarakat dan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Sesuai dengan amanat *Founding Fathers* Republik Indonesia seperti disinggung di atas, hendaknya Negara, Pemerintah termasuk ABRI, berdiri di atas semua golongan dan tidak hanya menjadi pendukung dari golongan yang paling besar atau paling kuat. Pemerintah dan ABRI hendaknya lebih memberi peluang kepada rakyat untuk menikmati kebebasan dan hak-hak asasi warga-negara, untuk mendorong masyarakat agar menjadi lebih kreatif, produktif dan inovatif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.
4. Demi memantapkan arti dan fungsi *Supra Struktur Politik* hendaknya diusahakan agar hubungan fungsional antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Konstitusionalisme*, dengan pengertian bahwa semua pihak harus menegakkan dan mengamankan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Pancasila, berkedaulatan rakyat dan Negara Hukum.
5. Semua pengemban ide, khususnya para penyelenggara negara termasuk ABRI dan para pemimpin masyarakat, perlu memberikan contoh dan suri teladan dalam hal pengamalan nilai-nilai luhur dari Pancasila dan UUD 1945, khususnya *Ji-*

*wa, Semangat dan Nilai-nilai Angkatan '45, untuk menegakkan citra Strong, Clean, and Stable Government.*

## Penutup

Masyarakat pada umumnya menerima dan menghargai pelaksanaan pembangunan nasional oleh Pemerintah yang menghasilkan stabilitas nasional, beberapa proyek industri, sarana komunikasi dan transportasi, peningkatan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita juga tidak boleh melupakan bahwa -- untuk masa-masa mendatang -- masih banyak permasalahan krusial yang perlu diatasi, baik yang merupakan permasalahan baru maupun problema-problema nasional yang belum teratasi dalam pembangunan selama empat Pelita.

Mengingat konstataasi tersebut, maka kurun waktu selama Pelita V yang menyongsong datangnya saat tinggal landas merupakan masa transisi. Jelasnya, dalam periode ini perlu diletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembaruan di berbagai bidang kehidupan negara dan masyarakat, usaha mana perlu pula dibarengi dengan sikap keterbukaan oleh semua pihak. Lagipula, sehubungan dengan proses alih generasi, maka Angkatan '45 yang kini berperan, baik di bidang *Suprastruktur Politik* dan *Infra Struktur Politik* maupun di sektor-sektor lain, harus siap menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada generasi penerus.

Berdasarkan ramalan dari pakar-pakar yang berpandangan futurologis, seperti Alvin Toffler dan lain-lain, para pengamat politik mengingatkan bahwa masyarakat kita sebagai negara berkembang mungkin akan mengalami kejutan, jika gelombang zaman industri -- zaman informatika serta gelombang pembaruan -- tidak ditanggapi secara



wajar oleh tokoh-tokoh yang kini mengendalikan pemerintahan. Jelasnya, jika permasalahan krusial yang dirinci dalam karangan ini tidak teratasi, kita khawatir bahwa -- pada suatu saat -- keresahan mungkin akan meningkat sedemikian rupa, sehingga akan membawa kejutan dalam bentuk gejolak sosial, seperti yang terjadi di berbagai negara.

Perlu dijelaskan bahwa tulisan ini dimaksudkan sekedar untuk menyumbangkan *urun rembug* kepada *idee dragers* (pengembangan ide) baik di kalangan Pemerintah, ABRI, pakar-pakar di kalangan birokrasi, dan kekuatan sosial politik untuk direnung-

kan. Penulis tidak berpretensi untuk mengatakan bahwa gagasan atau pendapat yang terkandung dalam tulisan ini adalah berobot. Sebaliknya, Penulis hanya mengingatkan: andaikata masalah-masalah krusial yang dijelaskan dalam tulisan ini tidak diatasi secara tuntas dan jika dikemudian hari timbul gejolak sosial, maka sejarah akan mencatat bahwa yang dinyatakan bertanggungjawab mengenai kejadian dramatis itu tentunya para penyelenggara negara yang -- antara tahun 1989 sampai permulaan abad ke-21 -- memegang tampuk kepemimpinan, baik dalam Pemerintahan, dalam ABRI, maupun dalam kekuatan sosial politik.



# Problematic Parpol di Indonesia: Kasus PDI

*M. Riza SIHBUDI*

## Pendahuluan

**D**IBANDINGKAN tiga pemilu sebelumnya pada masa Orde Baru (1971, 1977, dan 1982), dalam Pemilu 1987 yang baru lalu jumlah suara maupun kursi DPR yang diraih Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mengalami kenaikan yang cukup berarti. Bahkan jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 1982, kenaikan yang dicapai PDI dalam Pemilu 1987 mengejutkan banyak kalangan, termasuk di kalangan tokoh-tokoh PDI sendiri. Bila dalam Pemilu 1982 partai ini hanya meraih 7,88% suara dan 24 kursi DPR, maka pada Pemilu 1987 PDI berhasil meraih 10,87% suara serta 40 kursi DPR.<sup>1</sup>

Keberhasilan PDI tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor, seperti banyaknya eks pendukung PNI yang "pulang kandang," adanya dukungan dari generasi muda, sikap ABRI yang lebih netral, dan lain sebagainya.

<sup>1</sup>Laporan Pemilu Tahap II, PPM-LIPI/Depdagri, hal. 253-254. Juga hasil-hasil yang diraih PDI dalam Pemilu-pemilu 1971 dan 1977.

Sebagai satu organisasi politik yang dalam sejarahnya tak pernah lepas dari masalah pertentangan di kalangan pemimpinnya, keberhasilan ini tentu saja diharapkan akan membawa angin segar dalam tubuh PDI. Dalam ruang lingkup (*scope*) yang lebih luas, makin kuatnya PDI juga diharapkan akan menjadi salah satu pemacu guna mempercepat proses "demokratisasi" di negara kita.

Namun, bila dilihat dari apa yang terjadi dalam Kongres PDI III (April 1986) serta kasus tiga calon anggota DPR dari Fraksi PDI yang tidak mau tunduk pada peraturan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDI, maka partai ini sebenarnya masih memendam potensi konflik yang setiap saat bisa muncul ke permukaan. Bila ini terjadi, akan membubarkan kepercayaan yang telah diberikan oleh pendukung PDI selama masa Pemilu 1987 yang lalu.

Potensi konflik hanya salah satu masalah yang dihadapi partai ini. PDI tampaknya masih akan dihadapkan pada sejumlah masalah lain, seperti masalah identitas partai



(khususnya sejak diberlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya asas), serta hubungan partai ini dengan ormas-ormas dan unsur-unsur eks pendukung PDI.

Tulisan ini akan mencoba mengkaji permasalahan dan problematika yang dihadapi PDI serta bagaimana masa depan partai ini, terutama setelah mereka cukup berhasil dalam Pemilu 1987. Data-data yang dipergunakan selain bahan-bahan tertulis, juga dilengkapi dengan penelitian lapangan dan wawancara dengan sejumlah tokoh/pimpinan PDI, ormas-ormas dan unsur-unsur eks pendukung PDI, baik di tingkat pusat maupun daerah.

## Masalah Konflik Intern

Sejak terbentuknya, 10 Januari 1973, hingga saat ini, PDI belum berhasil mengatasi masalah pertentangan di kalangan elite kepemimpinannya. Masalah konflik intern hampir selalu muncul sebagai "warna" yang paling menonjol dalam perjalanan partai ini.<sup>2</sup> Konflik di dalam tubuh PDI, sebagaimana yang terjadi dalam tubuh PPP (Partai Persatuan Pembangunan), tidak hanya mencerminkan konflik antar-unsur. Sebagaimana diketahui, sebagian besar konflik di dalam tubuh PDI justru melibatkan tokoh-tokoh yang berasal dari unsur yang sama, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia).

Hal itu menunjukkan bahwa konflik di dalam tubuh PDI mengandung dua dimensi, yaitu dimensi "konflik warisan" dan dimensi kepentingan pribadi (*vested interest*). Pada dimensi pertama ("konflik warisan"), di mana konflik di dalam tubuh PDI "diba-

wa" oleh eks pendukung PNI, terdapat dua kubu yang saling berhadapan, yaitu kubu "garis keras" dan kubu "moderat" atau bisa juga disebut sebagai kelompok "kompromis." Dalam setiap konflik yang terjadi, kubu "garis keras" selalu tersingkir. Sebaliknya kubu "moderat" selalu keluar sebagai "pemenang." Contoh yang masih hangat adalah konflik antara kelompok Sanusi-Usep ("garis keras") dan kelompok Isnaeni-Sunawar ("moderat") pada tahun 1977, yang berakhir dengan tersingkirnya kelompok Sanusi-Usep.

Namun yang perlu diingat, kemenangan kubu "moderat" atas kubu "garis keras," hampir selalu terjadi berkat campur tangan birokrasi.<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan garis kebijaksanaan pemerintah yang memang berusaha menampilkan figur-figur politik yang tidak terlalu besar komitmennya pada ideologi lain (selain Pancasila). Kubu "garis keras" pada umumnya didukung tokoh-tokoh PNI yang masih kuat komitmennya pada ideologi marhaenisme.

Dalam perkembangannya, konflik di dalam tubuh PDI juga menampilkan dimensi kepentingan pribadi. Hal ini, misalnya, terlihat jelas dalam konflik yang mewarnai PDI pada saat partai ini menyelenggarakan Kongresnya yang ketiga (15-17 April 1986). Waktu itu Kongres PDI gagal memilih ketua baru untuk menggantikan Sunawar Soekowati yang meninggal dunia empat bulan sebelumnya. Akibatnya, pemerintah -- dalam hal ini Mendagri -- "terpaksa" turun tangan.

<sup>3</sup>Mengomentari campur tangan birokrasi dalam kasus konflik Sanusi-Usep Vs. Isnaeni-Sunawar, Sanusi Hardjadinata (eks Ketua Umum PDI) mengatakan, "Dulu saya sudah bilang kepada Pak Harto supaya pemerintah terbuka, seperti saya juga selalu berusaha terbuka. Tapi nyatanya dalam kasus Isnaeni, mereka tidak terbuka." Selanjutnya lihat *Kompas*, 29 November 1978.

<sup>2</sup>*Editor*. 29 Agustus 1987, menyebut PDI sebagai partai yang gemar "bertikai"; Lihat juga Manuel Kaisieppo, "Dilema Partai Demokrasi Indonesia: Perjuangan Mencari Identitas," *Prisma* 12 (Desember 1981), hal. 68-83.



Kemudian terbentuklah DPP PDI di bawah pimpinan Ketua Umum, Soerjadi, yang "dibidani" Mendagri Soepardjo Rustam. Padahal nama Soerjadi selama berlangsungnya kongres tidak diunggulkan.<sup>4</sup> Justru yang semula dianggap sebagai "calon kuat," yaitu Hardjantho Sumodisastro (salah seorang Wakil Ketua DPR periode 1982-1987), malah tidak terpilih.

Sebenarnya kericuhan dalam Kongres III PDI terkait dengan rentetan konflik (yang berdimensi kepentingan pribadi) yang terjadi sebelumnya. Konflik tersebut terjadi antara Sunawar Soekowati dan Hardjantho yang kemudian masing-masing membentuk "kubu." Konflik Sunawar-Hardjantho bermula dari munculnya pernyataan Sunawar (dalam salah satu pidatonya di tahun 1985) bahwa negara Indonesia adalah "negara sekuler." Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan PDI sendiri maupun di kalangan masyarakat luas. Sikap pro dan kontra di kalangan PDI kemudian dipertajam dengan munculnya "masalah" Kongres III. Kubu Hardjantho menginginkan diselenggarakannya kongres sebelum Pemilu 1987. Namun ini ditolak oleh kubu Sunawar. Menurut Sunawar, kongres sebaiknya diadakan setelah pemilu, sebelum pemilu cukup diadakan muna's (musyawarah nasional) saja.<sup>5</sup> Dari sini terlihat, bahwa Sunawar di satu pihak, dengan menolak kongres, masih tetap ingin mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum DPP-PDI.

<sup>4</sup>Beberapa hari menjelang kongres, Hardjantho mengatakan bahwa Soerjadi tidak memenuhi syarat sebagai calon ketua. Ucapan senada juga dikeluarkan oleh Ketua Umum DPD-PDI DKI Jakarta, Ipik Asmasubrata. Menurut Ipik, kalau Soerjadi terpilih, ini tidak lucu, sebab hasil dorongan dari luar. Bahkan menurut sebuah sumber, hanya beberapa hari menjelang kongres, Soerjadi baru mengurus kartu anggota PDI. Lihat *Tempo*, 19 April 1986, hal. 12-13.

<sup>5</sup>*Tempo*, 18 Januari 1986, hal. 16.

Di lain pihak, ada kesan kuat bahwa Hardjantho berambisi menggeser Sunawar. Dengan munculnya isu "negara sekuler" yang merugikan nama baik Sunawar (si pencetus isu), Hardjantho setidaknya merasa mempunyai kans untuk menggantikan Sunawar dalam suatu kongres.

Konflik antara kubu Sunawar dan kubu Hardjantho agak mereda setelah meninggalnya Sunawar (Januari 1986), dan -- untuk sementara -- kubu Hardjantho tampak mendapatkan "angin," yaitu dengan diselenggarakannya kongres (bukan munas sebagaimana dikehendaki kubu Sunawar) pada bulan April 1986. Namun dalam kenyataannya, Hardjantho gagal mewujudkan ambisinya untuk menjadi Ketua Umum DPP-PDI. Hal ini membuktikan masih kuatnya pengaruh kubu Sunawar. Di samping itu, terdapat kecenderungan yang kuat baik di kalangan generasi muda PDI maupun di kalangan birokrasi untuk menampilkan tokoh yang bebas dari "noda" konflik masa lalu. Dalam konteks ini barangkali bisa dipahami mengapa Soerjadi yang akhirnya "terpilih" sebagai Ketua Umum DPP-PDI sebagai "hasil" kongres partai ini yang ketiga. Meskipun secara organik, Soerjadi tidak pernah duduk dalam kepemimpinan PDI, namun ia dikenal sebagai seorang aktivis partai yang tidak pernah terlibat dalam konflik intern yang terjadi sebelumnya.<sup>6</sup>

Tampilnya DPP-PDI di bawah Soerjadi, yang sebagian besar didukung tokoh-tokoh generasi muda, tampak menghembuskan angin segar dalam tubuh partai ini. Apalagi dengan keberhasilan PDI dalam Pemilu 1987. Tidak mengherankan bila kemudian banyak pujian dan sanjungan di alamatkan ke Soerjadi dan kawan-kawan.

Akan tetapi tidak berarti konflik intern

<sup>6</sup>*Tempo*, 19 April 1986, hal. 12-13.



dalam tubuh PDI telah berakhir. Tidak sedikit tokoh-tokoh tua, terutama tokoh-tokoh eks PNI, dengan alasan yang bervariasi, kurang begitu senang dengan tampilnya generasi Soerjadi. Sebagian disebabkan karena faktor kepentingan pribadi. Sebagian lagi disebabkan DPP-PDI sekarang dinilai "terlalu dekat dengan penguasa," seperti pernah oleh eks tokoh PNI, Manai Sophian.<sup>7</sup> Juga ada tokoh PDI yang kurang senang dengan manajemen partai yang diterapkan DPP sekarang.<sup>8</sup> Dan, yang tak kalah pentingnya, muncul kesan bahwa "prinsip-prinsip musyawarah" belum sepenuhnya dijalankan oleh DPP-PDI di bawah Soerjadi.<sup>9</sup>

Hal-hal di atas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik intern di dalam tubuh PDI masih tetap potensial, yang sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan. Sebagai contoh, munculnya kasus DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PDI "tandingan" di Bandung, hanya sekitar setengah tahun setelah berakhirnya Kongres III. Kasus ini bermula dari tindakan DPP-PDI yang mengangkat Dodo Gandamihardja sebagai Pjs. Ketua DPC-PDI Kodya Bandung, Agustus 1986. Padahal Ketua DPC-PDI Kodya Bandung waktu itu, Tarwia Sutendi, belum diberhentikan atau dipecat. Dalih yang dipakai DPP untuk mengangkat Dodo Gandamihardja, adalah dalam rangka reorganisasi dan restrukturisasi PDI Bandung. Tarwia Sutendi yang menilai tindakan

DPP itu sebagai sewenang-wenang, berhasil menghimpun sekitar 80 tokoh PDI Bandung. Pada tanggal 1 Oktober 1986, mereka (Tarwia dan kawan-kawan) mengirimkan surat protes ke alamat DPP-PDI. Isinya, mereka menganggap pengajuan calon-calon anggota DPR dan DPRD (yang diajukan DPD Jawa Barat dan DPC Bandung) sebagai "dilakukan tanpa didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat."<sup>10</sup> Tarwia kemudian dipecat sebagai anggota partai oleh DPP. Namun, enambelas Komisariat PDI yang ada di Bandung segera menyatakan berdiri di belakang Tarwia dan masih mengakuinya sebagai Ketua DPC yang sah. Kasus ini berakhir dengan Hijrahnya 26.328 warga PDI (dipimpin Tarwia dan kawan-kawan) ke Golkar.<sup>11</sup>

Contoh lain dari masih adanya potensi konflik di tubuh PDI, adalah "pembangkangan" tiga anggota DPR Fraksi PDI terhadap keputusan DPP-PDI No. 059/1986. Ini merupakan konflik intern pertama yang "meletus" setelah Pemilu 1987. SK DPP-PDI No. 059/1986 antara lain berisi: masa tugas anggota DPR F-PDI dibatasi hanya dua kali (dua periode) saja. Alasannya, untuk memberi kesempatan kepada generasi yang lebih muda. Mereka yang telah dua kali menjalani masa tugas (selama 10 tahun) di DPR, akan ditarik kembali ke partai. Dengan demikian, diharapkan partai akan menjadi kuat karena diasuh orang-orang yang berpengalaman.<sup>12</sup>

Akan tetapi pelaksanaan SK DPP-PDI No. 059/1986 ternyata tidak berjalan de-

<sup>7</sup>Wawancara dengan Manai Sophian, Jakarta, 27 Juli 1987.

<sup>8</sup>Hardjantho, misalnya menilai DPP-PDI sekarang mengelola partai "bak seorang manajer mengurus ekspedisi muatan kapal laut, padahal mengurus partai lain dari mengurus barang." *Tempo*, 17 Januari 1987, hal. 13-14.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Supomo salah seorang pimpinan Pemuda Demokrat Sumatera Utara, Medan, 7 September 1987.

<sup>10</sup>*Tempo*, 29 November 1986, hal. 13.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Alasan ini dikemukakan oleh Nico Daryanto sebagai Sekjen DPP-PDI. Lihat *Tempo*, 20 September 1986, hal. 22-23.



ngan mulus. Tiga di antara sejumlah anggota DPR F-PDI yang terkena SK tersebut, tidak bersedia mengundurkan diri. Mereka adalah: Kemas Fachruddin (Ketua DPD-PDI Sumatera Selatan), J.C. Palaoensuka (Ketua DPD-PDI Kalimantan Barat), dan Achmad Subagio (tokoh PDI dari Jawa Tengah).<sup>13</sup> Fachruddin dan Subagio berasal dari unsur PNI. Sedangkan Palaoensuka dari Partai Katolik. Mereka menganggap bahwa secara konstitusi pencalonan mereka sebagai anggota DPR tetap sah, karena mereka dicalonkan musyawarah cabang dan DPP-PDI.<sup>14</sup>

Yang menarik dari kasus "pembangkangan" ini, adalah: *pertama*, bahwa "pembangkangan" dilakukan oleh mereka yang tergolong tokoh-tokoh tua. Dua di antara ketiganya masih memegang jabatan sebagai Ketua DPD, dan dua di antara ketiganya berasal dari unsur PNI. *Kedua*, adanya pengakuan bahwa mereka tidak diberitahu oleh DPP-PDI, bahwa pencalonan mereka hanya sekedar sebagai *vote getter* (pengumpul suara) saja.<sup>15</sup> Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa dimensi "konflik warisan" dan dimensi kepentingan pribadi masih tetap mewarnai dalam konflik intern PDI yang "terbaru" sekalipun. Juga memperkuat sinyalemen bahwa "prinsip-prinsip musyawarah belum sepenuhnya dijalankan oleh DPP-PDI di bawah Soerjadi."<sup>16</sup>

## Masalah Identitas Partai

Sejak diberlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi po-

litik dan organisasi kemasyarakatan, maka di Indonesia tidak lagi dibenarkan adanya ideologi lain kecuali Pancasila. Hal ini tampaknya tidak menjadi masalah bagi Golkar. Namun tidak demikian halnya bagi kedua partai politik yang lain, yaitu PDI dan PPP. Meski ini bukan berarti kedua parpol tersebut "ragu-ragu" dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi mereka.

Pemilu 1987 adalah pemilu pertama di mana ketiga organisasi politik peserta pemilu telah menganut ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terutama jika dilihat dari tema-tema dan suasana kampanye, kedua orpol (PDI dan PPP) masih "dibayangi" oleh ideologi lama mereka. PPP, misalnya, walaupun resminya telah menanggalkan ideologi Islam mereka, namun partai ini masih mengklaim sebagai "partainya orang-orang Islam." Hal yang serupa dialami pula oleh PDI.

Dalam pemilu yang baru lalu, PDI masih dibayangi oleh kebesaran nama bekas Presiden Soekarno. Bahkan faktor Bung Karno menjadi salah satu penentu keberhasilan setiap kampanye yang diadakan PDI, yang pada gilirannya dapat menaikkan perolehan suara partai ini. Jika PPP tampaknya masih akan tetap menggunakan "Islam" sebagai identitas (bukan ideologi) partai, mengingat basis sosial pendukung partai ini memang terdiri dari orang-orang Islam. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah PDI juga akan tetap memakai Bung Karno sebagai "identitas" partai?

Bila dilihat dari aspek homogenitas basis sosial pendukungnya, bagi PPP penggunaan "Islam" sebagai identitas partai tampaknya relatif tidak begitu menimbulkan permasalahan. Setidaknya jika dibandingkan dengan penggunaan Bung Karno sebagai "identitas" partai bagi PDI.

<sup>13</sup>*Panji Masyarakat* 550 (September 1987), hal. 13-14.

<sup>14</sup>*Tempo*, 18 Juli 1987, hal. 15-16.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Lihat uraian sebelumnya.



Sebagaimana diketahui, PPP merupakan hasil fusi dari empat parpol yang mempunyai ideologi atau asas yang sama, yaitu Islam. Berbeda dengan PPP, maka PDI merupakan hasil fusi dari lima parpol dengan ideologi atau asas yang berlainan satu sama lain. PNI, misalnya, menganut faham marhaenisme-nasionalisme; IPKI berfaham nasionalisme; Partai Murba menganut ideologi sosialisme; Parkindo dan Partai Katolik menganut faham keagamaan (Kristen dan Katolik). Setelah kelima partai tersebut berfusi ke dalam PDI, 10 Januari 1973, asas masing-masing eks unsur "dilebur." Secara yuridis-formal, PDI kemudian mencoba merumuskan "identitas"nya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya, yaitu "berwatak dan bercirikan Demokrasi Indonesia, Kebangsaan Indonesia, dan Keadilan Sosial."<sup>17</sup>

Dalam prakteknya, bila diamati dari tingkah laku politik PDI selama Pemilu 1971, 1982, dan 1987, PDI seakan-akan "mengambil-alih" identitas yang dimiliki PNI. Dari segi lambang partai, misalnya, PDI menggunakan gambar kepala banteng sebagaimana yang pernah dipakai oleh PNI (meski dalam bentuk yang berbeda). Begitu pula dalam hal warna (merah/hitam) dan simbol-simbol (Bung Karno, misalnya), semuanya menimbulkan kesan bahwa PDI adalah "penjelmaan" dari PNI. Ini bisa dimengerti mengingat PNI menjadi unsur dominan dalam tubuh PDI, dan dalam sejarah atau perjalanan kehidupan politik di Indonesia, PNI pernah tampil sebagai partai terbesar (dalam Pemilu 1955).

Dari satu sisi, "pengambil-alihan" identitas PNI, tampak memberikan keuntungan-keuntungan sesaat bagi PDI. Namun dari sisi lain, khususnya bagi perkembangan

masa depan, hal ini kurang menguntungkan bagi PDI.

Bagi eks unsur-unsur yang lain, terutama bagi Parkindo dan Partai Katolik (unsur terbesar kedua dan ketiga), "pengambil-alihan" identitas PNI oleh PDI dapat membangkitkan semacam perasaan "iri hati." Pada tanggal 20 November 1981, misalnya, eks unsur Partai Katolik dari PDI Madiun menyatakan keluar dari PDI, dengan alasan "merasakan adanya mayoritas yang dominan dan merugikan unsur minoritas."<sup>18</sup> Frans Seda, seorang tokoh pimpinan eks Partai Katolik, pernah mengemukakan gagasan mengenai perlunya perubahan jumlah orpol di Indonesia, yaitu dari tiga menjadi lima: satu Golkar, dua partai agama, dan dua partai nasional. Gagasan tersebut secara tidak langsung bisa dianggap sebagai keinginan partai-partai Kristen (Parkindo dan Partai Katolik) untuk membentuk partai tersendiri yang berdasarkan asas keagamaan.<sup>19</sup>

Meskipun secara nasional PDI berhasil menaikkan perolehan suaranya dalam Pemilu 1987 dibanding tiga pemilu sebelumnya, namun di daerah-daerah yang tergolong basis terkuat Parkindo (yaitu Maluku) dan Partai Katolik (NTT) suara yang diraih PDI dalam Pemilu 1987 masih jauh berada di bawah yang pernah diraih mereka pada Pemilu 1971. Jika pada Pemilu 1971, di Propinsi Maluku partai-partai yang kemudian bergabung dalam PDI berhasil meraih suara 27,39% dan meraih satu kursi DPR pusat, maka dalam Pemilu 1987, PDI hanya mendapatkan suara 5,24% dan tidak berhasil meraih satu kursi pun untuk DPR pusat. Begitu pula di Propinsi NTT: dari 35,38% suara dan empat kursi DPR pusat (Pemilu 1971) menjadi 3,94% suara dan satu kursi

<sup>18</sup>Ibid., hal. 78.

<sup>19</sup>Ibid., hal. 81.

<sup>17</sup>*Prisma* 12 (Desember 1981), hal. 68-83.



DPR pusat (Pemilu 1987).<sup>20</sup> Ini membuktikan, meskipun PDI cukup berhasil dalam mendapatkan kembali simpati dari para pendukung eks PNI, namun PDI belum sepenuhnya berhasil meraih simpati dari kalangan eks pendukung dua partai Kristen.

Mencari identitas memang bukan masalah yang mudah. Apalagi bagi sebuah partai dengan mendukung yang begitu beragam seperti PDI. Sebagaimana telah disinggung, dalam Pemilu 1987 PDI telah resmi berasaskan Pancasila, namun partai ini masih sangat "dibayangi" oleh nama besar Bung Karno. Sehingga kesan bahwa PDI merupakan "penjelmaan" dari PNI, sulit dihindarkan. Bagaimanapun PNI identik dengan Bung Karno, dan sebaliknya.<sup>21</sup>

Jika di masa yang akan datang PDI masih akan tetap mempertahankan Bung Karno sebagai "identitas"-nya, maka partai ini akan dihadapkan pada suasana yang dilematis (selain kemungkinan menghadapi hubungan yang sulit dengan pendukung eks dua partai Kristen, sebagaimana telah diuraikan). Di satu pihak, PDI akan dicap sebagai "sisa-sisa Orde Lama," karena Bung Karno "identik" dengan Orde Lama. Di pihak lain, khususnya oleh para Soekarno-itis, PDI akan dituduh sebagai "hanya memanfaatkan kharisma Bung Karno untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat."<sup>22</sup> Karena suatu yang mustahil bagi PDI untuk sepenuhnya melaksanakan ajaran-ajaran Bung Karno (termasuk marhaenisme) yang dengan sendirinya akan bertentangan dengan UU No. 3 dan No. 8 Tahun 1985.

Dalam kaitannya dengan masalah identitas partai ini, agaknya yang paling memberikan peluang bagi PDI, adalah dengan menonjolkan dimensi Persatuan Indonesia (sila ketiga) sebagai identitas partai. Karena dimensi ini masih mempunyai kaitan erat dengan faham nasionalisme, namun kecil kemungkinannya bagi munculnya kecurigaan dari eks unsur dua partai Kristen.<sup>23</sup> Tentu saja untuk itu PDI harus berani melakukan terobosan-terobosan yang berarti. Misalnya, dengan tidak lagi mengkaitkan identitas partai dengan banyaknya massa pendukung dalam pemilu mendatang.

### Masalah Kemandirian, Demokratisasi, dan Rekrutisasi

Walaupun sistem kepartaian di Indonesia telah disederhanakan, dari sepuluh orpol (pada Pemilu 1971) menjadi hanya tiga orpol (sejak 1973 sampai sekarang), namun kualitas kemandirian orpol yang terkandung di dalamnya masih relatif rendah.<sup>24</sup> Hal ini disebabkan dua faktor yang saling berkaitan satu sama lain: faktor intern dan faktor ekstern. Dari segi faktor intern, karena belum lancarnya mekanisme demokrasi di dalam tubuh orpol. Sedangkan dari segi faktor ekstern, karena masih kuatnya campur tangan birokrasi dalam kehidupan kepartaian. Akibatnya, meskipun Indonesia telah merdeka 42 tahun, namun parpol belum juga dewasa.

Jika diamati perjalanan PDI sejak berdirinya hingga saat ini, maka salah satu hal yang menonjol adalah kegagalan partai ini dalam menyelesaikan masalah-masalahnya

<sup>20</sup>Lihat Tabel-tabel V.3; V.4; V.6; V.6A dalam Laporan Pemilu Tahap II.

<sup>21</sup>"Kami Punya Konsensus Sendiri," wawancara dengan Rachmawati Soekarno, *Topik 11* (14 April 1987), hal. 54.

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>"Melepaskan Keterkurungan Ideologis," wawancara dengan Dr. Alfian, *Panji Masyarakat* 542 (11 Juni 1987), hal. 58-62.

<sup>24</sup>Alfian, "Problematik dan Prospek Perkembangan Nasional Ditinjau dari Segi Sosial Politik," makalah utama KIPNAS IV.



sendiri. Budaya "restu dari atas" selalu muncul setiap kali terjadi konflik intern di tubuh PDI. Tampilnya generasi muda dalam jajaran kepemimpinan PDI serta keberhasilan mereka dalam Pemilu 1987, ternyata tidak menjamin peningkatan kualitas kemandirian partai ini.

Kasus yang masih hangat, yang terjadi se usai Pemilu 1987, adalah kegagalan Soerjadi dan kawan-kawan dalam menyelesaikan soal "pembangkangan" tiga anggota DPR F-PDI. Masalah itu "diselesaikan" setelah adanya campur tangan dari Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam. Ironisnya, "penyelesaian" kasus tersebut justru menimbulkan kesan ketidaktegasan DPP Soerjadi dalam menerapkan aturan permainan yang mereka buat sendiri. Karena ketiga anggota DPR F-PDI yang terkena SK DPP-PDI No. 059/1986, yang seharusnya tidak berhak lagi duduk sebagai anggota DPR, pada akhirnya masih tetap menjadi anggota DPR F-PDI.<sup>25</sup> Kasus lain yang menunjukkan masih rendahnya kualitas kemandirian PDI, adalah masalah pengisian jabatan Wakil Ketua DPR/MPR periode 1987-1992 dari unsur PDI dan jabatan Ketua Fraksi PDI untuk periode yang sama. Pihak DPP sudah menetapkan Soerjadi sebagai calon Wakil Ketua DPR/MPR dan Fatimah Ahmad (seorang fungsionaris DPP) sebagai calon Ketua F-PDI. Namun sejumlah tokoh tua anggota Fraksi PDI yang dimotori Ahmad Subagio, Dudy Singadilaga, dan Yusuf Merukh (ketiganya dari eks unsur PNI) mengajukan calon lain, yaitu Subagio sebagai calon Wakil Ketua DPR/MPR dan Dudy sebagai calon Ketua F-PDI. Dengan alasan kedua orang tersebut lebih memenuhi kriteria dibanding calon-calon

yang diajukan DPP. Untuk lebih "melicinkan jalan" bagi calon-calonnya, DPP-PDI menghadap DPP-Golkar.<sup>26</sup>

Dari kedua kasus di atas terlihat jelas betapa PDI pasca-Pemilu 1987 masih mempertahankan pola hubungan yang mencerminkan "ketergantungan ke atas."<sup>27</sup> Pola yang memang sudah "dianut" partai ini semenjak berdirinya. Ini berarti prinsip-prinsip demokrasi masih belum berjalan di tubuh partai yang menggunakan nama demokrasi itu. Padahal dengan tampilnya generasi Soerjadi semula diharapkan partai ini akan meninggalkan pola-pola lama mereka.

Dari segi faktor ekstern, kuatnya campur tangan birokrasi dalam kehidupan PDI, tidak terlepas dari dua hal. *Pertama*, berkaitan dengan kondisi lingkungan sistem politik Indonesia pada umumnya yang masih menonjolkan dimensi preventif.<sup>28</sup> Dan *kedua*, adanya kenyataan bahwa pemerintah bertindak selaku pembina parpol, serta besarnya ketergantungan parpol pada dana pemerintah.<sup>29</sup>

Masalah terakhir, adalah masalah rekrutasi. Ini berkaitan dengan masalah kaderisasi. Selama ini, PDI bisa dikatakan tidak mempunyai pola-pola khusus dalam mencek kader-kadernya. kaderisasi dan rekrutasi yang berlaku di PDI berjalan melalui eks unsur-unsur pendukungnya.<sup>30</sup> Kader-kader atau calon-calon pemimpin PDI diajukan oleh unsur atau ormas-ormas yang semula merupakan *onderbouw* unsur-unsur bersangkutan. Sebagai contoh, Soerjadi yang

<sup>26</sup>Editor, 3 Oktober 1987, hal. 15-16.

<sup>27</sup>Kaisieppo, *Dilemma*, hal. 74.

<sup>28</sup>Alfian, *Problematis*, hal. 3 dan seterusnya.

<sup>29</sup>Wawancara dengan Wakil Ketua F-PDI DPRD Sumatera Utara L.M. Sinaga dan Wakil Bendahara Zulkifli Chan, Medan, 7 September 1987.

<sup>30</sup>Kaisieppo, *Dilema*, hal. 71-74.

<sup>25</sup>Padahal Sekjen DPP-PDI Nico Daryanto pernah mengatakan bahwa DPP-PDI akan melangkah terus dengan konsep-konsep yang sudah digariskan, dan akan konsisten melaksanakannya. Lihat *Tempo*, 27 September 1986, hal. 12.



kini memegang jabatan sebagai Ketua Umum DPP-PDI, semula adalah seorang pemimpin GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) yang selama ini dikenal sebagai *onderbouw* -nya PNI. Begitu pula sebagian besar mereka yang duduk di DPP-PDI. Ada yang berasal dari GPM (Gerakan Pemuda Marhaen) yang juga berafiliasi pada PNI; ada pula yang berasal dari GMKI (yang berafiliasi pad Parkindo) dan PMKRI (Partai Katolik).

Yang menjadi pertanyaan, setelah diberlakukannya UU No. 3 dan No. 8 Tahun 1985, yang antara lain menyebutkan bahwa keanggotaan orpol berdasarkan perorangan, apakah pola-pola kaderisasi dan rekrutasi sebagaimana sekarang masih akan dipertahankan? Dengan adanya UU tersebut, berarti secara yuridis formal PDI tidak lagi mempunyai kaitan dengan ormas-ormas pendukungnya. Meskipun tidak tertutup kemungkinan masih diterapkannya pola-pola lama, namun ada kecenderungan PDI juga berusaha memakai pola-pola baru. Misalnya, sebagian dari fungsionaris DPP-PDI sekarang terdiri dari para pekerja profesional dan atau berlatar belakang akademis. Mereka ini sebelumnya kurang begitu dikenal di gelanggang politik nasional. Tidak mengherankan bila ada sebuah mass media yang menulis: "pemimpin baru PDI mengesankan sebuah pendekatan yang terlalu akademis dan idealistis."<sup>31</sup> Dalam rangka kaderisasi dan rekrutasi, DPP-PDI juga berusaha lebih mengfungsionalkan departemen-departemen kewanitaan dan kepemudaan. Hal ini dimaksudkan sebagai pengganti kaderisasi dan rekrutasi melalui ormas-ormas eks pendukungnya.<sup>32</sup>

Penutup

Pemilu 1987 telah memberikan makna tersendiri bagi PDI. Partai ini telah memperoleh hasil yang mengejutkan banyak kalangan. Padahal PDI tampil dalam arena Pemilu 1987 masih dalam suasana konsolidasi. Oleh karenanya mereka tampil tanpa target tertentu. Tapi justru karena itulah mereka tidak memiliki beban apa pun, yang pada akhirnya justru membuahkan hasil yang tak terduga sebelumnya.

Banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan PDI dalam Pemilu 1987. Salah satu di antaranya adalah naiknya generasi muda dalam tampuk kepemimpinan partai ini. Mereka (Soerjadi dan kawan-kawan) dinilai relatif "bersih" dari konflik-konflik masa silam. Sehingga banyak harapan tertumpu pada mereka. Apalagi setelah mereka terbukti mampu meningkatkan citra PDI.

Namun, apa yang terjadi kemudian (setelah Pemilu 1987) justru membuktikan belum berhasilnya DPP Soerjadi dalam mengatasi masalah-masalah yang mendasar dan kompleks yang menyelimuti PDI selama bertahun-tahun. Konflik-konflik intern, baik yang berdimensi kepentingan pribadi maupun "konflik warisan," kembali muncul ke permukaan.

Ketidakmampuan DPP Soerjadi terlihat dari pilihan yang mereka ambil dalam menyelesaikan konflik-konflik intern. Mereka lebih mengandalkan campur tangan birokrasi guna menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Akibatnya, "penyelesaian" cenderung hanya bersifat sementara, yang berarti konflik-konflik baru setiap saat dapat muncul kembali.

Di satu sisi, ketergantungan pada "restu dari atas," menunjukkan bahwa, *pertama*,

<sup>31</sup>*Tempo*, 17 Januari 1987, hal. 13-14.  
<sup>32</sup>Wawancara dengan Sinaga dan Zulkifli Chan.



sebagai partai politik, PDI masih rendah kualitas kemandiriannya. Dan *kedua*, menunjukkan masih tersendatnya proses demokratisasi dalam tubuh PDI. Di sisi lain, besarnya campur tangan birokrasi dalam kehidupan PDI pada khususnya, dan kehidupan parpol pada umumnya, tampaknya menjadi sesuatu yang tak bisa dihindarkan pada masa sekarang. Ini berkaitan dengan situasi lingkungan sistem politik Indonesia secara keseluruhan yang masih menonjolkan dimensi preventif.

Jika di masa yang akan datang PDI masih tetap mempertahankan pola hubungan yang mencerminkan "ketergantungan ke atas," partai ini akan terpenjara oleh masa lalunya sendiri. Dan bukan suatu yang mustahil bila PDI akan kehilangan kepercayaan dari massa pendukungnya pada pemilu mendatang, yang pada pemilu lalu sudah sangat antusias dalam memberikan dukungan mereka. Bila mereka tidak ingin hal itu terjadi, DPP-PDI harus berani melakukan terobosan-terobosan yang bermakna, khususnya dalam meningkatkan kualitas kemandirian PDI.

Keberanian melakukan terobosan-terobosan yang bermakna, juga diperlukan DPP-PDI untuk menampilkan identitas partai, terutama setelah diberlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap orpol dan ormas. Bila PDI masih tetap mempertahankan faktor Bung Karno sebagai "identitas" partai, dengan pertimbangan kekhawatiran kehilangan para pendukung tradisionalnya, maka PDI akan dihadapkan pada suasana yang dilematis. Di satu pihak

PDI akan tetap dicap sebagai "sisa-sisa Orde Lama." Sedangkan di lain pihak, PDI akan dituduh sebagai "penunggang nama besar Bung Karno." Karena mereka akan dinilai sekedar memanfaatkan kharisma Bung Karno untuk tujuan-tujuan politik sesaat. Sementara ajaran-ajaran Soekarno yang sesungguhnya tidak mungkin mereka anut. Untuk itu, jalan yang paling memberikan peluang bagi PDI adalah dengan mengembangkan dimensi Persatuan Indonesia sebagai identitas partai.

Dalam hal rekrutasi dan kaderisasi, PDI tampaknya akan mengkombinasikan antara pola-pola lama dan pola-pola baru. Pola-pola lama adalah dengan melalui eks unsur-unsur pendukung PDI dan atau melalui ormas-ormas yang pernah menjadi *onderbouw* mereka. Sedangkan pola-pola baru adalah dengan memasukkan para pekerja profesional dan atau mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan akademis, meskipun kurang berpengalaman dalam karier politik, sebagaimana yang tergambar dari komposisi DPP-PDI sekarang. PDI juga berusaha lebih mengaktifkan lembaga-lembaga otonom yang ada di bawah DPP, seperti departemen kepemudaan dan kewanitaan. Masih sulit diperkirakan bagaimana hasil pola-pola kaderisasi dan rekrutasi yang dijalankan DPP-PDI sekarang. Yang jelas, tampilnya mereka yang kurang berpengalaman di bidang politik sebagai pemegang pos-pos penting dalam DPP, kurang menguntungkan bagi masa depan PDI. Hal ini mengingat belum terpecahkannya masalah-masalah yang mendasar dan kompleks di tubuh PDI.



# Dokumen

## RINGKASAN PERISTIWA ASEAN Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

*SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA*

### I. KERJASAMA EKONOMI ASEAN

- A. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN
- B. Pertumbuhan Ekonomi ASEAN
- C. Kerjasama Keuangan dan Perbankan  
Pembaruan Sistem Keuangan di ASEAN
- D. Kerjasama Pangan, Perikanan dan  
Kehutanan
  - 1. Strategi Perikanan ASEAN
  - 2. Pabrik Perikanan ASEAN
- E. Kerjasama Industri, Mineral dan Energi
  - 1. Pembangunan Pabrik Garam Abu  
ASEAN
  - 2. Pertemuan Dewan Perminyakan  
ASEAN (ASCOPE)
- F. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata
  - 1. Masalah Perdagangan ASEAN
  - 2. Pertemuan Para Pejabat Senior  
Perdagangan

### II. KERJASAMA NON EKONOMI ASEAN

- A. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi
  - 1. Pertemuan Kelompok Kerja Media  
Cetak dan Tradisional
  - 2. Pertemuan Konfederasi Wartawan  
ASEAN
- B. Kerjasama Keamanan ASEAN  
Sidang ASEANAPOL ke-9

### III. ORGANISASI NON PEMERINTAHAN (NGO)

- A. Pertemuan FASA ke-15
- B. Perhimpunan Hukum ASEAN (ALA)
- C. Pertemuan Informal Jaksa Agung ASEAN
- D. Pertemuan Asosiasi Penilai ASEAN
- E. Penanggulangan Bencana Alam

### IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- A. Hubungan ASEAN-Jepang
  - 1. Kerjasama Energi
  - 2. Kerjasama Kebudayaan
  - 3. Seminar "Dampak Pembentukan Pasar  
Baru Eropa Terhadap Peran Ekonomi  
Jepang di Asia Tenggara
- B. Hubungan ASEAN-MEE
- C. Hubungan ASEAN-Kanada
- D. Hubungan ASEAN-Asia Pasifik  
Pertemuan Kerjasama Ekonomi  
Asia-Pasifik (APEC)
- E. Hubungan ASEAN-PBB
- F. Hubungan ASEAN-Amerika Latin

### V. USAHA ASEAN MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

- A. Rencana Pertemuan Perdamaian Kamboja
- B. Usaha ASEAN Lewat PBB



## I. KERJASAMA EKONOMI ASEAN

### A. PERTEMUAN MENTERI EKONOMI ASEAN

Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ke-21 berlangsung di Bandar Seri Begawan tanggal 30 November-1 Desember 1989 untuk membahas: (1) usulan Australia tentang pembentukan kerjasama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; (2) upaya meningkatkan hubungan perdagangan antar anggota ASEAN dan mendorong pemanfaatan pengurangan bea masuk; (3) masalah Uruguay Round yang sekarang sedang berlaku, yakni perundingan multilateral (*Angkatan Bersenjata*, 29-11-1989).

Sultan Brunei Darussalam, Hassanah Bolkihah, mengatakan dalam pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN perlu menciptakan suatu era baru untuk memperluas kerjasama antar anggotanya, khususnya di bidang ekonomi; (2) inisiatif baru ke arah kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan bidang lainnya perlu dilanjutkan agar pertumbuhan ekonomi ASEAN dapat berkembang dengan pesat; (3) kemampuan ASEAN untuk mencapai posisi yang menonjol di dalam masalah regional dan internasional telah mendapat pujian dari masyarakat dunia; (4) ASEAN diharapkan dapat memainkan peranan lebih penting dalam forum internasional, termasuk bidang ekonomi; (5) pertemuan APEC di Canberra secara tidak langsung telah mengakui peranan penting ASEAN dalam kerjasama ekonomi regional, dan karenanya posisi itu harus diperkuat lagi dengan meningkatkan kerjasama ekonomi; (6) negaranya tidak terlepas dari tanggung jawab untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi; (7) Brunei mengundang para investor untuk membantu pembangunan ekonominya, terutama di sektor perindustrian (*Antara*, 1-12-1989); (8) ASEAN hendaknya menggalang kerjasama secara menyeluruh untuk menghadapi proteksi perdagangan dari negara-negara lain; (9) partisipasi ASEAN dalam pertemuan APEC di Canberra bertujuan menegakkan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan jujur, dalam kerangka semakin ketatnya proteksionisme perdagangan dewasa ini; (10) kelompok-kelompok yang terlibat dalam APEC hendaknya tidak membiarkan diri mereka tumbuh sebagai suatu blok negara dagang (*Suara Karya*, 1-12-1989).

Sementara itu Menteri Perdagangan Filipina mengatakan bahwa: (1) ASEAN perlu mengambil langkah-langkah yang lebih nyata untuk menghadapi munculnya blok-blok perdagangan di kawasan Eropa dan Amerika

Utara; (2) sebenarnya ASEAN harus kuat sebagai organisasi kerjasama di bidang ekonomi daripada bidang politik, tetapi kenyataannya lemah dalam membuat langkah-langkah yang nyata di bidang ekonomi; (3) ASEAN kuat dan berhasil dalam isu-isu politik, tetapi sangat lamban mengambil langkah-langkah yang pasti bagi pertumbuhan ekonomi (*Suara Karya*, 1-12-1989).

Para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk: (1) memberi kemudahan satu sama lain agar perdagangan antar ASEAN meningkat dan makin lancar; (2) meningkatkan berbagai kerjasama ekonomi dan menghilangkan berbagai hambatan yang selama ini menjadi kendala dalam kerjasama itu; (3) memperbaiki sistem perdagangan antar ASEAN dengan cara meningkatkan investasi melalui proyek usaha patungan oleh pihak swasta; (4) memperlancar proyek kerjasama dengan menghilangkan segala bentuk birokrasi yang akan menjadi penghalang; (5) menyatukan pandangan, terutama dalam memperjuangkan penghapusan proteksionisme yang sangat merugikan ekspor ASEAN pada Pertemuan Babak Uruguay bulan Desember 1990; (6) mempelajari kembali usul pembentukan Komisi Komoditi dan Komisi Energi dalam Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-22 mendatang; (7) memperbaiki lagi kerjasamanya dan memperkuat kemampuan ekonomi kawasanya agar mampu menciptakan bentuk kerjasama baru; (8) menggiatkan perdagangan antar ASEAN dengan menambah jumlah jenis barang yang dimasukkan dalam PTA setiap tahunnya; (9) melaksanakan pembangunan proyek jaringan perhubungan antar ASEAN melalui darat, laut dan udara secara bertahap; (10) mengkampanyekan kunjungan wisatawan ASEAN 1992 ke Jepang, Australia, Jerman Barat dan ASEAN sendiri; (11) menugaskan para pejabat senior ASEAN untuk menyiapkan gagasan dan pemikiran baru yang akan dibahas dalam Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-22 yang akan diselenggarakan di Jakarta bulan Oktober 1990 (*Merdeka*, 4-12-1989).

### B. PERTUMBUHAN EKONOMI ASEAN

Dalam wawancaranya dengan *The Straits Times*, Menteri Keuangan Singapura, Dr. Richard Hu mengatakan bahwa: (1) rata-rata tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia, Filipina, Malaysia dan Muangthai (ASEAN-4) dengan cepat mengejar Negara-negara Industri Baru Asia (NICs) dan kesenjangan antar ASEAN-4 dengan NICs akan lenyap tahun ini; (2) Jepang dan NICs merupakan pemain-pemain bintang



sampai pertengahan 1980-an dan ASEAN-4 berkembang dengan cepat dengan rata-rata pertumbuhan 8% di belakang NICs pada tahun 1986 dan 2% pada tahun 1987; (3) bila berbagai investasi akhir-akhir ini diterjemahkan ke dalam produksi penuh, maka di tahun-tahun mendatang ASEAN-4 akan dilanda investasi; (4) dalam dua tahun terakhir ini investasi Jepang ke ASEAN-4 meningkat hampir dua kali lipat setiap tahunnya, dari 2,5% tahun 1986 menjadi 4,2% tahun 1987; (5) investasi AS ke NICs pada tahun 1987 naik 7% bila dibandingkan dengan tahun 1986, tetapi investasi AS ke ASEAN-4 pada periode yang sama melonjak menjadi 65%; (6) komitmen investasi NICs kepada ASEAN-4 pada tahun 1987 melebihi 33%; (7) pertumbuhan perekonomian ASEAN-4 saat ini semakin menguntungkan sektor produksi barang jadi dibandingkan dengan sektor pertambangan dan industri; (8) sumbangan bagi kestabilan ekonomi mikro ASEAN diperoleh dari tingkat inflasi yang relatif rendah dan tingkat defisit fiskal serta keberhasilan mengurangi kekurangan keuangan yang sedang berjalan; (9) keuntungan komparatif dalam produksi barang jadi yang padat karya terus mengalami kemajuan di ASEAN-4 akan mempercepat relokasi industri-industri yang sama dari NICs dan Jepang ke Asia Tenggara; (10) tingkat simpanan yang tinggi di NICs kemungkinan sekali akan terus berlanjut dan akan melayani investasi yang akan terus mengalir ke tetangga ASEAN-4; (11) tingkat pertumbuhan perekonomian dan mengalirnya investasi menggambarkan perubahan lingkungan perekonomian di kawasan Asia-Pasifik dalam tiga tahun terakhir ini; (12) dalam dekade mendatang patron investasi asing biasanya memimpin patron perdagangan akan mengubah perekonomian di Asia-Pasifik dan akan membantu perkembangan saling menguntungkan dalam perekonomian di kawasan ini (*Suara Pembaruan*, 22-11-1989).

### C. KERJASAMA KEUANGAN DAN PERBANKAN

#### *Pembaruan Sistem Keuangan di ASEAN*

Pertemuan para Sarjana Ekonomi ASEAN berlangsung di Manila tanggal 18 November 1989, yang antara lain dihadiri oleh para ahli ekonomi anggota ASEAN termasuk 21 orang delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Hubungan Luar Negeri ISEI, Prof. Hendra Asmara, untuk membahas masalah pembaruan sistem keuangan di negara-negara ASEAN.

Presiden Filipina, Qorazon Aquino mengatakan dalam pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) solidaritas

dan kekuatan merupakan tiang utama untuk menegakkan kerjasama ekonomi ASEAN; (2) anggota ASEAN secara bersama telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga termasuk sebagai negara dengan performance yang tinggi; (3) dedikasi para ahli ekonomi ASEAN yang selama ini banyak memberi sumbangan pada kemajuan ekonomi kawasan yang saling menguntungkan hendaknya diteruskan.

Dr. Amina Tyabji dari National University of Singapore mengatakan bahwa: (1) beberapa persamaan usaha pembaruan di bidang keuangan dilakukan negara-negara ASEAN antara lain untuk: (a) memobilisasikan dana masyarakat dan menempatkan secara lebih efisien dan produktif; (b) menghilangkan pengendalian harga yang dapat mengekang pertumbuhan ekonomi seperti kurs mata uang dan suku bunga; (c) mengurangi hambatan masuknya usaha baru dalam bisnis keuangan; (d) menumbuhkan pasar modal guna mengefisienkan dana; (2) deregulasi keuangan di Indonesia pada dekade 70-an dilakukan sebagai salah satu bagian dari pembaruan luas untuk mengembangkan ekonomi non-migas; (3) sejak tahun 1983 hingga sekarang Indonesia baru melaksanakan deregulasi substansial yang mengarah pada pergeseran dominasi lima bank pemerintah, peningkatan persaingan bank swasta, kebebasan menentukan suku bunga deposito dan kredit serta penggalakan pasar modal; (4) deregulasi di Indonesia tidak memperlihatkan kegoncangan moneter, kecuali dua bank jatuh. Hal ini dapat terjadi karena diikuti dengan regulasi yang lebih bijaksana agar bank memelihara keseimbangan tertentu antara modal sendiri dan pinjaman serta audit yang lebih ketat dari Bank Indonesia; (5) deregulasi di Malaysia pada dekade 70-an dengan mengembangkan kurs mata uang, banyak menimbulkan kegoncangan seperti penipuan dan kemerosotan nilai aset perbankan; (6) deregulasi tahun 1983 di Malaysia diarahkan untuk mengurangi pengendalian keluar masuknya mata uang dunia sehingga menumbuhkan pasar mata uang internasional mengakibatkan kredit macet mencapai 20-25% pada tahun 1986. Hal ini memaksa pemerintah yang pada tahun 1987 menghapus peraturan tingkat suku bunga; (7) pada tahun 1989, Malaysia terpaksa memperkuat pengendalian bank sentral, meningkatkan modal minimum bank dan membatasi kredit yang boleh dihapuskan; (8) dekade 50-an Filipina ditandai dengan represi terhadap sektor keuangan yang menimbulkan kegoncangan sehingga tidak dapat menumbuhkan pasar modal; (9) deregulasi yang dilakukan Filipina pada dekade 70-an masih bersifat ad-hoc, karena masih menekankan pada spesialisasi perkreditan; (10) deregulasi yang benar baru dimulai pada dekade 80-an



dengan paket yang lebih komprehensif yang meliputi suku bunga, integrasi sistem keuangan, syarat modal yang tinggi dan pengawasan yang intensif terhadap bank. Langkah ini berhasil menarik dana masyarakat dalam pengadaan pinjaman jangka panjang; (11) sejak tahun 1960, Singapura melihat sektor keuangan bukan sekedar pendukung pembangunan ekonomi, tetapi sebagai kekuatan tersendiri yang harus ditumbuhkan; (12) deregulasi yang sesungguhnya di Singapura terjadi pada tahun 1970-an yang berfokus pada harga kurs dan bunga serta keterbukaan pada bank baru; (13) Singapura tidak menghendaki kebebasan mutlak, oleh karena itu operasi bank baru yang berorientasi domestik dilarang, tetapi untuk melayani keuangan dari bisnis lain negara dibuka selebar-lebarnya dengan tujuan menjadikan Singapura sebagai salah satu pusat keuangan dunia; (4) bank pemerintah di Singapura berhasil melopori persaingan dalam dunia perbankan dan menarik paling banyak tabungan masyarakat swasta; (15) Muangthai merupakan negara yang paling sedikit melakukan deregulasi dengan mengendalikan suku bunga dan meniadakan izin bank baru, namun akhir-akhir ini mulai dilonggarkan; (16) meskipun Bank of Thailand mendominasi perbankan, tetapi mobilisasi dana dalam negeri berjalan lancar; (17) akhir-akhir ini pemerintah Muangthai mulai mendorong tumbuhnya pasar modal untuk menyediakan pinjaman jangka panjang (*Suara Pembaruan*, 18-11-1989).

#### D. KERJASAMA PANGAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

##### 1. Strategi Perikanan ASEAN

Dirjen Perikanan RI, R. Soeprapto mengatakan pada pers di Jakarta tanggal 24 Oktober 1989 bahwa: (1) pembentukan Federasi Perikanan (AFF) dalam Sidang AFF ke-1 di Bangkok merupakan strategi yang hendak dicapai ASEAN di bidang perikanan; (2) Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang harus memanfaatkan keunggulan komparatif di bidang perikanan sehingga dapat memasok (mensuplai) ikan untuk memenuhi kebutuhan dunia; (3) hasil Sidang AFF ke-1 dapat mendorong ASEAN untuk menghimpun kekuatan ekonomi; (4) Indonesia tidak pernah melonggarkan Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang larangan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hari-mau (*Antara*, 24-10-1989).

##### 2. Pabrik Perikanan ASEAN

Seminar dan Demonstrasi Mesin Serpih Es berlangsung di Jakarta tanggal 30 November 1989 untuk membahas masalah pengawetan ikan dengan serpihan es.

Sekjen Perikanan ASEAN, Woworuntu, mengatakan pada seminar itu bahwa: (1) Indonesia menghendaki agar pabrik perikanan ASEAN didirikan di Indonesia, karena selain bahan ikan eukup banyak, juga dapat menyerap tenaga kerja; (2) Presiden Soeharto telah mengatakan kepada Menteri Pertanian Ir. Wardoyo agar produksi perikanan Indonesia yang diekspor ke luar negeri ditingkatkan menjadi barang jadi; (3) Indonesia baru mampu mengekspor setengah dari produksinya yang sudah diproses.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Ir. Sofyan Ilyas mengatakan: (1) salah satu sebab ekspor perikanan Indonesia ke AS ditolak karena dianggap membahayakan kesehatan; (2) pengawetan ikan dengan es harus hati-hati karena ikan yang mengandung lemak tinggi mempunyai proses penurunan mutu yang cepat; (3) untuk menghindari pembusukan, suhu ruangan penyimpanan ikan harus nol atau satu derajat; (4) hingga sekarang belum ada standar penggunaan es dalam pengawetan produksi perikanan yang berhasil baik.

Dirjen Perikanan R. Soeprapto mengatakan bahwa: (1) peningkatan penggunaan es yang memadai harus sejalan dengan peningkatan produksi; (2) es merupakan bahan pembantu yang paling pokok untuk mempertahankan mutu hasil perikanan; (3) peningkatan produksi yang bermutu baik merupakan suatu upaya agar produksi ikan dapat memenuhi standar mutu sesuai dengan keinginan konsumen dalam dan luar negeri (*Pelita*, 1-12-1989).

#### E. KERJASAMA INDUSTRI, MINERAL DAN ENERGI

##### 1. Pembangunan Pabrik Garam Abu ASEAN

Dalam rangka kerjasama patungan, Muangthai akan mengusulkan pembangunan sebuah usaha patungan untuk memproduksi garam abu. Proyek ini akan memerlukan dana investasi US\$250 juta, dan Muangthai akan memiliki 13 saham dari US\$18 juta, sedangkan saham lainnya diperuntukkan bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya (*Antara*, 9-11-1989).



2. *Pertemuan Dewan Perminyakan ASEAN (ASCOPE)*

Konferensi dan Pameran Dewan Perminyakan ASEAN (ASCOPE) ke-15 berlangsung di Singapura tanggal 14-16 November 1989, dihadiri oleh 300 orang dari 26 negara untuk membahas 66 makalah (*Angkatan Bersenjata*, 17-11-1989).

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Brigadir Jenderal Lee Hsien Loong, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) cadangan minyak yang terdapat di seluruh negara anggota ASEAN yang telah terbukti adalah 12.700 juta barrel atau sekitar 35% dari seluruh cadangan minyak yang terdapat di kawasan Asia-Pasifik; (2) peranan negara produsen minyak anggota ASEAN di pasaran minyak dunia cukup besar dan kemampuan produksi mereka saat ini mencapai 1,9 juta barrel per hari, sedangkan kilangnya mampu mengolah minyak mentah sebanyak 2,2 juta barrel; (3) cadangan gas alam di ASEAN mencapai 150 trilyun kaki kubik atau 50% dari total seluruh cadangan gas alam yang terdapat di wilayah Asia-Pasifik; (4) Indonesia dan Malaysia merupakan negara produsen dan pengekspor minyak mentah dan gas alam yang cukup besar; (5) total produksi gas alam Indonesia mencapai 1,7 trilyun kaki kubik per tahun dan 54% di antaranya diolah menjadi gas alam cair (LNG) dan LPG; (6) Indonesia merupakan negara pengekspor LNG terbesar di dunia dengan kilang pengolahan yang mampu mengolah 22,5 juta ton per tahun dan 20 juta ton di antaranya diekspor; (7) tujuan ekspor LNG Indonesia terutama ke Jepang (16 juta ton), Korea Selatan (2,1 juta ton) dan mulai tahun 1990 ke Taiwan (1,5 juta ton) (*Antara*, 21-11-1989).

Direktur Utama Perusahaan Minyak Nasional Malaysia, Tan Sri Datuk Azian Bin Zainul Abidin, mengatakan bahwa: (1) cadangan minyak Malaysia yang sudah diketemukan mencapai sekitar 3,1 milyar barrel dan berdasarkan tingkat produksi dewasa ini cadangan itu mampu memproduksi selama 15 tahun; (2) cadangan gas alam negaranya sekitar 53 trilyun kaki kubik dan sejak 1985 telah diekspor ke Jepang; (3) sejak bulan Juni 1989, Malaysia telah membangun sistem penyaluran gas alam melalui pipa sepanjang 730 kilometer yang diperkirakan selesai pada bulan Oktober 1991; (4) jika proyek ini selesai maka sebagian besar pembangkit listrik di Semenanjung Malaysia dapat dialihkan dari energi BBM ke energi gas alam.

Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Brunei Darussalam, Dato Seri Laila Jasa Haji Ahmad Wally Skin-

ner, mengatakan bahwa: (1) produksi minyak mentah negaranya saat ini hanya 150.000 barrel per hari, meskipun kemampuan produksinya jauh di atas tingkat produksi itu; (2) pada tahun 1979 Brunei mampu memproduksi sebanyak 261.000 barrel minyak, tetapi tingkat produksi itu dibatasi dengan alasan untuk konservasi energi di dalam negeri; (3) ekspor LNG Brunei ke Jepang hingga tahun 1988 mencapai 250 juta metrik ton yang merupakan tindak lanjut kontrak jual beli jangka panjang selama 20 tahun dan akan berakhir pada tahun 1993.

Ketua Dewan Direksi Pengelola Perminyakan Muangthai, Dr. Anat Arbhabharama, mengatakan: (1) total kebutuhan minyak negaranya sekitar 400.000 setara barrel, yang 120.000 setara barrel di antaranya dipenuhi sendiri, baik dari minyak mentah, kondensat maupun gas alam; (2) cadangan gas alam Muangthai mencapai 2.300 juta setara barrel minyak, dan 2.100 juta setara barrel minyak di antaranya merupakan cadangan potensi; (3) Muangthai sedang memperbaiki dan memperluas kapasitas kilang minyaknya agar pada tahun 1994 mampu mengolah minyak mentah antara 100.000 hingga 150.000 barrel per hari; (4) sejak tahun 1971 hingga 1988, Muangthai telah melakukan 291 pengeboran, dan baru 167 pengeboran yang telah menghasilkan dan memproduksi minyak.

Direktur Utama Perusahaan Minyak Nasional Filipina, Manuel A. Estrella mengatakan bahwa konsumsi energi negaranya saat ini mencapai 110 juta barrel atau sekitar 305.000 setara barrel minyak, yang 37% di antaranya dipenuhi sendiri yang sebagian besar di antaranya berasal dari energi panas bumi (*Antara*, 21-11-1989).

Mereka sepakat untuk: (1) terus meningkatkan kerjasama perminyakan antar anggota ASCOPE; (2) meneruskan pertukaran informasi dalam beberapa masalah perminyakan di antaranya untuk saling mengisi, jual beli dan membantu, baik di bidang produksi dan penjualan minyak mentah maupun hasil produksi kilang, serta saling mengirimkan data terakhir mengenai kegiatan produksi dan eksplorasi migas di antara negara anggota; (3) mempelajari aspek ekonomi dan teknik kemungkinan dibangunnya pemasokan gas alam melalui sistem pipanisasi di wilayah ASEAN; (4) mempelajari aspek ekonomi untuk memaksimalkan penggunaan okta-ne kendaraan bermotor; (5) menyelenggarakan kursus, latihan, pertukaran tenaga ahli dan serangkaian penelitian di bidang BBM, minyak pelumas dan mesin-mesin perminyakan; (6) menyelenggarakan Pertemuan ASCOPE ke-16 di Indonesia pada bulan November 1990. Di samping itu juga dicatat kemajuan kerjasama



di bidang: (1) proyek perminyakan yang pengembangannya telah selaras dengan kemajuan teknologi perminyakan, terutama dalam kerjasama pencarian prospek sumber daya mineral di lepas pantai; (2) pendidikan dan latihan bagi tenaga ahli perminyakan, baik melalui seminar, kursus singkat maupun program pertukaran tenaga ahli; (3) proyek kerjasama pengembangan industri cylinders bahan bakar gas (CNG); (4) prospek pengembangan pabrik aromatik di wilayah ASEAN; (5) pengembangan latihan manajemen keselamatan dan lingkungan hidup (*Angkatan Bersenjata*, 17-11-1989).

## F. KERJASAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

### 1. Masalah Perdagangan ASEAN

Seusai diterima Presiden Soeharto di Istana Merdeka tanggal 28 November 1989, Menteri Perdagangan RI, Arifin Siregar, mengatakan bahwa: (1) nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN masih kecil (hanya sekitar US\$2 milyar) bila dibandingkan dengan nilai total ekspor Indonesia (US\$19 milyar/tahun) dan hanya US\$57 juta yang menikmati PTA (*Preferential Trading Arrangement*) atau pengurangan bea masuk dalam setahun; (2) perbaikan hubungan perdagangan antara negara-negara ASEAN belum mencapai apa yang diharapkan; (3) masih terdapat perbedaan-perbedaan antara negara-negara ASEAN mengenai masalah yang dianggap penting; (4) dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu jumlah barang Indonesia yang dikenakan pengurangan bea masuk barang-barang ekspor antar negara-negara ASEAN mengalami kenaikan senilai US\$9 juta, tetapi jumlah itu sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN; (5) Indonesia hanya menikmati 12.000 jenis barang yang mendapat PTA, tetapi dari jumlah itu banyak yang kurang berarti bagi Indonesia; (6) untuk meningkatkan hubungan perdagangan antar negara ASEAN, Indonesia menginginkan peninjauan kembali jumlah kandungan lokal produk setempat yang berkaitan dengan penentuan komoditi yang memperoleh PTA; (7) Indonesia menginginkan agar ketentuan komoditi yang memperoleh PTA dari minimal penggunaan bahan lokal (*local contents*) dapat ditingkatkan dari 30% hingga 50% menjadi 40% hingga 62%; (8) pada tahap pertama diberlakukannya *local contents*, Singapura lebih banyak menikmati keuntungan, tetapi sekarang telah dinikmati oleh semua negara ASEAN; (9) Indonesia akan menawarkan kepada Malaysia dan Singapura agar mengim-

por bahan baku kebutuhan mereka dari Indonesia, karena selama ini diimpor dari Eropa (*Suara Karya*, 29-11-1989).

### 2. Pertemuan Para Pejabat Senior Perdagangan

Pertemuan para Pejabat Senior Perdagangan ASEAN berlangsung di Yogyakarta tanggal 5-6 Desember 1989 untuk membahas: (1) masalah pengaturan perdagangan tekstil dunia berdasarkan persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan (GATT); (2) upaya memperbaiki penilaian komoditi tekstil di pasar dunia terutama di negara-negara berkembang; (3) sikap bersama untuk menghadapi Babak Uruguay (*Jakarta Post*, 15-12-1989).

Hasil pertemuan antara lain: (1) mereka menyetujui usul Muangthai tentang diberlakukannya suatu masa transisi sebelum memasuki persetujuan tekstil yang baru setelah berlakunya pengaturan multi serat (MFA) selesai tahun 1991. Lama masa transisi sebelum memasuki kembali persetujuan tekstil dunia seperti MFA yang berlaku atas dasar Persetujuan Tarif Perdagangan atau GATT adalah 5-10 tahun; (2) mereka sependapat bahwa perubahan mendadak dalam membebaskan perdagangan tekstil akan berdampak negatif terhadap perdagangan tekstil dunia; (3) mereka menyetujui perdagangan tekstil dunia agar diatur oleh GATT karena akan memungkinkan peningkatan 6% per tahun; (4) negara pengekspor agar diperkenankan melaksanakan peningkatan di atas 10% dalam setiap kuota yang tidak dipakai dalam tahun depan; (5) negara pengekspor diijinkan melaksanakan peminjaman sampai 20% sesudah tahun kuota yang digunakan khusus dalam setiap tahun; (6) hasil yang dibuat dari bahan tekstil tidak dimasukkan dalam sistem kuota; (7) mereka menunjuk Indonesia sebagai wakil ASEAN dalam GATT untuk merundingkan usul ASEAN dengan kelompok perunding tekstil GATT (*Merdeka*, 13-12-1989).

## II. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN

### A. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

#### 1. Pertemuan Kelompok Kerja Media Cetak dan Tradisional

Pertemuan Kelompok Kerja Media Cetak dan Tradisional (KKMCT) ke-5 berlangsung di Yogyakarta



tanggal 13-15 November 1989 untuk: (1) merumuskan kemungkinan bentuk kerjasama antar media cetak atau penerbitan; (2) membahas proyek peningkatan kemampuan jurnalistik wartawan ASEAN.

Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) berbagai proyek kerjasama bidang media cetak dan tradisional ASEAN diharapkan segera dikembangkan; (2) diperlukan proyek-proyek khusus untuk meningkatkan kemampuan wartawan dan penyatuan langkah untuk menghadapi pers asing yang beroperasi di ASEAN; (3) fungsi khusus KKMCT adalah menerapkan gagasan kerjasama seperti yang tercantum dalam keputusan Sidang para Menteri Penerangan ASEAN ke-1 bulan Mei 1989; (4) saling membagi pengalaman mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan negara anggota ASEAN dengan pandangan untuk saling meningkatkan hubungan saling menguntungkan merupakan langkah yang baik; (5) peningkatan kemampuan wartawan dapat dilakukan dengan mengembangkan kesadaran ASEAN berdasarkan keperluan meningkatkan dan menjaga kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kerjasama dan kebersamaan yang lebih besar; (6) kelompok kerja perlu mencari cara dan perangkat untuk melaksanakan keputusan para Menteri ASEAN secara efektif; (7) Penghargaan Tahunan Jurnalisme ASEAN diberikan kepada wartawan yang terpilih di antara enam negara anggota ASEAN yang menghasilkan karya terbaik mengenai gagasan ASEAN tentang kesatuan dan kebersamaan ASEAN, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta sumber daya manusia; (8) Asosiasi Penerbit ASEAN diharapkan dapat dibentuk secepat mungkin agar media cetak dapat mengurus kebutuhan pokoknya; (9) Konfederasi Wartawan ASEAN dapat mengambil bagian dalam penerapan keputusan mengenai pembentukan Asosiasi Penerbit ASEAN; (10) gagasan pembentukan Asosiasi Penerbit ASEAN pernah dikemukakan oleh beberapa penerbit dari negara ASEAN pada tahun 1980, tetapi sampai sekarang belum dapat terlaksana (*Kompas*, 14-11-1989).

Pertemuan sepakat untuk: (1) menyelenggarakan Pertemuan KKMCT ke-6 di Indonesia tahun 1990; (2) mengadakan lokakarya dan seminar ke-4 yang dihadiri oleh wartawan-wartawan kantor-kantor berita negara anggota ASEAN dan organisasi pers yang terkait; (3) mengadakan Program Pertukaran Wartawan Negara Anggota ASEAN ke-4; (4) memberikan penghargaan kepada karya jurnalistik terbaik ASEAN; (5) mengadakan program pertukaran para pejabat penerangan anggota ASEAN; (6) menyelenggarakan pertemuan para

pejabat penerangan negara anggota ASEAN untuk khusus membahas pers asing; (7) mengadakan latihan untuk mengembangkan media cetak dan tradisional di negara anggota ASEAN; (8) menyelenggarakan Konperensi para Pemimpin Media Cetak ASEAN; (9) menyelenggarakan program latihan wartawan kantor berita ASEAN; (10) mengadakan penelitian tentang dampak pemberitaan kantor berita negara anggota ASEAN di lingkungan negara sekitar kawasan; (11) mengadakan lokakarya para wartawan ASEAN yang membidangi pariwisata (*Antara*, 16-11-1989).

Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika (PPG) Departemen Penerangan RI, Janner Sinaga, mengatakan kepada pers di Yogyakarta tanggal 15 November 1989 bahwa: (1) untuk melaksanakan hasil pertemuan itu diperlukan dana US\$735 juta/tahun; (2) pembinaan terhadap pers asing di luar ASEAN diperlukan agar warna pemberitaannya dapat memahami kepekaan nilai-nilai budaya dan sosial kemasyarakatan bangsa ASEAN; (3) selama ini persepsi pers asing di negara-negara anggota ASEAN terhadap nilai-nilai budaya dan kemasyarakatan tuan rumah kurang tepat sehingga sering menimbulkan ganjalan (*Antara*, 16-11-1989).

## 2. Pertemuan Konfederasi Wartawan ASEAN

Pertemuan Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) ke-8 berlangsung di Singapura tanggal 28 November-2 Desember 1989 dihadiri oleh 20 organisasi internasional termasuk mitra CAJ di Jepang, Eropa, AS, Kanada, Australia dan Hongkong untuk membahas: (1) masalah media massa di Asia-Pasifik; (2) perkembangan kerjasama wartawan dan persuratkabaran di ASEAN.

Menteri Penerangan dan Komunikasi Singapura, Dr. Yeo Ning Hong, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) segenap wartawan ASEAN agar mencari bentuk sistem jurnalistik yang sesuai dengan kemajuan bangsa dan negara ASEAN; (2) sistem jurnalistik yang dikenal selama ini, baik gaya Barat maupun gaya komunis, tampaknya telah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan di negara ASEAN; (3) gaya dan bentuk demokrasi yang dijalankan di Jepang selama ini membuat negara itu tidak sekedar menghasilkan dan memperdagangkan barang, tetapi juga berhasil memajukan demokrasi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada untuk turut dikembangkan; (4) bangsa-bangsa Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura sudah maju, sementara Indonesia, Malaysia dan Muangthai mulai mencapai tingkat pertum-



buatan yang baik; (5) wartawan ASEAN dapat menciptakan gaya serta sistem persnya sendiri karena selain para leluhurnya telah mengetahui seni dan budaya yang tinggi sebelum masyarakat Barat mengetahuinya, faktor nilai dan moral bangsa ASEAN juga telah dapat ditegakkan sebagai tonggak dari masyarakat yang kukuh; (6) wartawan ASEAN akan tetap memegang teguh sikap, pandangan dan tanggung jawabnya atas bangsa dan negaranya. Tanggung jawab atas kemajuan dapat dicapai apabila setiap pribadi wartawan menyadari kedudukannya, tidak saja sebagai pribadi tetapi juga merupakan bagian dari anggota masyarakatnya (*Antara*, 19-11-1989).

Sementara itu Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan bahwa: (1) pers dan wartawan ASEAN agar bersama-sama berperanan menyatukan aspirasi masyarakat; (2) pers dan wartawan ASEAN harus memantapkan fungsinya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara-negara anggota untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang; (3) sistem pers yang dikembangkan di kawasan ASEAN adalah sistem kebersamaan, dan tidak mengenal pers yang semata-mata hanya sebagai penjaga demokrasi; (4) sistem pers ASEAN merupakan salah satu unsur pendukung pembangunan yang sangat potensial untuk membawa masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan; (5) prinsip-prinsip pers ASEAN adalah untuk menjaga dan memelihara stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosial, hubungan regional dan pengembangan sumber daya manusia; (6) pers ASEAN agar memiliki peranan dan tanggung jawab untuk terus mengembangkan hubungan positif dan meningkatkan solidaritas di antara negara anggotanya; (7) pers ASEAN agar terus meningkatkan kepekaan untuk menangani isu-isu yang dapat mempengaruhi solidaritas ASEAN (*Kompas*, 1-12-1989).

Seusai pertemuan, Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengadakan kunjungan kehormatan kepada Menteri Komunikasi dan Penerangan Singapura, Dr. Yeo Ning Hong, untuk menandatangani *memorandum of understanding* di bidang siaran dan penerangan antara Indonesia dan Singapura yang memuat kesepakatan untuk: (1) lebih meningkatkan kerjasama di bidang penerangan dan informasi melalui pertukaran film atau material rekaman; (2) mengadakan kunjungan bagi petugas-petugas dan artis-artis radio, televisi dan film serta pejabat-pejabat penerangan; (3) mengadakan program latihan di bidang radio, televisi, kewartawanan dan media cetak; (4) saling tukar-menukar laporan pers

dan publikasi liputan kegiatan pembangunan di negara masing-masing (*Kompas*, 1-12-1989).

Pertemuan itu sepakat agar CAJ: (1) lebih meningkatkan perannya guna mempererat kerjasama di bidang pengembangan profesi wartawan; (2) turut menyukseskan pembangunan, kesejahteraan dan membina stabilitas keamanan kawasan ASEAN; (3) memiliki bentuk dan gaya jurnalistik yang selaras dan sesuai dengan kedudukan dan peranan wartawan di kawasan ASEAN; (4) tidak mengikuti gaya dan bentuk pers Barat; (5) menyadari bahwa nilai budaya dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat ASEAN memberikan peranan yang berarti dan nilai tambah yang memungkinkan pers di kawasan ASEAN dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam masyarakat; (6) menerima baik laporan Ketua Umum masing-masing anggota tentang segala sesuatu yang menyangkut pers dan kewartawanan di negara masing-masing; (7) menerima baik laporan Sekretariat Tetap CAJ di Jakarta; (8) menerima usul Ketua PWI Sugeng Wijaya tentang: (a) rencana Lokakarya "Kunjungan ASEAN 1992" guna menyongsong HUT ASEAN ke-25; (b) mengadakan seminar dengan tema "Penerbangan ASEAN dalam Rangka Menghadapi Perkembangan dan Pertumbuhan Kawasan Asia-Pasifik 1992"; (c) rencana peningkatan ketrampilan wartawan; (9) tawaran kerjasama dari Jepang, Jerman Barat, AS, Kanada, India dan Australia untuk membantu peningkatan profesi dan keterampilan wartawan, serta kunjungan peninjau jurnalistik; (10) penunjukan Ivan Lim dari Singapura sebagai Presiden CAJ periode 1990-1991 dan mengadakan Pertemuan CAJ ke-9 di Bangkok (*Antara*, 4-2-1989).

Sekembalinya dari Singapura Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan kepada pers di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 2 Desember 1989 bahwa: (1) sebuah penerbitan bersama ASEAN perlu dibentuk untuk memperkuat dan memperjuangkan tujuan pendirian CAJ guna mengembangkan citra ASEAN di mata internasional. PM Singapura Lee Kuan Yew, serta masyarakat Singapura sangat mendukung gagasan itu dan negara-negara anggota ASEAN lainnya juga akan mendukungnya; (2) pembentukan penerbitan ini merupakan langkah bersama untuk memperkuat perhimpunan ASEAN yang diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi pula; (3) badan ini berguna untuk mengimbangi derasny arus informasi dari pers Barat yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan isinya yang tidak seimbang, hanya melihat kepentingan mereka; (4) penerbitan itu diharapkan dilakukan oleh kalangan swasta dengan menggunakan wartawan ASEAN yang



terbaik dan menggunakan bahasa Inggris; (5) bentuk isi penerbitan boleh mengkritik pemerintah, tetapi harus bersifat konstruktif dan berpegang pada kode etik CAJ; (6) kerjasama komunikasi dan penerangan ASEAN harus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang yang semakin berat; (8) penanda-tanganan *memorandum of understanding* di bidang penerangan antara Indonesia dan Singapura merupakan sejarah yang penting karena selain baru pertama kali, juga memberi isi dan bobot bagi hubungan kedua negara di masa mendatang (*Kompas*, 4-12-1989).

Presiden Soeharto mengatakan kepada Menteri Penerangan Harmoko di Bina Graha tanggal 5 Desember 1989 bahwa: (1) kerjasama di bidang penerangan perlu terus dikembangkan sehingga memberikan sumbangan untuk memperkuat ketahanan nasional dan regional; (2) dengan kerjasama penerangan ASEAN, diharapkan tercipta suatu peningkatan usaha untuk meningkatkan isi dan program siaran terutama dalam melestarikan budaya ASEAN (*Kompas*, 6-12-1989).

## B. KERJASAMA KEAMANAN ASEAN

### *Sidang ASEANAPOL ke-9*

Sidang para Kepala Kepolisian Negara ASEAN ke-9 berlangsung di Denpasar tanggal 3-6 November 1989, dihadiri oleh 32 orang dari seluruh anggota ASEAN untuk membahas: (1) upaya memerangi berbagai jenis kejahatan yang menonjol di ASEAN seperti kejahatan ekonomi, uang palsu, penyelundupan narkoba, senjata api dan bahan peledak; (2) perdagangan bayi.

Menteri Pertahanan Keamanan L.B. Moerdani mengatakan pada pembukaan sidang bahwa: (1) pada hakikatnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hubungan ASEANAPOL adalah permasalahan keamanan, tetapi bukan keamanan dalam pengertian pertahanan keamanan terhadap ancaman dari luar yang mengancam kelangsungan hidup negara; (2) ASEANAPOL tidak diartikan sebagai suatu kerjasama regional dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam arti strategik dan militer; (3) ASEANAPOL bukan merupakan suatu lembaga kerjasama untuk menuju terciptanya suatu pertahanan dan keamanan atau pakta militer; (4) pertemuan diharapkan memberikan sumbangan bagi peningkatan saling pengertian di antara rakyat ASEAN; (5) ASEANAPOL merupakan refleksi dan manifestasi dari meluasnya serta meningkatnya intensitas kerjasama regional dalam rangka ASEAN; (6) meningkatnya

intensitas kerjasama ASEAN semakin mendorong meningkatnya interaksi dan komunikasi antar negara ASEAN dan rakyat ASEAN dan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi peningkatan kesadaran serta sosialisasi cita-cita yang pada gilirannya akan memupuk persatuan dan solidaritas ASEAN; (7) ASEANAPOL penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul, seperti kemungkinan kegiatan penyelundupan, pelintas batas secara gelap, perdagangan obat terlarang dan kegiatan melanggar hukum lainnya, termasuk dalam segala bentuk dan tingkatan (*Angkatan Bersenjata*, 3-11-1989).

Seusai menutup Pertemuan ASEANAPOL ke-9, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Moch. Sanoesi mengatakan kepada pers bahwa: (1) kasus perdagangan bayi yang merupakan tindakan tidak manusiawi kini mulai menunjukkan perkembangan yang meningkat; (2) Kepolisian RI dan Serawak baru-baru ini berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi; (3) banyak faktor yang melatarbelakangi penyelundupan dan perdagangan bayi, oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam (*Suara Karya*, 7-11-1989).

Mereka sepakat untuk: (1) memerangi kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan perbankan dan uang palsu serta meningkatkan upaya preventif dan represif terhadap kejahatan penyelundupan narkoba serta penyelundupan senjata api dan bahan peledak; (2) tukar-menukar personil guna meningkatkan kemampuan kepolisian melalui pendidikan atau program-program lain yang diadakan bersama di negara-negara ASEAN; (3) mengadakan pertukaran daftar penjahat yang dianggap berbahaya atau sangat dimintakan perhatiannya untuk ditangkap; (4) saling tukar-menukar informasi nama-nama pejabat di lingkungan kepolisian masing-masing agar dalam situasi yang mendesak dapat segera dihubungi; (5) mengembangkan solidaritas antar kepolisian anggota ASEAN; (6) mengadakan Sidang ASEANAPOL ke-10 tahun 1990 di Malaysia (*Angkatan Bersenjata*, 7-11-1989).

## III. ORGANISASI NON-PEMERINTAHAN (NGO)

### A. PERTEMUAN FASA KE-15

Pertemuan FASA ke-15 berlangsung di Jakarta tanggal 20-21 November 1989 untuk membahas proyek-proyek yang telah dikerjakan selama ini dan serah terima jabatan Ketua FASA dari Indonesia kepada Malaysia (*Business News*, 22-11-1989).



Menteri Perhubungan RI, Ir. Azwar Anas, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) meningkatnya hubungan ekonomi antara negara-negara ASEAN akhir-akhir ini menuntut perlunya fasilitas angkutan sesama anggota pelayaran ASEAN; (2) FASA sangat bermanfaat bagi ASEAN dan semakin dirasakan keberadaannya (*Angkatan Bersenjata*, 21-11-1989).

Seusai pembukaan pertemuan, Ketua FASA Hartoto Hardikusumo menegaskan kepada pers bahwa: (1) anggota FASA masih tetap sepakat untuk melakukan kerjasama untuk menghadapi pelayanan negara-negara maju, terutama pasaran tunggal Eropa; (2) FASA telah melakukan berbagai kegiatan bersama untuk saling memanfaatkan potensi armada atau pengalaman masing-masing negara anggota ASEAN; (3) banyak negara-negara Asia-Pasifik ingin masuk menjadi anggota FASA; (4) kerjasama FASA yang konkrit ialah tukar-menukar informasi dan saling membantu dalam pendidikan dan latihan (*Angkatan Bersenjata*, 21-11-1989).

Pertemuan sepakat: (1) agar dana pembangunan kapal-kapal untuk pelayaran ASEAN diangkat dalam Pembicaraan Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN ke-19; (2) untuk lebih memperhatikan kepentingan dan pelaksanaan Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN tentang pelayaran dan perkapalan; (3) untuk mengamankan angkutannya masing-masing secara nasional dalam kerangka kerjasama FASA agar tidak selalu dimakan oleh armada angkutan internasional; (4) untuk membuat resolusi kepada pemerintah AS agar tidak melarang kapal-kapal berbendera Panama memasuki pelabuhan di AS; (5) menunjuk Arifin dari Asosiasi Pelayaran Malaysia (MASA) sebagai Ketua FASA dan Miguel A. Magsaysay dari Asosiasi Pelayaran Filipina (FSA) sebagai wakilnya, sedangkan Hartoto dari Indonesia (INSA) sebagai penasihat (*Angkatan Bersenjata*, 23-11-1989).

## B. PERHIMPUNAN HUKUM ASEAN (ALA)

Pertemuan ALA ke-9 berlangsung di Denpasar tanggal 6-10 Desember 1989, dihadiri oleh 300 orang dari anggota ASEAN untuk membahas masalah lisensi, hukum internasional dan kerjasama pendidikan hukum serta harmonisasi pembangunan hukum ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 18-11-1989).

Ketika menerima Pengurus Komite Nasional Indonesia dan Komite Organisasi Perhimpunan Hukum ASEAN di Istana Wakil Presiden, Wapres Sudharmono

mengatakan bahwa: (1) anggota ASEAN agar mencari dan mengembangkan kesamaan nilai hukum di bidang perdagangan serta mencari kekuatan dengan semangat ASEAN untuk menghadapi negara-negara saingan; (2) ASEAN hendaknya tidak terpecah-pecah serta menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat kompetitif, karena pada umumnya negara-negara ASEAN menjual komoditi yang sama; (3) kesamaan itu agar dijadikan pendorong untuk mendapatkan kesatuan pendapat dalam rangka melakukan dialog dengan negara-negara maju; (4) harmonisasi hukum ASEAN diperlukan agar dapat mengurangi perbedaan yang menonjol dan sifat yang kompetitif (*Antara*, 16-11-1989).

Ketua KNI, Purwoto S. Gandasubrata, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 16 November 1989 bahwa: (1) masing-masing negara anggota ASEAN mempunyai sistem hukum yang berbeda; (2) ALA sedang berusaha menciptakan harmonisasi pembangunan hukum di kawasan ASEAN agar perbedaan sistem hukum yang dianut masing-masing negara anggota tidak menjadi penghambat pembangunan mereka; (3) selama ini upaya harmonisasi ditekankan pada bidang-bidang yang praktis dan banyak menyangkut bidang ekonomi karena sebagian besar negara anggota ASEAN mempunyai hasil komoditi yang hampir serupa; (4) upaya menciptakan harmonisasi selama ini tidak menghadapi masalah karena yang dibahas bukan masalah yang sangat sensitif, seperti hukum perkawinan masing-masing negara, melainkan masalah perpajakan; (5) dalam kerjasama hukum masing-masing negara dapat mempelajari perkembangan hukum yang ada di negara lainnya (*Antara*, 16-11-1989).

Keputusan-keputusan yang dihasilkan antara lain: (1) merekomendasikan kepada pemerintah negara anggota masing-masing agar mereka membuat peraturan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang dapat dieksekusi di tiap-tiap negara anggota sesuai asas resiprositas; (2) sepakat mendirikan semacam akademi hukum perbandingan ASEAN sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan hukum negara-negara anggota ASEAN; (3) sepakat melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi suatu kasus di negara di mana saksi bertempat tinggal; (4) sepakat menggunakan sistem komputerisasi data hukum dan saling tukar menukar data tentang daftar registrasi hak patent; (5) menghimbau pemerintah masing-masing negara anggota untuk membuat peraturan di bidang hukum dagang dan ekonomi; (6) menunjuk Purwoto S. Gandasubrata SH dan Prof. Dr. Komar Kantaatmadja SH sebagai Presiden dan Sekjen ALA yang baru; (7) Pertemuan ALA ke-6 akan diselenggara-



kan di Manila tahun 1992 (*Suara Pembaruan*, 11-11-1989).

C. PERTEMUAN INFORMAL JAKSA AGUNG ASEAN

Pertemuan Informal para Jaksa Agung ASEAN berlangsung di Denpasar, tanggal 9 Desember 1989, dihadiri oleh Jaksa Agung Muangthai Prof. Dr. Komain Bhatarabiron, Jaksa Agung Brunei Darussalam, Pengiran Haji Bahrin Bin Pengiran Haji Abbas, Jaksa Agung Malaysia, Tan Sri Abu Thalib Bin Othman, Jaksa Agung Singapura, Tan Boon Teik, Jaksa Agung Indonesia, Sukarton Marmosudjono selaku tuan rumah, dan Jaksa Agung Filipina berhalangan hadir karena keadaan negaranya (*Suara Pembaruan*, 12-11-1989).

Seusai pertemuan, Jaksa Agung, Sukarton Marmosudjono mengatakan kepada pers bahwa: (1) pertemuan berniat menggalang dan meningkatkan kerjasama di bidang hukum; (2) mereka sepakat agar materi kerjasama di bidang hukum dituangkan secara lebih konkrit pada pertemuan formal para Jaksa Agung ASEAN; (3) pertemuan menetapkan agar materi kerjasama lebih dulu dibahas oleh para pejabat senior kejaksaan ASEAN pada tahun 1990 di Brunei Darussalam; (4) mereka sepakat mengenai perlunya kerjasama hukum, meskipun sistem hukum antar negara ASEAN berbeda, serta saling tukar menukar informasi lewat telepon untuk hal-hal yang dianggap perlu; (5) mereka merasakan kesamaan untuk memerangi kejahatan guna menegakkan hukum di negara masing-masing; (6) kemajuan teknologi dan perekonomian di negara-negara ASEAN diperkirakan akan pula membawa dampak kejahatan, seperti kejahatan perdagangan yang memerlukan kerjasama penegakan hukum untuk mengatasinya; (7) pertemuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kejahatan yang bersifat internasional (*Suara Pembaruan*, 12-12-1989).

D. PERTEMUAN ASOSIASI PENILAI ASEAN

Pertemuan para Pengusaha Jasa Penilai ASEAN (*ASEAN Valuers Association* atau AVA) ke-5 berlangsung di Manila tanggal 29 November-2 Desember 1980, diikuti oleh 300 orang dari wakil-wakil ASEAN serta utusan-utusan Kanada, Jepang dan PBB sebagai peninjau, untuk membahas masalah: (1) pembentukan Sekretaris Jenderal permanen AVA; (2) penerbitan bulletin berkala untuk informasi (*Merdeka*, 2-12-1989).

Ketua I Asosiasi Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPI), Ir. Doli Diapari Siregar, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 6 November 1989 bahwa: (1) delegasi Indonesia akan berupaya menggambarkan kemajuan ekonomi yang telah dicapai untuk menarik investor asing agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia; (2) keberhasilan Indonesia mengantisipasi penurunan pendapatan dari ekspor non-migas serta berbagai kebijaksanaan deregulasi pemerintah akan merupakan daya pikat bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor properti industri, properti residensi, komersial atau non-urban; (3) kesempatan berusaha di bidang perhotelan sangat besar karena sedang digalakkan oleh pemerintah guna mengejar ketinggalan dari Singapura dan Muangthai; (4) kini tiba saatnya bagi pemerintah untuk membuat suatu undang-undang yang mengatur jasa penilai; (5) belum disertakannya jasa penilai dalam proses penentuan suatu perusahaan yang akan melakukan *go public* melalui pasar modal akan memunculkan tanda tanya bagi para investor pembeli saham mengenai berapa besar sebenarnya nilai kekayaan dari perusahaan itu (*Merdeka*, 7-11-1989).

Ketua Dewan Pengarah AVA dari Indonesia, Dr. J.B. Kristiadi, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 1 Desember 1989 bahwa: (1) Dewan Pengarah AVA masing-masing negara terdiri dari dua unsur pemerintah dan dua dari swasta. Dewan Pengarah dari Indonesia terdiri atas Direktur Pembinaan Anggaran Lain-lain dan Kekayaan Negara, Dr. J.B. Kristiadi selaku Ketua Umum MAPPI dan Jusuf Anwar dari Bapepam, sedangkan dari swasta adalah Piet Haryono dan Anton; (2) Dewan Pengarah AVA secara aklamasi menerima usul Indonesia mengenai: (a) pembentukan Sekretaris Jenderal permanen; (b) penerbitan bulletin berkala untuk bahan informasi para investor yang ingin menanamkan modalnya di kawasan ASEAN; (c) laporan berkala AVA pada ASEAN agar pemerintah masing-masing negara anggota memberikan perhatian terhadap profesi penilai yang terdapat di negaranya; (4) pembentukan Sekjen AVA semula ditentang oleh beberapa peserta karena harus mengubah Anggaran Dasar AVA, akhirnya disepakati untuk perubahan Anggaran Dasar yang akan diselesaikan sebelum Pertemuan AVA ke-6; (5) untuk membentuk Sekjen permanen, Indonesia dan Muangthai telah menyumbang dana masing-masing US\$1.000 dan Singapura US\$500; (6) pengadaan informasi AVA akan memudahkan para investor mengetahui bagaimana memperoleh tanah di suatu negara dan penentuan harganya.

Sekretaris Menteri Keuangan Filipina, Vicente, me-



ngatakan bahwa: (1) kerjasama antar profesi penilai di ASEAN dapat ditingkatkan agar bermanfaat bagi pembangunan di masing-masing negara anggota; (2) kebutuhan jasa penilai di ASEAN telah cukup mendesak mengingat keadaan perekonomiannya yang terus berkembang; (3) peranan jasa penilai di ASEAN dalam masalah pertanahan sangat mendukung program pengembangan kota; (4) jasa penilai di Filipina tidak dapat dipisahkan dari pemerintah maupun pengusaha real estate.

Sementara itu delegasi Indonesia, Piet Haryono, mengatakan bahwa: (1) profesi penilai di Indonesia belum banyak dikenal, dan kehadiran Indonesia dalam pertemuan ini sangat penting untuk mempertinggi kualitas profesi penilai; (2) Indonesia saat ini sedang menggalakkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karenanya dalam penilaian tanah dapat membandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang telah lama memanfaatkan jasa penilai; (3) profesi penilai tidak saja dapat dimanfaatkan dalam penilaian tanah, tetapi juga menilai perusahaan-perusahaan yang akan *go public*, apakah layak atau tidak dan berapa nilai saham yang wajar; (4) jasa penilai banyak membantu untuk menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara; (5) profesi penilai dapat membantu suatu perusahaan yang ingin memperluas investasinya untuk menilai berapa investasi yang dibutuhkan dan berapa kredit yang dapat dimanfaatkan dari bank; (6) bank dapat memperoleh manfaat dari penilai karena mengetahui secara pasti berapa agunan untuk mengamankan kredit yang akan diberikan guna memperluas investasi. Hal ini sangat berguna bagi bank terutama bank milik pemerintah sehingga kekayaan negara dapat diamankan (*Merdeka*, 2-12-1989).

Pertemuan sepakat untuk: (1) menerapkan sistem penilaian yang seragam sehingga memiliki standar yang sama; (2) mendirikan Sekretariat Jenderal AVA permanen yang berkedudukan di Kuala Lumpur, karena Malaysia lebih berpengalaman dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya; (3) mendirikan Kantor Sekjen AVA dengan masing-masing anggota menyumbang US\$1.000, kecuali Singapura US\$500; (4) mendirikan pusat-pusat pendidikan penilai di masing-masing negara anggota melalui kerjasama pemerintah, swasta dan kalangan perguruan tinggi agar profesi penilai benar-benar dapat diandalkan; (5) menunjuk Dirjen Penilaian dari Malaysia, Ravindra Daas dan H. Nawawi, masing-masing sebagai Presiden AVA dan Sekjen AVA, sedangkan Piet Haryono dari Indonesia terpilih sebagai Ketua Umum; (6) menyelenggarakan Pertemuan AVA ke-6 di Kuala Lumpur tahun 1990 (*Merdeka*, 4-12-1989).

Penasihat Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, Jusuf Anwar, mengatakan kepada pers tanggal 3 Desember 1989 bahwa: (1) beberapa faktor yang membuat profesi penilai di Indonesia berpeluang cukup baik adalah: (a) meningkatnya arus penanaman modal dari negara-negara industri ke negara-negara ASEAN; (b) meningkatnya kegiatan pasar modal di Indonesia akhir-akhir ini; (2) tenaga penilai yang profesional hanya dapat dihasilkan melalui pendidikan formal, untuk itu GAPPI sedang menyiapkan suatu pendidikan tingkat sarjana dan sarjana muda; (3) profesi penilai harus mampu meningkatkan citra yang baik dengan membentuk kode etik sebagai aturan main yang harus ditaati; (4) keikutsertaan Indonesia dalam Pertemuan AVA ke-5 untuk menimba pengalaman dan saling tukar informasi mengenai jasa penilai antar ASEAN (*Merdeka*, 5-12-1989).

#### E. PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Para Ahli Penanggulangan Bencana Alam ASEAN mengadakan pertemuan di Manila tanggal 13-15 Desember 1989 untuk: (1) mengkaji seberapa jauh kecenderungan bencana alam di negara-negara ASEAN; (2) mencari penemuan baru atau cara penanggulangan dan persiapan guna menghadapi bencana alam; (3) saling tukar menukar pengalaman dalam penanganan bencana alam yang telah terjadi; (4) saling membantu jika sebuah negara terkena bencana alam dengan bantuan teknik dan fisik (*Merdeka*, 12-12-1989).

#### IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

##### A. HUBUNGAN ASEAN-JEPANG

###### 1. Kerjasama Energi

Pada awal bulan Januari 1990, Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) dan Badan Sumber Daya Alam Jepang akan mengirim misi energi ke negara-negara ASEAN untuk mempromosikan pengembangan dan penggunaan sumber-sumber energi bebas polusi. Tujuan pengiriman adalah untuk membantu negara-negara ASEAN yang mengalami perkembangan industri yang memerlukan banyak energi. Diperkirakan bahwa pada tahun 2000 kebutuhan tenaga listrik naik 2,4 kali dari tingkat sekarang. Bantuan teknologi penghematan energi juga akan dibicarakan (*Antara*, 4-12-1989).



## 2. *Kerjasama Kebudayaan*

Konsul Muda Jepang, Katsuthosi Miyakawa, mengatakan di Medan tanggal 22 Desember 1989, bahwa: (1) pada tanggal 10 Januari 1990 sebuah organisasi kebudayaan Jepang akan membuka Pusat Kebudayaan ASEAN di Tokyo; (2) gagasan pembentukan pusat kebudayaan ini diajukan kepada pemerintah Jepang oleh sebuah misi budaya tingkat tinggi negara-negara ASEAN November 1987; (3) fungsi utama pusat kebudayaan itu adalah untuk memperlancar masuknya kebudayaan negara-negara Asia; (4) pusat kebudayaan itu akan menyediakan informasi tentang kebudayaan negara-negara ASEAN dan diharapkan menjadi titik temu para seniman ASEAN (*Antara*, 23-12-1989).

## 3. *Seminar "Dampak Pembentukan Pasar Baru Eropa Terhadap Peran Ekonomi Jepang di Asia Tenggara"*

Dalam seminar sehari dengan judul "Dampak Pembentukan Pasar Baru Eropa terhadap Peran Ekonomi Jepang di Asia Tenggara" yang diselenggarakan oleh Centre for Japanese Studies di Gedung Unas Jakarta, tanggal 21 Desember 1989, Heru Utomo Kuntjoro-Jakti, Ph.D. mengatakan bahwa: (1) perubahan-perubahan yang terjadi di negara-negara Eropa Timur dan rencana pembentukan pasar tunggal Eropa merupakan fenomena-fenomena awal dari perubahan global dunia yang menjurus ke arah banyak kutub dan relativisasi banyak hal di bidang ekonomi; (2) Jepang, ASEAN dan negara di luar Eropa akan menghadapi tantangan berat, karena perubahan ke banyak kutub itu dibarengi dengan trend terbentuknya kubu ekonomi regional seperti Pasar Eropa 1992 nanti.

Bob Widyahartono memperkirakan akan terbentuknya beberapa sistem ekonomi regional yang terdiri dari Jepang, Pasar Eropa yang diperluas, Group AS, Kanada dan Meksiko, COMECON, serta RRC. Semua sistem regional akan bergerak menuju sistem pasar bebas dan terlepas dari ikatan-ikatan ideologis. Dengan sistem sentralisasi tertutup seperti sekarang ini, RRC tidak mungkin bertahan menghadapi sistem terbuka yang melanda Eropa Timur. Akibat terbentuknya sistem ekonomi tersebut, peran ASEAN akan semakin menguat dan keberhasilan ASEAN cukup membuat Jepang percaya diri untuk menghadapi pasar bersama Eropa. Di samping itu dia juga menjelaskan komparasi tentang pertumbuhan ekonomi beberapa negara, seperti ASEAN 4,2%, Jepang 4%, Eropa Barat 1,5%, semen-

tara pertumbuhan dunia rata-rata sekitar 2% (*Pelita*, 22-12-1989).

## B. HUBUNGAN ASEAN-MEE

*European Community (EC) Commission* bekerjasama dengan Komite Gabungan Penanaman Modal EC-Indonesia menyelenggarakan lokakarya di Jakarta tanggal 23-24 November 1989 tentang penanaman modal di sektor-sektor industri tertentu, untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara yang tergabung dalam *European Community* dan ASEAN.

Emmanuel Merch dari *The Commission of the European Communities* mengatakan bahwa: (1) lokakarya didasarkan pada proposal-proposal proyek tertentu yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan dan rencana penanaman modal di negara yang dituju; (2) peserta terbatas hanya bagi perusahaan di Eropa dan ASEAN yang menunjukkan minat untuk bekerja sama dan bertujuan mewujudkan kerjasama penanaman modal industri di negara-negara ASEAN.

Kerjasama antara Eropa dan ASEAN diwujudkan dalam bentuk: (1) penanaman modal untuk usaha bersama; (2) perijinan teknologi; (3) perluasan fasilitas produksi untuk persaingan yang lebih efektif; (4) pengadaan sasaran-sasaran ekspor baru; (5) penyusunan bentuk-bentuk pemasaran yang baru serta bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan maksud tujuan dari perusahaan tersebut.

John Leech Ketua Rural Investment Overseas Ltd. (RIO) dari Inggris mengatakan bahwa: (1) Lokakarya akan menjadi wahana kerjasama negara-negara ASEAN dan Eropa; (2) para ahli akan hadir untuk membantu memberikan informasi-informasi tentang insentif-insentif EC dan ASEAN, sistem perundang-undangan dan pajak, serta saran-saran dari pihak-pihak yang terlibat dalam usaha bersama; (3) EC akan memberikan bantuan biaya penelitian dan modal; (4) ada peluang memperoleh kemudahan-kemudahan di pasaran ASEAN melalui preferensi tarif yang layak (*Business News*, 13-11-1989).

## C. HUBUNGAN ASEAN-KANADA

Pertemuan Komite Kerjasama atau *Joint Committee Corporation (JCC)* ke-6 ASEAN-Kanada berlang-



sung di Bandar Seri Begawan Brunei, tanggal 21-22 November 1989, dihadiri oleh 51 pejabat dan 24 pengusaha, mengenai perluasan kerjasama ekonomi untuk: (1) menyusun rencana kerjasama di masa mendatang; (2) meninjau kemajuan proyek-proyek yang sedang berjalan yang melibatkan Kanada dan ASEAN; (3) merencanakan peningkatan kerjasama perdagangan, industri dan pembangunan.

Pejabat pada Kemlu Brunei, Yusof Abdul Hamid, mengatakan pada pembukaan sidang itu bahwa para pengusaha Kanada sepatutnya memanfaatkan iklim usaha maju di wilayah ASEAN untuk meningkatkan perdagangan kedua belah pihak (*Antara*, 22-11-1989).

#### D. HUBUNGAN ASEAN-ASIA PASIFIK

##### *Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC)*

Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) berlangsung di Canberra tanggal 6-7 November 1989, dihadiri oleh 300 orang yang mewakili 12 negara ASEAN, AS, Kanada, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang dan Australia untuk membahas pertumbuhan dan kerjasama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas, selaku Ketua Panitia Tetap ASEAN mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) negara-negara di Asia-Pasifik agar bertindak hati-hati dan tidak tergesa-gesa untuk membentuk sebuah forum kerjasama ekonomi Asia-Pasifik serta jangan mengambil keputusan berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sifatnya mengikat seluruh negara peserta. Forum jangan sampai mengarah kepada pengesahan kebijaksanaan yang wajib dilaksanakan oleh setiap negara peserta; (2) ASEAN bersedia membaur dalam proses konsultasi yang konstruktif untuk mempersiapkan era baru kerjasama ekonomi Asia-Pasifik dengan berlandaskan kepada saling ketergantungan, kesamaan kesempatan dan keuntungan; (3) negara-negara di Asia-Pasifik perlu mendalami kemungkinan pengembangan modalitas yang efektif bagi kerjasama ekonomi.

Menteri Perdagangan Thailand, Dr. Subin Pinkayan, sebagai Ketua Forum Menteri Ekonomi ASEAN mengatakan bahwa: (1) setiap upaya pengembangan kerjasama jangan sampai mengganggu identitas dan kohesi ASEAN; (2) kerjasama yang ingin ditingkatkan harus terpusat pada masalah-masalah ekonomi (*Antara*, 6-11-1989).

Dalam pertemuan itu terdapat beberapa perbedaan pandangan seperti antara ASEAN dan Jepang. ASEAN belum setuju dan menganggap belum perlu mengikuti Cina, Taiwan dan Hongkong dalam forum kerjasama ekonomi Asia-Pasifik itu. Sedangkan Jepang yang diikuti oleh Australia ingin memasukkan ketiga negara itu ke dalam konsultasi dan diskusi mengenai peningkatan ekonomi di Asia-Pasifik (*Antara*, 6-11-1989).

Menteri Industri dan Perdagangan Jepang, Hikaru Matsunaga, mengatakan bahwa: (1) pola pembangunan ekonomi harus berubah dari situasi ketergantungan pasar AS ke situasi ketergantungan antar negara kawasan; (2) Jepang bersedia mendorong upaya peningkatan ke arah diversifikasi pasar dengan memperbaiki akses pasar dan peningkatan bantuan ekonomi; (3) kerjasama hendaknya dilakukan secara bertahap agar mencerminkan adanya kepentingan bersama; (4) peningkatan penanaman modal dan alih teknologi menjadi perhatian Jepang (*Antara*, 7-11-1989).

Antara tanggal 6 November 1989 memberitakan sebagai berikut: (1) ASEAN akan menentang setiap usaha untuk membahas pembentukan suatu blok ekonomi regional versi Asia-Pasifik; (2) keikutsertaan ASEAN dalam Pertemuan Tingkat Menteri Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Canberra tanggal 6 November 1989 bukan berarti bahwa negara-negara anggota ASEAN mendukung konsep APEC; (3) ASEAN menyadari arti pentingnya mempererat kerjasama ekonomi di kalangan negara-negara Asia-Pasifik mengingat kemampuan wilayah ini terus meningkat dan juga sebagai persiapan menghadapi rencana penyatuan pasar Eropa; (4) ASEAN lebih dulu telah dihindangi kekhawatiran bahwa susunan suatu blok ekonomi regional pasti hanya akan menguntungkan kepentingan ekonomi negara-negara maju dan mungkin dapat merusak persatuan dan keutuhan ASEAN; (5) ketidakhadiran beberapa Menteri Luar Negeri dan Perdagangan negara anggota ASEAN pada Pertemuan Canberra mencerminkan kecurigaan ASEAN mengenai niat nyata negara-negara maju yang ikut dalam pertemuan itu.

Menlu Jepang, Taro Nakayama, mengatakan di Canberra tanggal 6 November 1989 bahwa: (1) kualitas pembangunan sangat tergantung pada kualitas manusia; (2) untuk peningkatan kemampuan perlu mengikutsertakan kalangan swasta, dan prioritas lain yang perlu ditangani adalah mengatasi situasi ekonomi dan menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan sektor swasta.



Meskipun tidak tercapai kesepakatan tentang langkah-langkah strategis dan mendasar tentang struktur kerjasama dan mekanisme pendukung kelancaran kerjasama, pertemuan itu setuju untuk meneruskan konsultasi.

Mereka juga sepakat untuk memfokuskan kerjasama di bidang investasi, peralihan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan empat bidang program kerja yang disetujui meliputi: (1) studi ekonomi yang menganalisa dan menelaah kembali pandangan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik; (2) liberalisasi perdagangan; (3) investasi peralihan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia; (4) kerjasama sektoral dalam bidang-bidang turisme, energi, promosi perdagangan dan masalah alam lingkungan.

Prinsip-prinsip dasar yang disetujui dalam pertemuan itu meliputi: (1) sasaran untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan di kawasan Asia-Pasifik, yang akan dapat memberikan sumbangan pada ekonomi dunia; (2) mengakui perbedaan-perbedaan yang ada di kawasan Asia-Pasifik, termasuk perbedaan sosial dan ekonomi; (3) kerjasama harus mencakup komitmen pada dialog terbuka dan konsensus yang menghormati pendapat masing-masing; (4) kerjasama harus berdasarkan pertukaran pandangan yang konsultatif dan non-formal; (5) APEC harus terfokus pada isu-isu ekonomi dan untuk menguatkan sistem perdagangan multilateral serta tidak boleh membentuk suatu blok; (6) kerjasama itu harus meningkatkan keuntungan dari interdependensi, baik untuk kawasan maupun dunia; (7) kerjasama harus *complement* (*Kompas*, 8-11-1989).

Menlu Ali Alatas, mengatakan pada jumpa pers tanggal 7 November 1989 bahwa: (1) ASEAN tidak bermaksud memonopoli dan memaksakan cara hidupnya kepada negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik; (2) forum kerjasama regional yang sudah ada seperti mekanisme ASEAN-PMC, perlu dimanfaatkan; (3) ASEAN tidak bermaksud memperkecil arti kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (*Antara*, 7-11-1989).

Ketua Pertemuan Menlu Gareth Evans mengatakan kepada pers bahwa: (1) para Menteri dari ke-12 negara peserta menganggap terlalu dini untuk memutuskan struktur sebuah forum tingkat menteri; (2) pertemuan selanjutnya akan dilangsungkan di Singapura pertengahan 1990 pada tingkat konsultasi; (3) belum ada kesepakatan keikutsertaan Cina, Taiwan dan Hongkong; (4) sumbangan ASEAN dan mitra dialognya terhadap

perkembangan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik merupakan hal yang penting; (5) perlu adanya peningkatan negosiasi-negosiasi perdagangan multilateral (*Antara*, 7-11-1989).

Seusai menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha, tanggal 14 November 1989, Menteri Perindustrian Hartarto mengatakan bahwa: (1) para pengusaha Indonesia agar mempersiapkan diri untuk menghadapi kerjasama ekonomi Asia-Pasifik; (2) peluang bisnis bagi pengusaha Indonesia terletak pada ekspor non-migas; (3) para pengusaha Indonesia agar meningkatkan mutu produk dan aktif mencari mitra usaha.

Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) secara politis pertemuan dinilai cukup berhasil; (2) meskipun telah tercapai pengertian yang jelas mengenai posisi ASEAN, usul ASEAN mengenai mekanisme ASEAN-PMC belum diterima; (3) ASEAN bersatu sikap dalam pertemuan (*Antara*, 14-11-1989).

#### E. HUBUNGAN ASEAN-PBB

Dalam siaran persnya tanggal 3 November 1989, Kantor Perwakilan UNDP di Jakarta menyatakan: (1) Sekjen Sekretariat ASEAN, Rusli Noor atas nama ASEAN dan Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Galal M. Magdi, menandatangani dokumen ASEAN-UNDP tentang proyek kerjasama teknik untuk mendukung upaya penegakan hukum guna memerangi perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba; (2) untuk itu UNDP memberi bantuan dana US\$200.000 (*Antara*, 3-11-1989).

#### F. HUBUNGAN ASEAN-AMERIKA LATIN

Pada tanggal 14 Desember 1989, juru bicara pemerintah Thailand, Suvit Yodmani, mengatakan bahwa: (1) Thailand dan Meksiko sepakat bahwa ASEAN dan Kelompok Tujuh Negara Amerika Latin perlu memperbanyak komunikasi; (2) kerjasama ekonomi, perdagangan, penanaman modal, pariwisata dan penerbangan perlu ditingkatkan; (3) perlu diselenggarakan Pertemuan para Menlu ASEAN dan Kelompok Tujuh Negara Amerika Latin; (4) Thailand dan Meksiko sepakat mengadakan pertukaran teknologi petrokimia; (5) pembukaan Kedutaan Besar Meksiko di Thailand merupakan langkah peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan (*Antara*, 16-12-1989).



## V. USAHA ASEAN MEMBANTU MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

### A. RENCANA PERTEMUAN PERDAMAIAN KAMBOJA

Dalam rangka membuka kembali perundingan perdamaian Kamboja, PM Chatichai Choonhavan mengatakan di Bangkok tanggal 1 November 1989 bahwa: (1) empat faksi Kamboja yang bertikai, agar mengadakan pembicaraan informal untuk membahas pembentukan mekanisme pengawasan internasional guna memeriksa penarikan pasukan Vietnam dan mengawasi penyelesaian politik di Kamboja; (2) pertemuan informal itu hendaknya menitikberatkan pada pemeriksaan pasukan, penghentian bantuan militer dari pihak luar dan penetapan gencatan senjata, serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan sementara.

Himbauan PM Chatichai Choonhavan ini didukung oleh Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, meskipun ada beberapa pendapat yang menentanginya karena pertemuan itu dianggapnya dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh (*Antara*, 1-11-1989).

Menlu Ali Alatas mengatakan pada pertemuannya dengan Kelompok Kerja PWI Pusat Bidang Luar Negeri di Jakarta 1 November 1989 bahwa: (1) rencana pertemuan informal tentang Kamboja bukan merupakan kelanjutan dari JIM, oleh sebab itu tidak dapat disebut JIM III; (2) penamaan JIM III untuk pertemuan informal dapat menimbulkan anggapan bahwa pertemuan itu dilakukan dalam kerangka dua JIM sebelumnya, sehingga dapat dinilai sebagai kemunduran; (3) dia dan Menlu Roland Dumas selaku Ketua ICK bersedia untuk membantu usaha mengadakan konsultasi dengan peserta konperensi dalam jangka waktu enam bulan untuk menentukan waktu dimulainya kembali konperensi di Paris; (4) pihak-pihak yang bersengketa agar segera kembali ke meja perundingan (*Kompas*, 2-11-1989).

Dutabesar Vietnam untuk Muangthai (Thailand), Le Mai, mengatakan di Bangkok tanggal 7 November 1989 bahwa: (1) Pertemuan Jakarta itu agar diselenggarakan pada bulan Desember 1989; (2) Vietnam mendukung kebijaksanaan Thailand untuk mengubah medan pertempuran menjadi lokasi pasar (*Kompas*, 9-11-1989); (3) Phnom Penh siap membahas masalah mekanisme pengawasan internasional, gencatan senjata dan pengawasan pemilu, tetapi menolak pembentukan pemerintahan sementara yang mengikutsertakan ketiga faksi perlawanan Kamboja, termasuk Khmer Merah; (4) jika

dalam Pertemuan Jakarta dicapai persetujuan, Phnom Penh bersedia mempertimbangkan keikutsertaan Khmer Merah (*Suara Karya*, 11-11-1989).

Menlu Ali Alatas mengatakan di Jakarta tanggal 14 November 1989 bahwa: (1) dua pemimpin kelompok yang tergabung dalam Pemerintahan Koalisi Perlawanan Kamboja (CGDK), Pangeran Sihanouk, yang dalam hal ini diwakili oleh Pangeran Norodom Ranaridh dan Son San, Vietnam dan PM Kamboja dukungan Vietnam, Hun Sen, akan hadir dalam Pertemuan Jakarta (*Antara*, 16-11-1989).

Pada tanggal 16 November 1989, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Ho The Lan, mengusulkan agar negara peserta pertemuan dibatasi jumlahnya (*Angkatan Bersenjata*, 18-11-1989).

Menlu Ali Alatas, mengatakan di Jakarta tanggal 23 November 1989 bahwa: (1) pertemuan tidak akan menggunakan pendekatan parsial; (2) pembatasan jumlah peserta pertemuan informal dimaksudkan untuk menjaga proses negosiasi yang sejak Konperensi Paris sampai sekarang belum berhasil mencapai penyelesaian menyeluruh (*Antara*, 23-11-1989).

Juru bicara militer Thailand, Letjen Narudol Dejpradiyuth, mengatakan di Aranyaprathet 29 November 1989 bahwa: (1) empat kelompok perlawanan Kamboja setuju untuk menghadiri pertemuan informal; (2) pada tanggal 7 November 1989 ketiga pemimpin faksi perlawanan Kamboja mengirim surat kepada Menlu Ali Alatas, yang menyatakan kesediaannya untuk menghadiri babak perundingan baru di Jakarta dengan beberapa syarat (*Antara*, 30-11-1989).

Sementara itu Presiden Perancis, Francois Mitterrand, mengatakan di Paris 1 Desember 1989 bahwa: (1) untuk menghentikan kerusuhan di Kamboja harus ada penyelesaian secara menyeluruh; (2) keputusan harus dikembalikan pada penduduk setempat tentang keinginan mereka atas masa depannya; (3) Perancis selama ini telah berjuang keras untuk melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok yang bersengketa (*Merdeka*, 2-12-1989).

### B. USAHA ASEAN LEWAT PBB

Dutabesar RI untuk PBB, Nana S. Sutresna, mengatakan di New York tanggal 15 November 1989 bahwa: (1) kekhawatiran akan kembalinya Khmer Merah tidak beralasan samasekali. Dalam pemilu yang bebas dan jujur rakyat Kamboja dapat menentukan apa yang ingin



mereka lakukan atas Khmer Merah; (2) semua faksi Kamboja perlu diikutsertakan dalam suatu pemerintahan transisi (*Antara*, 16-11-1989). Pada hari berikutnya dia mengatakan bahwa: (1) semua pihak agar meningkatkan segala usaha untuk mencapai penyelesaian politik di Kamboja; (2) konflik dan pertempuran yang terus-menerus di Kamboja membawa ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara; (3) Kamboja merupakan negara yang hak-hak rakyatnya belum diakui untuk menentukan masa depannya sendiri (*Kompas*, 17-11-1989).

Majelis Umum PBB, tanggal 16 November 1989, menyerukan penyelesaian politik menyeluruh bagi masalah Kamboja dengan diterimanya rancangan resolusi yang diprakarsai oleh ASEAN dan 73 negara lainnya, dengan 124 negara mendukung, 17 menentang dan 12 abstain.

Resolusi itu memberi jaminan kepada rakyat Kamboja untuk menentukan sendiri masa depannya, dan jaminan internasional bagi pemulihan kemerdekaan, kedaulatan dan kenetralan serta sifat non-blok Kamboja. Dengan resolusi itu PBB akan menekankan setiap penyelesaian menyeluruh bagi masalah Kamboja, yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (1) penarikan mundur semua pasukan asing, di bawah pengawasan dan pengendalian PBB; (2) pembentukan pemerintahan sementara; (3) rekonsiliasi nasional di bawah Pangeran Sihanouk; (4) tidak berkuasanya kembali Khmer Merah; (5) dipulihkan dan dipertahankannya kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah serta status Kamboja yang netral dan non-blok; (6) hak rakyat Kamboja untuk menentukan nasibnya sendiri; (7) komitmen dari semua negara untuk tidak melakukan campur tangan dan investasi di dalam urusan dalam negeri Kamboja (*Antara*, 17-11-1989).



# Para Penulis

- **HARDI,**  
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1950); kemudian mengikuti program Post Graduate Student pada Ruskin College, Oxford, England (1951-1952). Sejak tahun 1945 memegang pelbagai posisi penting, antara lain Anggota DPR: 1957-1959 dan 1966-1968. Anggota Dewan Pertimbangan Agung (1968-1976) dan mantan Duta Besar RI di Republik Sosialis Vietnam (1976-1980). Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia (1963-1970). Sekarang tetap aktif sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial Politik Universitas Darma Agung, Medan, sejak tahun 1981.
- **PRANARKA, A.M.W.,**  
Memperoleh gelar Sarjana Filsafat dari Athenaeo, Poona, India (1965); Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1969) dan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum, dari universitas yang sama tahun 1984. Sekarang Anggota Dewan Direktur CSIS dan Ketua Departemen Politik, CSIS Jakarta dan Ketua Konsorsium Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjanawiyata, Tamansiswa Yogyakarta.
- **SIHBUDI, M. Riza,**  
Sarjana Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia, tahun 1984; kini anggota Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik & Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPW-LIPI), Jakarta, Staf Peneliti dalam bidang Politik Kawasan Timur Tengah dan Indonesia; Dewan Redaksi *Jurnal Ilmu Politik & Anggota Komisi Publikasi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi)* periode 1987-1990.
- **SOEMITRO,**  
Mengikuti pendidikan pada Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat I (1951-1952) dan Sekolah Lanjutan Perwira II (Reguler Officer's Advance Course, FT. Benning, USA, 1958); Kemudian mengikuti pula program Sekolah Staf dan Komando ABRI (Fuerungs Akademi der Bundeswehr, Hamburg, Jerman Barat, 1963) selama dua tahun. Sejak tahun 1945 memegang pelbagai posisi penting. Beberapa di antaranya ialah sebagai Pangdam IX Mulawarman dan Asisten II/Operasi Menteri Panglima Angkatan Darat (1965); kemudian Pangdam VIII Brawijaya (1966); Wakil Panglima Kopkamtib (1969-1970). Dan Panglima Kopkamtib/WAPANGAB (1971). Tahun 1981 sampai sekarang menjadi Penasihat Menteri Negara Ristek.
- **SURYOHADIPROJO, Sayidiman,**  
Lulusan Akademi Militer, Yogyakarta (1948); memperoleh pendidikan Perwira Infanteri, Fort Benning, AS (1952); Sekolah Staf dan Komando, Hamburg, Jerman Barat (1965). Mantan pelbagai posisi penting, antara lain Gubernur Lemhanas (1974-1978), Duta Besar RI di Jepang (1979-1983). Sejak 1983 hingga sekarang Penasihat Menristek, juga menjadi dosen Ketahanan Nasional pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- **WANANDI, Jusuf,**  
Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta (1960). Pada tahun 1964 menjadi dosen di fakultas dan universitas yang sama. Tahun 1977: Congressional Fellow yang disponsori oleh American Political Science Association (APSA). Kini Ketua Dewan Penyantun dan Anggota Dewan Direktur CSIS; Anggota, Board of Governors, East-West Center, Honolulu; Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Kerjasama Ekonomi Pasifik.











Catatan:

tempel  
perangko  
di sini

Kepada:  
Biro Pemasaran  
Centre for Strategic and  
International Studies  
  
Jl. Tanah Abang III/23-27  
Jakarta 10160  
Telepon: 356532-5

n-  
lu

Langganan

daftar bacaan. Pengiriman naskah hendaknya disertai nama lengkap dan alamat penulis yang jelas. Untuk tulisan-tulisan yang dimuat akan disediakan honoraria yang pantas. Naskah-naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis jika hal itu dikehendakinya. Surat menyurat yang berhubungan dengan hal tersebut harap ditujukan ke Redaksi ANALISIS CSIS.

Harga pengganti ongkos cetak Rp 3.000,00 per eksemplar; langganan setahun (6 nomor, sudah termasuk ongkos kirim biasa) Rp 15.000,00. Surat menyurat yang berhubungan dengan langganan ditujukan ke Biro Pemasaran, CSIS.

Alamat

Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534, 356535.